PROSPEKTUS

Jadwal

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	23 April 2025	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	14 – 18 Juli 2025
Efektif Pernyataan Pendaftaran	:	30 Juni 2025	Akhir Pembayaran Saham Pelaksanaan HMETD	:	18 Juli 2025
Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD	:	10 Juli 2025	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	:	16 – 22 Juli 2025
Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	8 Juli 2025	Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	22 Juli 2025
Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	9 Juli 2025	Penjatahan Saham Tambahan	:	23 Juli 2025
Cum-HMETD di Pasar Tunai	:	10 Juli 2025	Pembayaran dari Pembeli Siaga	:	23 Juli 2025
Ex-HMETD di Pasar Tunai	:	11 Juli 2025	Distribusi Saham Hasil Penjatahan	:	25 Juli 2025
Distribusi HMETD	:	11 Juli 2025	Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 Juli 2025
Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	14 Juli 2025			

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SARANA MENARA NUSANTARA

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding

Berkedudukan di Kudus, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Jend. A. Yani No. 19A
Kudus, Indonesia
Tel. +62 291 431691
Fax. +62 291 431718
E-mail: corpsec@ptsmn.co.id
Situs Web : www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang
Menara BCA, lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. +62 21 23585500
Fax. +62 21 23586446

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Baru atau sekitar 13,91% (tiga belas koma sembilan satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh (tidak termasuk saham treasuri) setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp10,00- (sepuluh Rupiah) per saham ("**Saham HMETD**"). Setiap pemegang 619 (enam ratus sembilan belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp5.496.765.537.080 (lima triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 ("**POJK No.32/2015**"), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

Melalui surat pernyataan tertanggal 28 April 2025, PT Sapta Adhikari Investama ("**SAI**") selaku pemegang 52,46% (lima puluh dua koma empat enam persen) saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, SAI tidak akan melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh HMETD yang tidak dilaksanakan dalam PMHMETD I Perseroan.

Melalui surat pernyataan tertanggal 25 Juni 2025, PT Dwimuria Investama Andalan ("**DIA**") selaku pemegang 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 142 tanggal 25 April 2025, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 169 tanggal 23 Mei 2025, keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. , Notaris di Jakarta Barat ("**PPSS**"), DIA sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru sebanyak-banyaknya 7.397.355.646 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam) saham, yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru sebagaimana diatur di dalam PPSS. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DIA menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya rincian bukti kecukupan dana.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB atas rencana penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan dalam jumlah sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp 10,00 (sepuluh) per saham dari modal disetor Perseroan dengan menerbitkan HMETD dalam rangka PMHMETD I, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 112 tanggal 23 April 2025, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

HMETD AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 14 JULI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 JULI 2025. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 14 JULI 2025. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 JULI 2025, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH GRUP MENGHADAPI KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI. FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH YAITU MAKSIMUM SEBESAR 13,91% (TIGA BELAS KOMA SEMBILAN SATU PERSEN).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2025

PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 045/CS-OJK/SMN/IV/25 tertanggal 29 April 2025 perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sarana Menara Nusantara Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 33/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut "**UU P2SK**") dan peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I, setiap pihak ter-Afiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PT BCA Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus PMHMETD I ini dan menyatakan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT BCA Sekuritas dalam Prospektus ini melalui surat tertanggal 28 Oktober 2024 dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT, DAN PERSEROAN DIBEBASKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD.

SAHAM BARU TIDAK DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN U.S. SECURITIES ACT ATAU HUKUM NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT DAN SAHAM BARU DITAWARKAN DAN DIJUAL: (I) DI WILAYAH AMERIKA SERIKAT, JIKA DIPERBOLEHKAN BERDASARKAN RULE 801 BERDASARKAN U.S. SECURITIES ACT. KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERKEWARGANEGARAAN AMERIKA SERIKAT ATAU DIDIRIKAN BERDASARKAN HUKUM AMERIKA SERIKAT SESUAI DENGAN RULE 801 BERDASARKAN U.S. SECURITIES ACT; DAN (II) DILUAR AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN REGULATION S. SAHAM BARU YANG DIPEROLEH DALAM PMHMETD I ADALAH "RESTRICTED SECURITIES" (EFEK YANG DIBATASI) SEBAGAIMANA DIARTIKAN DALAM RULE 144(A)(3) BERDASARKAN U.S. SECURITIES ACT SELAMA JUMLAH DAN PROPORSI SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PADA SAAT RECORDING DATE PMHMETD I ADALAH "RESTRICTED SECURITIES" (EFEK YANG DIBATASI) SESUAI DENGAN RULE 144A (3) BERDASARKAN U.S. SECURITIES ACT SEPANJANG DAN SESUAI PROPORSI SAHAM YANG TELAH DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM TERSEBUT PADA SAAT TANGGAL DAFTAR PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK MEMPEROLEH HMETD MERUPAKAN "RESTRICTED SECURITIES" (EFEK YANG DIBATASI). SAMPAI DENGAN 40 HARI SETELAH PENYELESAIAN, PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PENJUALAN HMETD ATAU SAHAM BARU DI DALAM AMERIKA SERIKAT OLEH BROKER ATAU DEALER (DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN APAKAH PIHAK TERSEBUT BERPARTISIPASI ATAU TIDAK DALAM PENAWARAN) DAPAT MELANGGAR PERSYARATAN PENDAFTARAN BERDASARKAN U.S. SECURITIES ACT JIKA PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PENJUALAN TERSEBUT DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN PENGECUALIAN-PENGECUALIAN DALAM U.S. SECURITIES ACT.

PENAWARAN DIBUAT ATAS EFEK SUATU PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DI REPUBLIK INDONESIA. PENAWARAN INI AKAN TUNDUK DENGAN KETENTUAN KETERBUKAAN DI INDONESIA YANG BERBEDA DENGAN KETENTUAN DI AMERIKA SERIKAT. SETIAP LAPORAN KEUANGAN YANG DILAMPIRKAN PADA DOKUMEN INI TELAH DISIAPKAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA DAN TERDAPAT KEMUNGKINAN BAHWA STANDAR TERSEBUT TIDAK DAPAT DIBANDINGKAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN DI AMERIKA SERIKAT.

ANDA DAPAT MENGALAMI KESULITAN DALAM MELAKUKAN PELAKSANAAN ATAU HAK-HAK ATAU KLAIM ANDA BERDASARKAN U.S. FEDERAL SECURITIES LAWS, DIKARENAKAN PERUSAHAAN INI BERLOKASI DI INDONESIA DAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OFFICER ATAU DIREKTURNYA BERDOMISILI DI INDONESIA. TERDAPAT KEMUNGKINAN BAHWA ANDA TIDAK DAPAT MELAKUKAN GUGATAN TERHADAP PERUSAHAAN NON-AMERIKA SERIKAT ATAU OFFICER ATAU DIREKSINYA DALAM PENGADILAN NON-AMERIKA SERIKAT ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP U.S. SECURITIES LAWS. ANDA DAPAT MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMOHON KEPADA PERUSAHAAN NON-AMERIKA SERIKAT DAN AFILIASINYA UNTUK TUNDUK PADA KEPUTUSAN PENGADILAN DI AMERIKA SERIKAT.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**
DEFINISI DAN SINGKATAN ..... **II**
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ..... **VIII**
RINGKASAN ..... **IX**
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I **1**
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM **9**
III. PERNYATAAN UTANG **14**
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING **33**
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN **38**
A. UMUM 38
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN 39
C. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI 40
D. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS 43
E. ARUS KAS 44
F. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN 45
G. SEGMEN OPERASI 46
H. BELANJA MODAL 47
I. PEMBATASAN TERHADAP PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN 48
J. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS 49
K. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO 49
L. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH SERTA LABA OPERASI 50
M. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI 50
VI. FAKTOR RISIKO **51**
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK **63**
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA DAN PERUSAHAAN ANAK **64**
1) RIWAYAT SINGKAT 64
2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN 64
3) DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN 65
4) KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR 65
5) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 66
6) TATA KELOLA PERUSAHAAN 71
7) STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 74
8) KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM 74
9) STRUKTUR ORGANISASI 76
10) SUMBER DAYA MANUSIA 76
11) PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 78
12) PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN 80
13) ASET YANG DIMILIKI PERSEROAN 80
14) KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 80
IX. EKUITAS **88**
X. KEBIJAKAN DIVIDEN **90**
XI. PERPAJAKAN **91**
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA **94**
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL **96**
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM **98**
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS **104**

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK, yang berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Bursa	Berarti perantara perdagangan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Anggaran Dasar	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam-LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata

	Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK.
Biro Administrasi Efek atau BAE	Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/ atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.dalam Penawaran Umum, yaitu PT Raya Saham Registra berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.
Bursa Efek atau BEI	Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
DPS atau Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
Entitas Anak atau Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
FPPS	Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I.
FPPS Tambahan	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah).
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius (*Gregorian Calendar*) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditentukan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja	Berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
KAP PSS	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
Kemenkumham	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UU P2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan berhak atas HMETD.
Pemegang HMETD	Berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD.
Pemerintah	Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
Periode Perdagangan	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya, yaitu mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ("PPAS")	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 141 tanggal 25 April 2025, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 168 tanggal 23 Mei 2025, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Perseroan dengan BAE.
Perjanjian Pembelian Sisa Saham ("PPSS")	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 142 tanggal 25 April 2025, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 169 tanggal 23 Mei 2025, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan PMHMETD I, yang dalam hal ini adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk, berkedudukan di Kudus, Indonesia.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan BEI No. I-A	Berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Peraturan BEI No. I-H	Berarti Peraturan BEI No. I-H tentang Sanksi.
POJK No.33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.32/2015	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang

	Perubahan atas POJK No. 32/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.33/2015	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.16/2020	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek, sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK, *juncto* POJK No. 33/2015.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
PMHMETD I	Berarti penambahan modal dengan memberikan HMETD atas sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham. Setiap pemegang 619 (enam ratus sembilan belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat melaksanakan HMETD.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Rp atau Rupiah	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.

RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD atau Saham Baru	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dan/atau Masyarakat dalam PMHMETD I yaitu sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham.
Saham HMETD	Berarti saham yang ditawarkan Perseroan sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Baru atau sekitar 13,91% (tiga belas koma sembilan satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh (tidak termasuk saham treasuri) setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp10,00- (sepuluh Rupiah) per saham.
Saham Lama	Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal DPS.
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
USD atau US$	Berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU P2SK.
UUPT	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856.
UU P2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ATMI	:	Berarti PT Abadi Tambah Mulia Internasional
BIT	:	Berarti PT BIT Teknologi Nusantara
BMG	:	Berarti PT Bach Multi Global
BWA	:	Berarti PT Broadband Wahana Asia
CGS	:	Berarti PT Caturguwiratna Sumapala
DIA	:	Berarti PT Dwimuria Investama Andalan
DNT	:	Berarti PT Darmanusa Tritunggal
GIK	:	Berarti PT Global Indonesia Komunikatama
GDP	:	Berarti PT Gema Dwimitra Persada
GTP	:	Berarti PT Global Telekomunikasi Prima
Hutchison	:	Berarti PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications)
HTS	:	Berarti Konsorsium Iforte HTS
IBST	:	Berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
IEN	:	Berarti PT Iforte Energi Nusantara
IForte	:	Berarti PT Iforte Solusi Infotek
IGI	:	Berarti PT Iforte Global Internet
IK	:	Berarti PT Istana Kohinoor
IKS	:	Berarti PT Integra Kreasitama Solusindo
Indosat	:	Berarti PT Indosat Tbk
IPI	:	Berarti PT Iforte Payment Infrastructure
KIN	:	Berarti PT Komet Infra Nusantara
PMP	:	Berarti PT Protelindo Menara Permata
Protelindo	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
PT	:	Berarti PT Platinum Teknologi
QTR	:	Berarti PT Quattro International
RA	:	Berarti PT Rekajasa Akses
SAI	:	Berarti PT Sapta Adhikari Investama
SIP	:	Berarti PT Sarana Inti Persada
SMN	:	Berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk
STP	:	Berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk
TMG	:	Berarti PT Tricipta Mandhala Gumilang
VTS	:	Berarti PT Varnion Technology Semesta
XL	:	Berarti PT XL Axiata Tbk (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk.)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang IDR dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMN No. 31, tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 11.25.1.64.00369, dengan Agenda Pendaftaran No. 462/BH-11.25/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 257 tanggal 26 Juni 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0170481 tanggal 10 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138815.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Juli 2024 ("**Akta No. 257/2024**") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 22 November 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia No. AHU-0075650.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253375.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024 ("Akta No. 182/2024") Akta No. 257/2024 dan Akta No. 182/2024 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
   a. Menjalankan usaha konsultasi manajemen lainnya, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

      Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain;

   b. Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding, termasuk: kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan

   c. Menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi, termasuk: kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang

mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.

ii. kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu: menjalankan aktivitas usaha-usaha lainnya, yang berkaitan dan/atau mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.

2. Keterangan Mengenai PMHMETD I

Jumlah saham	:	Sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah) untuk setiap saham.
Rasio HMETD atas saham	:	Setiap pemegang 619 (enam ratus sembilan belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB mempunyai 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Harga pelaksanaan	:	Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) untuk setiap saham.
Nilai emisi	:	Sebesar Rp5.496.765.537.080 (lima triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Maksimum sebesar 13,91% (tiga belas koma sembilan satu persen) setelah PMHMETD I.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	10 Juli 2025
Tanggal pencatatan di BEI	:	14 Juli 2025
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	:	14 – 18 Juli 2025

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I dan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSLB tanggal 23 April 2025 atas rencana penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan dalam jumlah sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham dari modal disetor Perseroan dengan menerbitkan HMETD dalam rangka PMHMETD I, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 112 tanggal 23 April 2025, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Melalui surat pernyataan tertanggal 28 April 2025, SAI selaku pemegang 52,46% (lima puluh dua koma empat enam persen) saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, SAI tidak akan melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh HMETD yang tidak dilaksanakan dalam PMHMETD I Perseroan.

Melalui surat pernyataan tertanggal 25 Juni 2025, DIA selaku pemegang 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 142 tanggal 25 April 2025, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara

Tbk No. 169 tanggal 23 Mei 2025, keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. , Notaris di Jakarta Barat ("**PPSS**"), DIA sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru sebanyak-banyaknya 7.397.355.646 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam) saham, yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru sebagaimana diatur di dalam PPSS. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DIA menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya rincian bukti kecukupan dana

3. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Proforma PMHMETD I

Susunan struktur permodalan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 22 November 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia No. AHU-0075650.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253375.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2025, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sapta Adhikari Investama	26.764.246.165	267.642.461.650	52,46
- PT Dwimuria Investama Andalan	4.247.101.900	42.471.019.000	8,33
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)	19.025.385.281	190.253.852.810	37,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	**50.036.733.346**	**500.367.333.460**	**98,08**
- Saham Treasuri	977.891.654	9.778.916.540	1,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Setelah Saham Treasuri	**51.014.625.000**	**510.146.250.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**148.985.375.000**	**1.489.853.750.000**	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki saham treasuri yang dibeli oleh Perseroan dalam periode pembelian kembali saham pada tahun 2018 dan 2020. Jumlah saham treasuri adalah 977.891.654 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat) saham.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham termasuk DIA dan masyarakat melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali SAI yang menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD dan DIA sebagai pembeli siaga membeli seluruh saham baru yang tidak dilaksanakan setelah pemesanan tambahan yaitu:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**		**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sapta Adhikari Investama	26.764.246.165	267.642.461.650	52,46	26.764.246.165	267.642.461.650	45,29
- PT Dwimuria Investama Andalan	4.247.101.900	42.471.019.000	8,33	9.257.012.733	92.570.127.330	15,66
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)	19.025.385.281	190.253.852.810	37,29	22.098.953.179	220.989.531.790	37,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Saham Treasuri	**50.036.733.346**	**500.367.333.460**	**98,08**	**58.120.212.077**	**581.202.120.770**	**98,35**
- Saham Treasuri	977.891.654	9.778.916.540	1,92	977.891.654	9.778.916.540	1,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Saham Treasuri	**51.014.625.000**	**510.146.250.000**	**100,00**	**59.098.103.731**	**590.981.037.310**	**100,00**
Portepel	**148.985.375.000**	**1.489.853.750.000**		**140.901.896.269**	**1.409.018.962.690**	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham termasuk SAI dan masyarakat tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, dan DIA sebagai pembeli siaga membeli seluruh saham baru yang tidak dilaksanakan setelah pemesanan tambahan yaitu:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**		**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sapta Adhikari Investama	26.764.246.165	267.642.461.650	52,46	26.764.246.165	267.642.461.650	45,29
- PT Dwimuria Investama Andalan	4.247.101.900	42.471.019.000	8,33	12.330.580.631	123.305.806.310	20,86
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)	19.025.385.281	190.253.852.810	37,29	19.025.385.281	190.253.852.810	32,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Saham Treasuri	**50.036.733.346**	**500.367.333.460**	**98,08**	**58.120.212.077**	**581.202.120.770**	**98,35**
- Saham Treasuri	977.891.654	9.778.916.540	1,92	977.891.654	9.778.916.540	1,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Saham Treasuri	**51.014.625.000**	**510.146.250.000**	**100,00**	**59.098.103.731**	**590.981.037.310**	**100,00**
Portepel	**148.985.375.000**	**1.489.853.750.000**		**140.901.896.269**	**1.409.018.962.690**	

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini (setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi) akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Protelindo, entitas anak yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana Perseroan dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Grup Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan"), dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01791/2.1032/AU.1/10/0702-3/1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai: (a) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (b) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan

keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi ”hal audit utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* dan akuntansi kombinasi bisnis merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total aset lancar	4.955.840	4.426.883
Total aset tidak lancar	72.872.540	63.992.063
Total aset	**77.828.380**	**68.418.946**
Total liabilitas jangka pendek	20.137.780	24.298.953
Total liabilitas jangka panjang	38.534.936	27.608.329
Total liabilitas	**58.672.716**	**51.907.282**
Total ekuitas	**19.155.664**	**16.511.664**

Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	**12.735.815**	**11.740.345**
Beban pokok pendapatan	(3.996.322)	(3.527.754)
Laba bruto	**8.739.493**	**8.212.591**
Laba usaha	7.265.921	6.941.302
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	4.195.695	4.103.794
Laba tahun berjalan	**3.364.606**	**3.303.642**
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	3.364.695	3.281.051
Laba per saham (angka penuh)	**67**	**65**

Ringkasan Data Arus Kas

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	9.340.067	8.905.768
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(8.005.524)	(4.537.372)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(783.037)	(4.246.921)
Kenaikan neto kas dan setara kas	**551.506**	**121.475**
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(40.000)	(1.434)
Kas dan setara kas awal tahun	**428.677**	**308.636**
Kas dan setara kas akhir tahun	**940.183**	**428.677**

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio keuangan *(%)*		
Laba tahun berjalan terhadap total aset *(ROA)*	4,32	4,83
Laba tahun berjalan terhadap total ekuitas *(ROE)*	17,56	20,01
EBITDA[1)] terhadap pendapatan *(EBITDA margin)*	84,02	85,00
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan *(net margin)*	26,42	28,14
Rasio keuangan *(x)*		
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	0,25	0,18
Total liabilitas terhadap total aset	0,75	0,76
Total liabilitas terhadap total ekuitas	3,06	3,14
Total utang bank[2)] terhadap total ekuitas	2,61	2,17
Interest Coverage Ratio[3)] (ICR)	4,06	4,62
Debt Service Coverage Ratio[4)] (DSCR)	2,88	2,84

1) EBITDA dihitung dari laba usaha ditambah dengan depresiasi dan amortisasi serta beban usaha lainnya, neto
2) Total utang bank dihitung dari utang bank jangka pendek ditambah dengan utang bank jangka panjang
3) ICR (Interest Coverage Ratio) dihitung dari EBITDA dibagi dengan biaya bunga bank
4) DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dihitung dengan membagi arus kas bebas (arus kas bebas dihitung dari EBITDA ditambah dengan modal kerja dikurang dengan pembayaran pajak) dengan pembayaran utang. Perhitungan ini sesuai dengan formula perhitungan covenant dari perjanjian fasilitas pinjaman dengan bank

Pembatasan Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Rasio Keuangan di perjanjian kredit atau liabilitas lainnya	Pembatasan Rasio	31 Desember	
		2024	2023
Utang bank			
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Max 5,00x	2,88x	2,84x
Net debt to running EBITDA	Min 1,30x	4,59x	4,31x
Obligasi			
Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Protelindo, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Protelindo kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Protelindo	Max 20%	0,00%	0,00%
Total pinjaman bersih dengan *running EBITDA*	Max 5,00x*	4,59x	4,31x
Running EBITDA dengan beban bunga	Min 1,50x	3,25x	3,99x

** kecuali dalam hal tertentu, Protelindo diperbolehkan memiliki rasio pinjaman sampai dengan 7,0x*

Keterangan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting.

6. Faktor Risiko

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Grup menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan infrastruktur telekomunikasi.

Grup menghadapi persaingan dari penyedia infrastruktur telekomunikasi lainnya. Mengingat bahwa industri infrastruktur telekomunikasi bersifat padat modal, memerlukan kemampuan operasional yang baik, dan memerlukan hubungan yang kuat dengan para operator telekomunikasi, maka tidak mudah bagi pemain-pemain baru untuk masuk dalam industri ini.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1) Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan
2) Menurunnya permintaan atas infrastruktur telekomunikasi atau menurunnya permintaan atas ruang menara dan jaringan kabel optik dan VSAT dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
3) Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
4) Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli
5) Kegiatan Usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun perbedaan penafsiran atau implementasi, dan/atau tumpang tindih keberlakuan peraturan perundang-undangan
6) Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa Menara Telekomunikasi, jaringan kabel serat optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang
7) Kemampuan Perseroan untuk membangun Menara Telekomunikasi dan mengembangkan jaringan kabel serat optik baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*
8) Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa, pembangunan dan akuisisi
9) Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja Operasional
10) Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai
11) Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan atau keberadaan Menara Telekomunikasi
12) Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel serat optik
13) Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan karena sabotase dan bencana alam
14) Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan
15) Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga
16) Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas
17) Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan
18) Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan
19) Jumlah kewajiban Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan
20) Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
21) Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan dan Entitas Anak

C. Risiko Umum

1) Risiko Investasi
2) Risiko Peraturan Pemerintah
3) Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing

D. Risiko Bagi Investor

1) Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
2) Risiko terkait nilai tukar mata uang asing
3) Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
5) Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

7. Kebijakan Dividen

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 29 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, maka kebijakan pembagian dividen yang diterapkan Perseroan disesuaikan dengan kemampuan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2020 sampai dengan 2024, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun Fiskal	Jumlah laba (juta Rp)	% dividen dari laba bersih	Nilai dividen (juta Rp)	Dividen per saham (Rp)	Dasar Pembagian	Tanggal Pembayaran Dividen
2024	3.364.606	23,8%	800.000	15,9	Keputusan RUPST tanggal 23 April 2025	22 Januari 2025 dan 21 Mei 2025
2023	3.303.642	36,3%	1.200.000	24,1	Keputusan RUPST tanggal 26 Juni 2024	22 Desember 2023 dan 26 Juli 2024
2022	3.496.535	34,3%	1.200.000	24,1	Keputusan RUPST tanggal 5 Mei 2023	16 Desember 2022 dan 31 Mei 2023
2021	3.447.875	34,8%	1.200.000	24,1	Keputusan RUPST tanggal 27 Mei 2022	17 Desember 2021 dan 30 Juni 2022
2020	2.853.617	49,1%	1.400.000	28,1	Keputusan RUPST tanggal 31 Mei 2021	17 Desember 2020 dan Juni 2021

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Perseroan menawarkan sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Baru atau sekitar 13,91% (tiga belas koma sembilan satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh (tidak termasuk saham treasuri) setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp10,00- (sepuluh Rupiah) per saham ("**Saham HMETD**"). Setiap pemegang 619 (enam ratus sembilan belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp5.496.765.537.080 (lima triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 ("**POJK No.32/2015**"), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

Melalui surat pernyataan tertanggal 28 April 2025, SAI selaku pemegang 52,46% (lima puluh dua koma empat enam persen) saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, SAI tidak akan melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh HMETD yang tidak dilaksanakan dalam PMHMETD I Perseroan.

Melalui surat pernyataan tertanggal 25 Juni 2025, DIA selaku pemegang 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan.

Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 142 tanggal 25 April 2025, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 169 tanggal 23 Mei 2025, keduanya, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. , Notaris di Jakarta Barat ("**PPSS**"), DIA sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru sebanyak-banyaknya 7.397.355.646 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam) saham, yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru sebagaimana diatur di dalam PPSS. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DIA menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya rincian bukti kecukupan dana.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB atas rencana penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan dalam jumlah sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp 10,00 (sepuluh) per saham dari modal disetor Perseroan dengan menerbitkan HMETD dalam rangka PMHMETD I, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 112 tanggal 23 April 2025, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

SARANA MENARA NUSANTARA

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding

Berkedudukan di Kudus, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Jend. A. Yani No. 19A
Kudus, Indonesia
Tel. +62 291 431691
Fax. +62 291 431718
E-mail: corpsec@ptsmn.co.id
Situs Web : www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang
Menara BCA, lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. +62 21 23585500
Fax. +62 21 23586446

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH GRUP MENGHADAPI KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI. FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

1. Keterangan Mengenai PMHMETD I

Jumlah saham	:	Sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah) untuk setiap saham.
Rasio HMETD atas saham	:	Setiap pemegang 619 (enam ratus sembilan belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB mempunyai 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Harga pelaksanaan	:	Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) untuk setiap saham.
Nilai emisi	:	Sebesar Rp5.496.765.537.080 (lima triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Maksimum sebesar 13,91% (tiga belas koma sembilan satu persen) setelah PMHMETD I.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	10 Juli 2025
Tanggal pencatatan di BEI	:	14 Juli 2025
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	:	14 – 18 Juli 2025

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I dan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, Perseroan telah mendapat persetujuan RUPSLB tanggal 23 April 2025 sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan dalam jumlah sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham dari modal disetor Perseroan dengan menerbitkan HMETD dalam rangka PMHMETD I, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 112 tanggal 23 April 2025, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Melalui surat pernyataan tertanggal 28 April 2025, SAI selaku pemegang 52,46% (lima puluh dua koma empat enam persen) saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, SAI tidak akan melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh HMETD yang tidak dilaksanakan dalam PMHMETD I Perseroan.

Melalui surat pernyataan tertanggal 25 Juni 2025, DIA selaku pemegang 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 142 tanggal 25 April 2025, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memeberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 169 tanggal 23 Mei 2025, keduanya, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. , Notaris di Jakarta Barat ("**PPSS**"), DIA sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru sebanyak-banyaknya 7.397.355.646 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam) saham, yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru sebagaimana diatur di dalam PPSS. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DIA menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya rincian bukti kecukupan dana.

2. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah PMHMETD I

Susunan struktur permodalan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 22 November 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia No. AHU-0075650.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253375.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2025, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sapta Adhikari Investama	26.764.246.165	267.642.461.650	52,46
- PT Dwimuria Investama Andalan	4.247.101.900	42.471.019.000	8,33
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)	19.025.385.281	190.253.852.810	37,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	**50.036.733.346**	**500.367.333.460**	**98,08**
- Saham Treasuri	977.891.654	9.778.916.540	1,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Setelah Saham Treasuri	**51.014.625.000**	**510.146.250.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**148.985.375.000**	**1.489.853.750.000**	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki saham treasuri yang dibeli oleh Perseroan dalam periode pembelian kembali saham pada tahun 2018 dan 2020**.** Jumlah saham treasuri adalah 977.891.654 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat) saham.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham termasuk DIA dan masyarakat melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali SAI yang menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD dan DIA sebagai pembeli siaga membeli seluruh saham baru yang tidak dilaksanakan setelah pemesanan tambahan yaitu:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**		**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sapta Adhikari Investama	26.764.246.165	267.642.461.650	52,46	26.764.246.165	267.642.461.650	45,29
- PT Dwimuria Investama Andalan	4.247.101.900	42.471.019.000	8,33	9.257.012.733	92.570.127.330	15,66
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)	19.025.385.281	190.253.852.810	37,29	22.098.953.179	220.989.531.790	37,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Saham Treasuri	**50.036.733.346**	**500.367.333.460**	**98,08**	**58.120.212.077**	**581.202.120.770**	**98,35**
- Saham Treasuri	977.891.654	9.778.916.540	1,92	977.891.654	9.778.916.540	1,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Saham Treasuri	**51.014.625.000**	**510.146.250.000**	**100,00**	**59.098.103.731**	**590.981.037.310**	**100,00**
Portepel	**148.985.375.000**	**1.489.853.750.000**		**140.901.896.269**	**1.409.018.962.690**	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham termasuk SAI dan masyarakat tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, dan DIA sebagai pembeli siaga membeli seluruh saham baru yang tidak dilaksanakan setelah pemesanan tambahan yaitu:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**		**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sapta Adhikari Investama	26.764.246.165	267.642.461.650	52,46	26.764.246.165	267.642.461.650	45,29
- PT Dwimuria Investama Andalan	4.247.101.900	42.471.019.000	8,33	12.330.580.631	123.305.806.310	20,86
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)	19.025.385.281	190.253.852.810	37,29	19.025.385.281	190.253.852.810	32,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Saham Treasuri	**50.036.733.346**	**500.367.333.460**	**98,08**	**58.120.212.077**	**581.202.120.770**	**98,35**

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
- Saham Treasuri	977.891.654	9.778.916.540	1,92	977.891.654	9.778.916.540	1,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Saham Treasuri	**51.014.625.000**	**510.146.250.000**	**100,00**	**59.098.103.731**	**590.981.037.310**	**100,00**
Portepel	**148.985.375.000**	**1.489.853.750.000**		**140.901.896.269**	**1.409.018.962.690**	

Pelaksanaan PMHMETD I tidak menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali Perseroan.

3. Keterangan Tentang HMETD

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga tanggal 18 Juli 2025 dengan membawa:
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 619 (enam ratus sembilan belas) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) untuk setiap saham.

Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:
i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD, atau
iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Perdagangan dan Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga 18 Juli 2025.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan

penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berikut ini adalah mekanisme perdagangan dan pengalihan HMETD:

HMETD tidak dalam Sistem Penitipan Kolektif di KSEI (Warkat)

Perdagangan dan pengalihan HMETD berbentuk warkat dilakukan dengan Sertifikat Bukti HMETD. Pemegang HMETD yang melakukan penjualan/pembelian Sertifikat Bukti HMETD wajib memberikan dokumen pengalihan kepada Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, Biro Administrasi Efek akan mencatatkan transaksi pengalihan tersebut dan memasukan nama pembeli HMETD dalam Daftar Pemegang HMETD.

Dalam hal pemegang saham yang memiliki HMETD dalam bentuk warkat bermaksud memperdagangkan HMETD yang dimilikinya di BEI, maka Sertifikat Bukti HMETD harus diserahkan kepada Perantara Pedagang Efek atau Bank Kustodian, yang selanjutnya akan melakukan konversi atas sertifikat HMETD di KSEI untuk dapat diperdagangkan di BEI.

HMETD dalam Sistem Penitipan Kolektif di KSEI (Scripless)

Penyelesaian perdagangan HMETD yang berada dalam sistem penitipan kolektif (*scripless*) dilakukan melalui transaksi Bursa Efek Indonesia, yang kemudian diselesaikan dengan cara pemindahbukuan HMETD dari sub rekening efek penjual kepada sub rekening efek pembeli yang terdaftar di KSEI.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("**JATS**"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 18 Juli 2025.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2025 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025.

Biaya pemecahan SBHMETD akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

Harga Teoritis HMETD

Harga dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis harga HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari harga HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung harga HMETD:

$$HT\ Saham = \frac{(Rasio\ Lama \times Rp\ a) + (Rasio\ Baru \times Rp\ b)}{Rasio\ Lama + Rasio\ Baru}$$

$$HT\ HMETD = HT\ Saham - Rp\ b$$

Keterangan:

HT Saham	=	Harga teoretis saham setelah pelaksanaan PMHMETD
HT HMETD	=	Harga teoretis HMETD
Rasio Lama	=	Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD
Rasio Baru	=	Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD
Rp a	=	Asumsi harga pasar saham sebelum pelaksanaan PMHMETD
Rp b	=	Harga pelaksanaan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00096/BEI/12-2022 tanggal 28 Desember 2022.

$$HT\ Saham = \frac{(50.036.733.346 \times Rp\ 488^{*}) + (8.083.478.731 \times Rp\ 680)}{(50.036.733.346 + 8.083.478.731)}$$

$$= 515$$

** Harga penutupan per tanggal 24 Juni 2025*

$$HT\ HMETD = HT\ Saham - Rp\ b$$

$$= Rp\ 515 - Rp\ 680$$

$$= (Rp\ 165)$$

Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No.14/2019, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

Penggunaan SBHMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Juli 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 11 Juli 2025 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Tel. (021) 252 5666
Faks. (021) 252 5028
Email: hmetd.towr@registra.co.id

Hak Pemegang Saham

Apabila saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal pencatatan (*recording date*), mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut, dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam DPS Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut (proporsional). HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:

a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham 8 (delapan) hari bursa setelah tanggal

Rapat Umum Pemegang Saham, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.

b. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
c. Meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

4. Informasi Mengenai Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi *(Rp)*	Harga Terendah *(Rp)*	Total Volume Perdagangan *(lembar saham)*
Mar-25	555	496	378.962.800
Feb-25	640	520	473.464.800
Jan-25	730	630	562.851.800
Dec-24	740	610	737.412.000
Nov-24	805	695	459.187.600
Oct-24	870	765	665.268.600
Sep-24	885	795	905.223.800
Aug-24	850	775	1.105.039.100
Jul-24	815	720	903.034.900
Jun-24	735	660	1.596.023.900
May-24	805	685	3.228.233.500
Apr-24	870	770	579.024.800

Sumber: Bloomberg

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, tidak ada penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham atas saham Perseroan.

5. Pencatatan Saham di BEI

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Baru atau sekitar 13,91% (tiga belas koma sembilan satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh (tidak termasuk saham treasuri) setelah PMHMETD I. Dengan demikian, total keseluruhan saham Perseroan yang akan dicatatkan adalah sejumlah 58.120.212.077 (lima puluh delapan miliar seratus dua puluh juta dua ratus dua belas ribu tujuh puluh tujuh) saham (tidak termasuk saham treasuri).

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan saham dan/atau efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini (setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi) akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Protelindo, entitas anak yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Sebesar sekitar Rp5.492.598.148.080 (lima triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu delapan puluh Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil bagian atas penerbitan saham baru oleh Protelindo sehubungan dengan peningkatkan modal ditempatkan dan disetor Protelindo sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah).

Selisih antara dana yang diperoleh Perseroan dari PMHMETD I dengan total dana yang diperlukan oleh Perseroan untuk mengambil bagian atas penerbitan saham baru oleh Protelindo tersebut di atas, yakni sebesar sekitar Rp7.401.851.920 (tujuh miliar empat ratus satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) akan dibiayai menggunakan kas internal Perseroan.

Setelah pengambilan bagian atas saham baru tersebut kepemilikan saham Perseroan pada Protelindo dan struktur permodalan dalam Protelindo akan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Protelindo - Sebelum Peningkatan Modal oleh Perseroan

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sarana Menara Nusantara Tbk	3.322.620.186	332.262.018.600	99,99999997
- Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,00000003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.322.620.187	332.262.018.700	
Jumlah Saham dalam Portepel	6.677.379.813	667.737.981.300	

Struktur Permodalan Protelindo - Setelah Peningkatan Modal oleh Perseroan

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sarana Menara Nusantara Tbk	58.322.620.186	5.832.262.018.600	99,999999998
- Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,000000002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	58.322.620.187	5.832.262.018.700	
Jumlah Saham dalam Portepel	101.780.159.813	10.178.015.981.300	

Pengambilan bagian atas penerbitan saham baru oleh Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Protelindo tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu transaksi perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Lebih lanjut, peningkatan modal tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dalam mengingat bahwa nilai transaksi tersebut mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) tetapi tidak melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2024. Namun demikian, pengambilan bagian atas penerbitan saham baru sehubungan dengan peningkatan modal tersebut di atas merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a POJK No. 17/2020, yakni transaksi perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Seluruh penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas akan dilaksanakan Perseroan dan Protelindo sesuai dengan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Selanjutnya, dana yang diperoleh Protelindo tersebut di atas, akan digunakan oleh Protelindo untuk membayar seluruh dan/atau sebagian pokok utang Protelindo dengan rincian sebagai berikut:

No	Subjek		Keterangan
1.	**Nama Bank**	**:**	**PT Bank BNP Paribas Indonesia ("BNPP")**
	Perjanjian Pinjaman dan riwayat utang	:	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp500.000.000.000 dengan Nomor: LC/HT-093/LA/2024 tertanggal 21 November 2024 yang mana terakhir diubah dengan Perjanjian Amendemen terhadap Perjanjian Fasilitas tertanggal 22 Januari 2025.
	Sifat Hubungan Afliasi dengan Bank	:	Bukan pihak terafiliasi dari Perseroan
	Nilai Pinjaman/Jumlah Utang per tanggal 23 Mei 2025 *)	:	Rp500.000.000.000
	Jumlah yang akan dibayar per tanggal 31 Juli 2025	:	Rp500.000.000.000
	Jatuh Tempo	:	21 November 2025
	Penggunaan Pinjaman dari utang utang yang akan dilunasi	:	Untuk tujuan umum Perseroan termasuk juga pembiayaan kembali kewajiban-kewajiban Perseroan.
	Prosedur dan Persyaratan	:	Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran lebih awal secara sukarela sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud.
	Saldo Utang jika dibayar sebagian dan pelunasan lebih awal	:	Rp 0
2.	**Nama Bank**	**:**	**PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Danamon")**
	Perjanjian Pinjaman dan riwayat utang	:	Perjanjian Kredit Pinjaman Bergulir sebesar Rp1.000.000.000.000 tertanggal 28 Juni 2021 yang mana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dengan Nomor: 364/PP/EB/1224 tertanggal 12 Desember 2024.
	Sifat Hubungan Afliasi dengan Bank	:	Bukan pihak terafiliasi dari Perseroan.
	Nilai Pinjaman/Jumlah Utang per tanggal 23 Mei 2025 *)	:	Rp407.825.000.000
	Jumlah yang akan dibayar per tanggal 31 Juli 2025	:	Rp407.000.000.000
	Jatuh Tempo	:	12 November 2025
	Penggunaan Pinjaman dari utang utang yang akan dilunasi	:	Untuk tujuan umum Perseroan.
	Prosedur dan Persyaratan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran lebih awal secara sukarela paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud. b) Dalam hal pembayaran lebih awal dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Saldo Utang jika dibayar sebagian dan pelunasan lebih awal **)	:	Rp825.000.000

No	Subjek		Keterangan
3.	**Nama Bank**	**:**	**PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")**
	Perjanjian Pinjaman dan riwayat utang	:	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan Nomor: JAK/180550/U/180905 tertanggal 23 Oktober 2018 yang mana terakhir diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan Nomor: JAK/212059/U/230615 tertanggal 14 September 2023.
	Sifat Hubungan Afliasi dengan Bank	:	Bukan pihak terafiliasi dari Perseroan.
	Nilai Pinjaman/Jumlah Utang per tanggal 23 Mei 2025 *)	:	Rp799.000.000.000
	Jumlah yang akan dibayar per tanggal 31 Juli 2025	:	Rp799.000.000.000
	Jatuh Tempo	:	10 Juli 2025 (dapat diperpanjang)
	Penggunaan Pinjaman dari utang utang yang akan dilunasi	:	Untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan.
	Prosedur dan Persyaratan	:	Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran lebih awal secara sukarela sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud.
	Saldo Utang jika dibayar sebagian dan pelunasan lebih awal	:	Rp 0
4.	**Nama Bank**	**:**	**MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta ("MUFG")**
	Perjanjian Pinjaman dan riwayat utang	:	Perjanjian Kredit Pinjaman Bergulir sebesar Rp250.000.000.000 tertanggal 28 Februari 2017 yang mana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit sebesar Rp2.500.000.000.000 tertanggal 23 Desember 2024.
	Sifat Hubungan Afliasi dengan Bank	:	Bukan pihak terafiliasi dari Perseroan.
	Nilai Pinjaman/Jumlah Utang per tanggal 23 Mei 2025 *)	:	Rp1.558.600.000.000
	Jumlah yang akan dibayar per tanggal 31 Juli 2025	:	Rp1.458.000.000.000
	Jatuh Tempo	:	31 Desember 2025
	Penggunaan Pinjaman dari utang utang yang akan dilunasi	:	Untuk tujuan umum Perseroan namun tidak terbatas untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan dan pembiayaan kembali.
	Prosedur dan Persyaratan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran lebih awal secara sukarela paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud. b) Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Saldo Utang jika dibayar sebagian dan pelunasan lebih awal **)	:	Rp100.600.000.000

No	Subjek		Keterangan
5.	**Nama Bank**	**:**	**PT Bank SMBC Indonesia, Tbk. ("SMBC")**
	Perjanjian Pinjaman dan riwayat utang	:	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Tanpa Komitmen sampai dengan Rp1.500.000.000.000 dengan Nomor: BTPN/NS/0122 tertanggal 8 Desember 2021 yang mana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama atas Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Fasilitas Pinjaman Berulang Tanpa Komitmen sampai dengan Rp4.000.000.000.000 tertanggal 20 Mei 2025.
	Sifat Hubungan Afliasi dengan Bank	:	Bukan pihak terafiliasi dari Perseroan
	Nilai Pinjaman/Jumlah Utang per tanggal 23 Mei 2025 *)	:	Rp1.836.275.445.973
	Jumlah yang akan dibayar per tanggal 31 Juli 2025	:	Rp1.836.000.000.000
	Jatuh Tempo	:	Maximum 12 (dua belas) bulan sejak penarikan terakhir fasilitas, yaitu tanggal 12 Juni 2026.
	Penggunaan Pinjaman dari utang utang yang akan dilunasi	:	Untuk kebutuhan umum Perseroan, namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja Perseroan.
	Prosedur dan Persyaratan	:	a) Debitur harus memberikan pemberitahuan kepada Pemberi Pinjaman sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal prabayar yang diusulkan. b) Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Saldo Utang jika dibayar sebagian dan pelunasan lebih awal **)	:	Rp275.445.973
6.	**Nama Bank**	**:**	**PT Bank QNB Indonesia, Tbk. ("QNB")**
	Perjanjian Pinjaman dan riwayat utang	:	Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Bergulir Rp500.000.000.000 dengan Nomor: 019/PK-1114/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang mana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan II dengan Nomor: 008/PK/IV/2025 tertanggal 24 April 2025.
	Sifat Hubungan Afliasi dengan Bank	:	Bukan pihak terafiliasi dari Perseroan.
	Nilai Pinjaman/Jumlah Utang per tanggal 23 Mei 2025 *)	:	Rp500.000.000.000
	Jumlah yang akan dibayar per tanggal 31 Juli 2025	:	Rp500.000.000.000
	Jatuh Tempo	:	26 Maret 2026.
	Penggunaan Pinjaman dari utang utang yang akan dilunasi	:	Untuk tujuan umum Perseroan dan modal kerja Perseroan.
	Prosedur dan Persyaratan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran lebih awal secara sukarela paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud. b) Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.

No	Subjek		Keterangan
	Saldo Utang jika dibayar sebagian dan pelunasan lebih awal	:	Rp0

**) Jumlah saldo utang Protelindo sesuai dengan tanggal tercantum.*
***) Jumlah sebagaimana tercantum pada tanggal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengingat tipe fasilitas pinjaman.*

Apabila terdapat kekurangan dana untuk rencana penggunaan dana tersebut, maka Protelindo akan menggunakan dana internal Protelindo.

Rencana penggunaan dana untuk pelunasan seluruh dan/atau sebagian pokok dan bunga utang Protelindo merupakan pelaksanaan kewajiban dari transaksi yang ada sebelumnya sehingga bukan merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020. Atas rencana penggunaan dana tersebut, Perseroan tidak wajib memenuhi kewajiban pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 42/2020 dan Pasal 6 POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan POJK No.30/2015.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini belum dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK melalui surat No. 018/CS-BAPEPAM/SMN/IV/10 tanggal 7 April 2010, dimana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini dengan melaporkan secara berkala kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD I tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD I seperti yang disajikan di dalam Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 0,0758152% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa Konsultan Keuangan sekitar 0,0148724%;
- Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,0277618%;
- Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0078744%;
- Biaya Notaris sekitar 0,0057579%;
- Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,0009915%;
- Biaya Pencatatan (OJK dan BEI) sekitar 0,0166734%; dan
- Biaya lain-lain (biaya audit penjatahan, dan biaya percetakan) sekitar 0,0018838%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Grup tanggal 31 Desember 2024 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang diambil dari laporan keuangan Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01791/2.1032/AU.1/10/0702-3/1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai: (a) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (b) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi ”hal audit utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* dan akuntansi kombinasi bisnis merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp58.672.716 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	
Pihak ketiga	929.781
Pihak berelasi	78.433
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	40.137
Pihak berelasi	71
Akrual	1.365.395
Utang bagian jangka pendek atas:	
Utang sewa	245.695
Utang bank	
Pihak ketiga	14.062.762
Pihak berelasi	616.500
Utang obligasi	274.913
Utang pajak	120.460
Pendapatan ditangguhkan	2.190.180
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	213.453
Total liabilitas jangka pendek	**20.137.780**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang sewa	673.078
Utang bank	
Pihak ketiga	31.054.547
Pihak berelasi	4.210.336
Utang obligasi	1.198.304
Provisi jangka panjang	353.980
Liabilitas pajak tangguhan, neto	724.311
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	119.404
Pendapatan ditangguhkan	33.240
Utang derivatif - jangka panjang	167.736
Total liabilitas jangka panjang	**38.534.936**
Total liabilitas	**58.672.716**

Berikut dibawah ini penjelasan untuk tiap akun liabilitas tersebut:

1. Utang pembangunan menara dan usaha lainnya

Saldo utang pembangunan menara dan usaha lainnya Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.008.214 juta, adapun rincian utang pembangunan menara dan usaha lainnya Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Pihak ketiga	
Rupiah	929.218
Dolar AS	508
Dolar Singapura	55
Pihak berelasi	
Rupiah	78.433
Total	**1.008.214**

2. Akrual

Saldo akrual Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.365.395 juta, adapun rincian akrual Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Biaya pembangunan menara, serat optik dan konektivitas	747.608
Bunga dan biaya keuangan	163.591
Pemeliharaan	133.966
Penalti	47.969
Sharing revenue	43.233
Jasa profesional	19.069
Local link	12.794
Pemasaran	5.674
Provisi penurunan pendapatan	4.638
Data center	1.218
Lain-lain	185.635
Total	**1.365.395**

3. Utang sewa

Saldo utang sewa Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp918.773 juta, adapun nilai tercatat neto dari utang sewa dan mutasi Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Saldo awal	**445.418**
Akuisisi	694.125
Penambahan	1.475.816
Beban penambahan bunga	49.785
Penyesuaian kurs mata uang asing	7.769
Pengurangan	(103.495)

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Pembayaran	(1.650.645)
Saldo akhir	**918.773**
Bagian jangka pendek	**(245.695)**
Bagian jangka panjang	**673.078**

Laporan keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Berikut adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sehubungan dengan sewa Grup:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Depresiasi dan amortisasi	1.284.349
Beban penambahan bunga	49.785
Total	**1.334.134**

Pada tanggal 31 Desember 2024, total estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan sebesar Rp325.062 juta dalam 1 tahun, Rp714.237 juta dalam 5 tahun, dan untuk tahun-tahun selanjutnya Rp110.649 juta.

4. Utang bank

Saldo utang bank Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp49.944.145 juta, adapun rincian utang bank Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2024	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Total
Pihak ketiga			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	9.000.000	10.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000	7.000.000	8.500.000
MUFG Bank Limited (USD130.000.000 & Rp2.500.000)	2.500.000	2.101.060	4.601.060
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BTPN Tbk) (USD100.000.000 & Rp2.402.300)	2.402.300	1.616.200	4.018.500
PT Bank Mizuho Indonesia (JPY14.000.000.000 & Rp2.300.000)	1.500.000	2.233.074	3.733.074
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.106.000	1.500.000	3.606.000
PT Bank HSBC Indonesia	850.000	1.600.000	2.450.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (USD6.274.000 & Rp1.500.000)	101.400	1.500.000	1.601.400
PT Bank Permata Tbk	-	1.500.000	1.500.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	1.000.000	1.000.000
Bank of China (Hong Kong) Limited	-	965.000	965.000
PT Bank UOB Indonesia	839.200	-	839.200
JPMorgan Chase Bank N.A (USD40.000.000)	-	646.480	646.480
PT Bank QNB Indonesia Tbk	549.703	-	549.703
PT Bank BNP Paribas Indonesia	500.000	-	500.000

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2024	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Total
PT Maybank Indonesia Tbk (JPY4.400.000.000)	-	450.395	450.395
PT Bank CTBC Indonesia (USD5.300.000 & Rp130.000)	215.659	-	215.659
	14.064.262	**31.112.209**	**45.176.471**
Dikurangi:			
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(1.500)	(57.662)	(59.162)
Sub-total pihak ketiga	**14.062.762**	**31.054.547**	**45.117.309**
Pihak berelasi			
PT Bank Central Asia Tbk	617.000	4.214.400	4.831.400
Dikurangi:			
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(500)	(4.064)	(4.564)
Sub-total pihak berelasi	**616.500**	**4.210.336**	**4.826.836**
Neto	**14.679.262**	**35.264.883**	**49.944.145**

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya pinjaman dan biaya komitmen yang diakui pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp65.570 juta.

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
PT Bank SMBC Indonesia Tbk *(sebelumnya PT Bank BTPN Tbk)*							
- Fasilitas tanggal 8 Desember 2021 (amandemen terakhir tanggal 22 Oktober 2024)	Protelindo, Iforte, STP, IBST, BIT, VTS dan IPI	Rp4.000.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp2.402.300 juta	Rp1.597.700 juta	12 bulan (Protelindo), 6 bulan (Iforte, STP, BIT, VTS dan IBST) dan 3 bulan (IPI) sejak tanggal penarikan terakhir	Maksimum 12 bulan (Protelindo), 6 bulan (Iforte, STP, BIT, VTS dan IBST) dan 3 bulan (IPI)	Protelindo memberikan jaminan perusahaan dan tanggung renteng antara Protelindo, Iforte, STP, BIT dan VTS
- Fasilitas tanggal 30 Maret 2022 (amandemen terakhir tanggal 12 Desember 2024)	Protelindo	USD100.000.000 (fasilitas pinjaman *loan on certificate*)	USD100.000.000	-	84 bulan tetapi tidak boleh melebihi tanggal 29 Juni 2029	6 bulan atau yang disepakati para pihak	STP dan Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 30 Mei 2023	STP	Rp900,000 juta (fasilitas *loan on certificate* berulang teramortisasi tanpa komitmen)	Rp900.000 juta	N/A	31 Desember 2026	1 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
MUFG Bank Limited							
- Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 (amandemen terakhir tanggal 23 Desember 2024)	Protelindo, Iforte, STP dan IBST	Rp2.500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang). Fasilitas dapat dicairkan	Rp2.500.000 juta	-	31 Desember 2025	1 atau 3 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
		dalam *multicurrency*					
- Fasilitas tanggal 14 Juli 2021 (amandemen terakhir tanggal 19 Januari 2023)	Protelindo	USD34.800.000 (fasilitas pinjaman berjangka)	USD34.800.000 Saldo Rp-	N/A	14 Juli 2025	1 atau 3 bulan	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 20 Juni 2024 (amendemen terakhir tanggal 23 Desember 2024)	Protelindo dan Iforte	USD130.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka)	USD130.000.000	-	36 bulan dari tanggal penggunaan pertama	3 bulan	Tanggung renteng
PT Bank HSBC Indonesia							
- Fasilitas tanggal 23 Oktober 2018 (amandemen terakhir tanggal 14 September 2023)	Protelindo, BIT, Iforte dan STP	Rp850.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp850.000 juta	-	Jatuh tempo berdasarkan konfirmasi dari bank	1, 3, 6 atau 12 bulan	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 2 Juni 2022	Protelindo	Tranche A: Rp1.300.000 juta Tranche B: Rp1.300.000 juta	Rp1.300.000 juta Saldo Rp- Rp1.300.000 juta Saldo Rp-	N/A N/A	Tranche A: 2 Juni 2025 Tranche B: 2 Juni 2028	1, 2, atau 3 bulan	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 1 April 2024	Protelindo	Rp1.600.000 juta (fasilitas pinjman berjangka)	Rp1.600.000 juta	-	54 bulan sejak 1 April 2024	1 atau 3 bulan	Tidak ada
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk							
- Fasilitas tanggal 25 Mei 2022	Protelindo dan STP	Rp3.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp3.000.000 juta Saldo Rp-	N/A	25 Mei 2025	1 atau 3 bulan	STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 28 Agustus 2023 (amendemen terakhir tanggal 27 Agustus 2024)	Protelindo dan Iforte	Tranche A: Rp1.000.000 juta (Protelindo) Tranche B: Rp500.000 juta (Iforte)	Rp1.500.000 juta	-	27 Agustus 2025	Disepakati para pihak	STP memberikan jaminan perusahaan dan tanggung renteng antara Protelindo dan Iforte
- Fasilitas tanggal 8 Maret 2024	Protelindo dan Iforte	Rp2.400.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp2.400.000 juta	-	7 Maret 2027	1 bulan	Protelindo memberikan jaminan perseroan dan tanggung renteng antara Protelindo dan Iforte
- Fasilitas tanggal 2 April 2024	Protelindo dan Iforte	Rp2.600.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp2.600.000 juta	-	Maksimal 3 tahun sejak 2 April 2024	1 bulan	STP memberikan jaminan perseroan dan tanggung renteng

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
							antara Protelindo dan Iforte
- Fasilitas tanggal 30 Mei 2024	Protelindo dan Iforte	Rp2.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp2.000.000 juta	-	Maksimal 3 tahun sejak 30 Mei 2024	1 bulan	STP memberikan jaminan perseroan dan tanggung renteng antara Protelindo dan Iforte
JPMorgan Chase Bank N.A							
- Fasilitas tanggal 20 April 2018 (amandemen terakhir tanggal 8 April 2025)	Protelindo, Iforte, KIN, STP, BIT dan IBST	Tidak melebihi Rp700.000 juta Maksimal Rp700.000 juta (pinjaman berulang, cerukan) yang dibagi atas: - Protelindo: Rp700.000 juta - Iforte: Rp700.000 juta - KIN: Rp50.000 juta - STP: Rp500.000 juta - BIT: Rp100.000 juta - IBST: Rp500.000 juta	-	Rp700.000 juta	14 April 2026	1 bulan	Tanggung renteng
		Maksimal Rp500.000 juta (bank garansi) yang dibagi atas: - Protelindo: Rp500.000 juta - Iforte: Rp200.000 juta	-	N/A			
- Fasilitas tanggal 29 Maret 2022 (amandemen terakhir tanggal 22 Juni 2022)	Protelindo	USD20.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka)	USD20.000.000	-	31 Maret 2028	1, 2, atau 3 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 29 Maret 2022 (amandemen terakhir tanggal 22 Juni 2022)	Protelindo	USD20.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka)	USD20.000.000	-	31 Maret 2028	1, 2, atau 3 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
PT Bank Central Asia Tbk							
- Fasilitas tanggal 21 Desember 2016 (amandemen terakhir tanggal 23 Desember 2024)	Protelindo untuk semua fasilitas Iforte: B, H, I, J, dan K KIN: B, H, I, J, dan K STP: B, H, I, J, dan K BIT: B, H, I, J, dan K QTR: B, I, J, dan K GIK: B, I, J, dan K IEN: B dan K VTS: B dan K IBST: B IPI: B IGPU: B	Fasilitas: A: Rp750.000 juta (pinjaman berulang) B: Rp1.500.000 juta *(money market)* C: Rp2.000.000 juta (kredit investasi) D: Rp2.000.000 juta (kredit investasi) E: Rp1.000.000 juta (kredit investasi) F: Rp1.000.000 juta (kredit investasi) G: Rp500.000 juta (*time loan)* H: Rp1.000.000 juta *(time loan)* I: Rp1.500.000 juta (kredit investasi) J: Rp1.000.000 juta (kredit investasi) K: Rp3.400.000 juta (kredit investasi)	Rp750.000 juta Rp617.000 juta Rp2.000.000 juta Rp2.000.000 juta Rp1.000.000 juta Rp1.000.000 juta Rp500.000 juta Rp1.000.000 juta Rp1.500.000 juta Rp1.000.000 juta Rp3.400.000 juta	N/A Rp883.000 juta N/A N/A N/A - N/A - - - -	A: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya B: 16 Desember 2025 C: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya D: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya E: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya F: 27 Oktober 2026 G: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya H:20 Desember 2026 I: 25 Agustus 2028 J: 28 Desember 2028 K: 60 bulan sejak tanggal berakhirnya periode ketersediaan atau ditariknya seluruh fasilitas K	1, 3, atau 6 bulan	Tanggung renteng
- Fasilitas tanggal 25 Januari 2023	VTS	Rp2.000 juta (fasilitas pinjaman dengan cicilan)	Rp2.000 juta Saldo Rp-	N/A	25 Januari 2026	1 bulan	Tanah dan bangunan
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited							
- Fasilitas tanggal 19 November 2014 (amandemen terakhir tanggal 18 November 2022)	Protelindo	USD50.000.000 (fasilitas pinjaman berulang)	-	USD50.000.000	18 November 2027	1, 3, atau 6 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
PT Bank Permata Tbk							

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
- Fasilitas tanggal 1 Desember 2022	Iforte dan BIT	Maksimal Rp1.500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka) yang dibagi atas: - Iforte: Rp1.500.000 juta - BIT: Rp800.000 juta	Rp1.500.000 juta	-	60 bulan setelah tanggal penggunaan awal	1, 3, atau 6 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 12 Desember 2023 (amendemen terakhir tanggal 23 Desember 2024)	Protelindo, Iforte, STP, BIT dan IPI	Maksimal Rp2.000.000 juta terdiri atas: Pinjaman Berulang 1 Rp1.000.000 juta Pinjaman Berulang 2 Rp1.000.000 dengan rincian maksimum penggunaan per fasilitas sebagai berikut: - Iforte, STP, BIT: Rp1.000.000 - Protelindo: Rp725.000 - IPI: Rp100.000	- -	Rp1.000.000 Rp1.000.000	17 Desember 2025 (Pinjaman Berulang 1) dan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 23 Desember 2024 (Pinjaman Berulang 2)	1, 3, atau 6 bulan atau jangka waktu lain yang disepakati	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 10 Oktober 2024	IBST	Maksimal Rp600.000 juta (fasilitas berulang)	-	Rp600.000	10 Oktober 2025	1, 2 minggu atau 1, 2 bulan atau jangka waktu lain yang disepakati	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
Bank of China (Hong Kong) Limited							
- Fasilitas tanggal 8 November 2019	Protelindo	Fasilitas A: Rp875.000 juta (Fasilitas pinjaman berjangka) Fasilitas B: USD60.000.000 (fasilitas pinjaman berulang)	Rp875.000 juta USD60.000.000 Saldo Rp-	- N/A	A: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya B: telah berakhir	1, 2, atau 3 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 21 Januari 2022 (amendemen terakhir tanggal 7 November 2024)	Protelindo	Rp965.000 juta (Fasilitas pinjaman berjangka)	Rp965.000 juta	-	21 Januari 2026 dan dapat diperpanjang menjadi 5 tahun	1, 2, atau 3 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 28 Februari 2022	Protelindo	USD60.000.000 (Fasilitas pinjaman bergulir)	-	USD60.000.000	Ketika terdapat permintaan pelunasan oleh Kreditur	yang disepakati para pihak dan tidak	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
						melebihi 6 bulan	
PT Bank Mizuho Indonesia							
- Fasilitas tanggal 30 Desember 2020 (amandemen terakhir 20 Desember 2024)	Protelindo, Iforte, STP, IEN, BIT dan IBST	Fasilitas pinjaman berulang yang tidak melebihi Rp1.500.000 juta: - Maksimal Rp1.500.000 juta (Protelindo, Iforte, STP dan IBST) - Maksimal Rp200.000 juta (IEN) - Maksimal Rp250.000 juta (BIT)	Rp1.500.000 juta	-	11 Juli 2025	Jangka waktu yang disetujui oleh kedua pihak dan tidak lebih dari 6 bulan	Protelindo dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 29 Agustus 2022 (amandemen terakhir tanggal 17 Maret 2023)	Protelindo	Rp1.500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.500.000 juta Saldo Rp800.000 juta	-	29 Agustus 2027	1, 3, atau 6 bulan	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 30 Mei 2023	STP	Rp400.000 juta	Rp400.000 juta Saldo Rp-	N/A	30 Mei 2025	Jangka waktu yang disetujui oleh kedua pihak dan tidak lebih dari 12 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 7 Agustus 2024	Protelindo dan Iforte	JPY14.000.000	JPY14.000.000	-	7 Agustus 2029	3 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan dan tanggung renteng antara Protelindo dan Iforte
PT Bank UOB Indonesia							
- Fasilitas tanggal 23 Februari 2021 (amandemen terakhir tanggal 23 Januari 2024)	Protelindo, Iforte dan KIN	Rp1.300.000 juta (fasilitas bergulir pinjaman modal kerja)	Rp839.200 juta	Rp460.800 juta	28 Agustus 2026	1, 3, atau 6 bulan	Tanggung renteng
PT Bank Maybank Indonesia Tbk							
- Fasilitas tanggal 11 Oktober 2022 (amandemen terakhir tanggal 31 Oktober 2024)	Protelindo dan Iforte	Fasilitas A: Rp500.000 juta (fasilitas bergulir) termasuk Rp100.000 juta (fasilitas pinjaman koran) tersedia untuk	-	Rp500.000 juta	10 Oktober 2025	1 atau 3 bulan	Tanggung renteng

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
		Protelindo dan Iforte					
		Fasilitas B: Rp500.000 juta (fasilitas berjangka) tersedia hanya untuk Protelindo	Rp500.000 juta Saldo Rp450.000 juta	-	3 tahun sejak penarikan	1 atau 3 bulan	Tidak ada
PT Bank Danamon Indonesia Tbk							
- Fasilitas tanggal 28 Juni 2021 (amendemen terakhir tanggal 12 Desember 2024)	Protelindo dan Iforte	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp101.400 juta	Rp898.600 juta	12 November 2025	Periode yang disepakati para pihak	Tanggung renteng
- Fasilitas tanggal 21 Desember 2021 (amendemen terakhir tanggal 31 Januari 2023)	Protelindo	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp500.000 juta	-	21 Desember 2026	Periode yang disepakati para pihak	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 21 Maret 2022	Protelindo dan Iforte	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.000.000 juta	-	21 Maret 2027	Periode yang disepakati para pihak	Tanggung renteng
PT Bank CIMB Niaga Tbk							
- Fasilitas tanggal 20 Agustus 2021 (amendemen terakhir tanggal 8 Agustus 2023)	Protelindo dan Iforte	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.000.000 juta	-	48 bulan sejak penarikan pertama	1 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 8 Desember 2021 (amendemen terakhir tanggal 8 Agustus 2023)	Protelindo	Rp1.500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.500.000 juta	-	60 bulan sejak penarikan pertama	1 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 14 Februari 2023 (amendemen terakhir tanggal 2 November 2023)	Iforte	Rp800.000 juta (fasilitas pinjaman bergulir) termasuk Rp50.000 juta (fasilitas pinjaman koran)	Rp800.000 juta Saldo Rp-	N/A	14 Februari 2025	Periode yang disepakati para pihak, OD: setiap akhir bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 29 Mei 2023 (amendemen terakhir tanggal 22 Februari 2024)	STP	Rp441.667 (fasilitas pinjaman jangka panjang) Rp475.000 (fasilitas pinjaman bergulir)	Rp441.667 juta Saldo Rp- Rp475.000 juta Saldo Rp-	N/A N/A	5 Juni 2027	1 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 9 Desember 2024	Protelindo, ISI, STP dan IBST	Rp2.000.000 juta	Rp1.106.000 juta	Rp894.000 juta	31 Oktober 2025	Periode yang disepakati para pihak	Tanggung renteng

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
- Fasilitas tanggal 1 Desember 2021	STP	Rp5.250.000 (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp5.250.000 juta Saldo Rp-	N/A	1 Desember 2026	1 atau 3 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
PT QNB Indonesia Tbk							
- Fasilitas tanggal 26 Maret 2024 (amandemen terakhir tanggal 24 Maret 2025)	Protelindo, Iforte, STP, BIT dan IEN	Fasilitas pinjaman berulang yang tidak melebihi Rp500.000 juta: - Maksimal Rp500.000 juta (Protelindo, Iforte dan STP) - Maksimal Rp100.000 juta (BIT dan IEN)	Rp500.000 juta	-	26 Maret 2026	1 (satu) minggu, 1 (satu) atau 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan	Tanggung renteng
- Fasilitas tanggal 20 Agustus 2024	IKS	Rp35.000 juta (fasilitas pembiayaan utang usaha) Rp15.000 juta (fasilitas pinjaman bergulir)	Rp49.703 juta	Rp297 juta	12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatangan an perjanjian fasilitas	1 bulan	Tidak ada
PT Bank Negara Indonesia Tbk							
- Fasilitas tanggal 16 September 2021 (amendemen terakhir tanggal 2 Agustus 2024)	Protelindo	Rp3.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp3.000.000 juta	-	60 bulan dari penandatangan an perubahan perjanjian kredit	3 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 9 Juni 2022 (amendemen terakhir tanggal 2 Agustus 2024)	Protelindo	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.000.000 juta	-	9 Juni 2027	3 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 13 Mei 2022 (amendemen terakhir tanggal 2 Agustus 2024)	Iforte	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.000.000 juta	-	12 Mei 2027	1 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 13 Juni 2023 (amendemen terakhir tanggal 2 Agustus 2024)	Protelindo, Iforte dan STP	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.000.000 juta	-	60 bulan setelah 13 Juni 2023	1 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan dan tanggung renteng antara Protelindo, Iforte dan STP
- Fasilitas tanggal 13 Juni 2023 (amendemen terakhir tanggal 2 Agustus 2024)	Protelindo, Iforte dan STP	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman bergulir)	Rp1.000.000 juta	-	24 bulan setelah 1 bulan 13 Juni 2023	1 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan dan tanggung renteng antara

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jangka waktu fasilitas	Periode pembayaran bunga	Jaminan
							Protelindo, Iforte dan STP
- Fasilitas tanggal 29 Juli 2024 (amendemen terakhir tanggal 20 November 2024)	Protelindo dan Iforte	Rp3.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp3.000.000 juta	-	28 Juli 2029	1 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
Citibank, N.A.							
- Fasilitas tanggal 8 Agustus 2022	Protelindo, Iforte, STP, BIT dan KIN	Rp650.000 juta (fasilitas pinjaman berulang) Maksimal Rp200.000 juta untuk KIN	-	Rp 650.000 juta	Jatuh tempo berdasarkan konfirmasi dari bank	1, 3, 6 bulan	Protelindo memberikan jaminan perusahaan
PT Bank CTBC Indonesia							
- Fasilitas tanggal 20 November 2023 (amendemen terakhir tanggal 22 November 2024)	Protelindo dan Iforte	Rp240.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp215.659 juta	Rp24.341 juta	Jatuh tempo 12 bulan sejak tanggal penandatangan an perjanjian fasilitas	1 bulan	Tanggung renteng
PT Bank Syariah Indonesia Tbk							
- Fasilitas tanggal 23 Desember 2021 (amendemen terakhir tanggal 13 Maret 2023)	IBST	Rp1.035.000 juta	Rp1.035.000 juta Saldo Rp-	N/A	85 (delapan puluh lima) bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian fasilitas	-	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 23 Desember 2021 (amendemen terakhir tanggal 13 Maret 2023)	IBST	Rp265.000 juta	- Saldo Rp-	N/A	85 (delapan puluh lima) bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian fasilitas	-	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 25 November 2024	Protelindo, ISI, STP dan IBST	Rp1.000.000 juta	Rp1.000.000 juta	-	66 (enam puluh enam) bulan sejak 25 November 2024	3 bulan	Tanggung renteng
PT Bank BNP Paribas Indonesia							
- Fasilitas tanggal 21 November 2024	Protelindo	Rp500.000 juta	Rp500.000 juta	-	12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 November 2024	Maksimum 3 bulan	Tidak ada

Seluruh pinjaman yang diperoleh untuk modal kerja, belanja modal, pengembangan bisnis dan tujuan umum untuk Grup.

Pada tahun 2024, tingkat suku bunga berkisar antara 5,55% sampai dengan 9,00% per tahun atas pinjaman mata uang Rupiah, berkisar antara 5,65% sampai dengan 6,45% per tahun atas pinjaman mata uang Dolar AS, berkisar antara 5,30% sampai dengan 5,70% per tahun atas pinjaman mata uang JPY.

Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah marjin dan tolok ukur lain yang disepakati.

Grup diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Protelindo memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp100.000 juta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi tertanggal 6 Desember 2017 dan sebagaimana diubah dengan Addendum VI tertanggal 5 Juni 2024. Fasilitas bank garansi tersebut merupakan fasilitas *global line* yang dapat digunakan oleh Iforte, KIN, IGI, DNT, GTP, QTR, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP, REJA dan BIT. Fasilitas bank garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 bulan sampai dengan tanggal 5 Juni 2025. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk jaminan pembayaran, jaminan pembayaran atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Protelindo dan/atau Iforte, KIN, IGI, DNT, GTP, QTR, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP, REJA dan BIT.

Iforte memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp100.000 juta berdasarkan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tertanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank tertanggal 2 Agustus 2023. Fasilitas bank garansi tersebut dapat digunakan oleh Konsortium Iforte HTS, QTR, IGI dan BIT. Fasilitas bank garansi ini berlaku sampai dengan 8 Agustus 2025.

Protelindo, BIT, Iforte dan STP memperoleh fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia berupa *Trade Working Capital – Buyer Loan* sebesar Rp850.000 juta berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi pada tanggal 14 September 2023.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Protelindo dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian *Treasury Line* sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian *Treasury Line* tertanggal 28 Agustus 2023 dengan limit fasilitas sejumlah USD33.000.000 (“Fasilitas TL Mandiri 2”). Tujuan Perjanjian TL Mandiri 2 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai. Fasilitas TL Mandiri 2 ini berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2024.

Protelindo memperoleh fasilitas bank garansi dari JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta sebesar Rp500.000 juta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas tertanggal 20 April 2018 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Perubahan Kesepuluh tertanggal 1 April 2024. Fasilitas bank garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 bulan sampai dengan tanggal 14 April 2025. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Protelindo.

Pada tanggal 8 Agustus 2023, Protelindo dan Iforte telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tertanggal 12 Desember 2024 (“Fasilitas TL Danamon”). Fasilitas TL Danamon ini berlaku sampai dengan 12 November 2025.

Pada tanggal 14 September 2023, Protelindo telah menandatangani Perjanjian Induk untuk Transaksi Valuta Asing dengan Citibank, N.A., Jakarta Branch.

Pada tanggal 20 November 2023, Protelindo dan Iforte telah menandatangani Persyaratan Umum Kontrak Valuta Asing dengan PT Bank CTBC Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Persyaratan Umum Kontrak Valuta Asing tanggal 22 November 2024 dimana fasilitas ini akan berlaku sampai dengan 30 November 2025.

Pada tanggal 9 Agustus 2023, Protelindo telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* tertanggal 2 Agustus 2024.

Pembatasan Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Rasio Keuangan di perjanjian kredit atau liabilitas lainnya	Pembatasan Rasio	31 Desember	
		2024	2023
Utang bank			
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Max 5,00x	2,88x	2,84x
Net debt to running EBITDA	Min 1,30x	4,59x	4,31x
Obligasi			
Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Protelindo, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Protelindo kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Protelindo	Max 20%	0,00%	0,00%
Total pinjaman bersih dengan *running EBITDA*	Max 5,00x*	4,59x	4,31x
Running EBITDA dengan beban bunga	Min 1,50x	3,25x	3,99x

** kecuali dalam hal tertentu, Protelindo diperbolehkan memiliki rasio pinjaman sampai dengan 7,0x*

5. Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp274.913 juta untuk bagian jangka pendek dan Rp1.198.304 juta untuk bagian jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Mata Uang	31 Desember 2024	
		Mata Uang Asal	Setara Rupiah
Bagian jangka pendek:			
Obligasi 2024	Rupiah	143.005	143.005
Obligasi 2022	Rupiah	69.000	69.000
Obligasi 2020	Rupiah	67.000	67.000
Dikurangi:			
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(4.092)
Neto			**274.913**
Bagian jangka panjang:			
Obligasi 2024	Rupiah	14.005	14.005
Obligasi 2023	Rupiah	441.350	441.350
Obligasi 2021	Rupiah	744.000	744.000
Dikurangi:			
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(1.051)
Neto			**1.198.304**

Utang obligasi	Tanggal emisi	Tanggal jatuh tempo	Pokok obligasi	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun	Wali amanat	Perusahaan pemeringkat	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020								

Utang obligasi	Tanggal emisi	Tanggal jatuh tempo	Pokok obligasi	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun	Wali amanat	Perusahaan pemeringkat	Peringkat
Obligasi 2020 Seri B	3 September 2020	3 September 2025	Rp67.000 juta	Kuartalan	7,70%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021								
Obligasi 2021 Seri C	17 Desember 2021	17 Desember 2026	Rp744.000 juta	Kuartalan	6,10%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022								
Obligasi 2022 Seri B	9 Agustus 2022	9 Agustus 2025	Rp69.000 juta	Kuartalan	6,00%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023								
Obligasi 2023 (I) Seri B	24 Maret 2023	24 Maret 2026	Rp145.350 juta	Kuartalan	6,60%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III Tahun 2023								
Obligasi 2023 (II) Seri B	8 Juni 2023	8 Juni 2026	Rp296.000 juta	Kuartalan	6,50%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA
Obligasi Berkelanjutan IV Protelindo Tahap I Tahun 2024								
Obligasi 2024 (I) Seri A	9 Juli 2024	19 Juli 2025	Rp143.005 juta	Kuartalan	6,50%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA
Obligasi 2024 (I) Seri B	9 Juli 2024	9 Juli 2027	Rp14.005 juta	Kuartalan	6,75%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA

Perjanjian perwaliamanatan untuk obligasi 2016 sampai dengan 2024 mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Protelindo, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Protelindo, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Protelindo kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Protelindo;
b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan EBITDA berjalan ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Protelindo diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
c. Memelihara perbandingan antara EBITDA berjalan dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Protelindo telah memenuhi ketentuan tersebut.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya telah dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Protelindo.

Protelindo dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi 2020 dan 2022 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2020 dan 2022 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Pada tanggal 31 Maret 2024, Protelindo telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2023 (I) Seri A.

Pada tanggal 18 Juni 2024, Protelindo telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2023 (II) Seri A.

Pada tanggal 17 Desember 2024, Protelindo telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2021 Seri B.

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* ("SGX-LT") pada tanggal 28 November 2014.

Pada tanggal 22 Juli 2016 diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Obligasi Senior yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Protelindo. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, selanjutnya Protelindo menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Obligasi Senior terhadap para pemegang Obligasi Senior (*bondholders*).

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 3,27%.

Pada tanggal 27 November 2024, Protelindo telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024.

6. Provisi Jangka Panjang

Saldo provisi jangka panjang Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp353.980 juta, adapun rincian provisi jangka panjang Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	1 Januari 2024	Akuisisi entitas anak	Provisi tambahan	Jumlah yang terjadi dan dibebankan	Pertambahan bunga	31 Desember 2024
Estimasi biaya pembongkaran menara	314.014	5.431	12.616	(3.987)	25.906	353.980

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari tingkat diskonto sebesar 8,06% dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan adalah 32,59 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika menara terkait dibongkar.

7. Utang pajak

Saldo utang pajak Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp120.460 juta, adapun rincian utang pajak Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Perseroan	
Pajak penghasilan	
Pasal 23/26	23
Sub-total	**23**
Entitas anak	
Pajak pertambahan nilai	74.060
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	15.855
Pasal 21	410

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Pasal 23/26	2.388
Pasal 29 – 2023	4.240
Pasal 29 – 2024	23.484
Sub-total	**120.437**
Total	**120.460**

8. Pendapatan ditangguhkan

Saldo pendapatan ditangguhkan Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.223.420 juta, adapun rincian pendapatan ditangguhkan Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
PT XL Axiata Tbk	1.017.020
PT Telekomunikasi Selular	658.847
PT Indosat Tbk	498.960
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	25.613
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	6.824
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 3.000)	16.156
Total	**2.223.420**
Bagian jangka pendek	**(2.190.180)**
Bagian jangka Panjang	**33.240**

9. Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp332.857 juta, terdiri dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek neto sebesar Rp213.453 juta, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang neto sebesar Rp 119.404 juta, dengan rincian asumsi perhitungan liabilitas imbalan kerja Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Tingkat diskonto	6% - 7,12%
Tingkat kenaikan gaji	5,6% - 6%
Usia pensiun	57 tahun
Tingkat kematian	TMI 2019
Metode	*Projected unit credit*

Pada tanggal 1 Desember 2017, Perseroan dan Protelindo mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial. Pada tanggal 15 Desember 2020, Iforte mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial.

Perseroan, Protelindo dan Iforte mengikuti program ini guna memenuhi ketentuan pemerintah terkait program dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan memenuhi kewajiban yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Grup pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan perhitungan aktuaris independen KKA Steven & Mourits dalam laporannya pada tanggal 22 Januari 2025.

Tabel berikut menggambarkan rincian saldo liabilitas imbalan kerja Grup:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Aset neto imbalan kerja	
Perseroan	74
Liabilitas imbalan kerja	
Entitas anak	119.404

10. Liabilitas pajak tangguhan, neto

Saldo liabilitas pajak tangguhan, neto Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp724.311 juta, adapun rincian liabilitas pajak tangguhan, neto Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Entitas anak	
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	841.962
Akuisisi entitas anak	31.722
Manfaat pajak tangguhan	(59.577)
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	(2.057)
Pembalikan pajak tangguhan	(87.739)
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan, neto – konsolidasian	**724.311**

11. Utang derivatif

Saldo utang derivatif Grup per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp167.736 juta, adapun rincian utang derivatif Grup sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember 2024
Swap valuta asing dan *non-deliverable call option* dan kontrak swap tingkat bunga	
PT Bank Mizuho Indonesia	70.217
PT Maybank Indonesia Tbk	55.711
MUFG Bank Limited	41.808
Total	**167.736**

GRUP TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, GRUP TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN GRUP SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS GRUP PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, GRUP TELAH MELUNASI LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN GRUP YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN GRUP MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Grup Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01791/2.1032/AU.1/10/0702-3/1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai: (a) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (b) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi ”hal audit utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai goodwill dan akuntansi kombinasi bisnis merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	940.183	428.677
Bank yang dibatasi penggunaannya	535	122
Piutang usaha		
Pihak ketiga	3.277.053	3.074.300
Pihak berelasi	15.740	12.034
Investasi neto dalam sewa - jangka pendek	168.639	-
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	102.305	58.757
Pihak berelasi	965	202
Persediaan	15.943	14.572
Beban dibayar dimuka - jangka pendek	171.533	229.269
Pajak dibayar dimuka	192.918	479.259
Uang muka	30.986	41.242
Investasi instrumen keuangan - jangka pendek	36.599	35.568
Piutang derivatif - jangka pendek	2.441	52.881
TOTAL ASET LANCAR	**4.955.840**	**4.426.883**
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi neto dalam sewa - jangka panjang	685.858	-
Aset tetap	47.477.953	40.385.074
Goodwill	15.833.997	15.508.533
Beban dibayar dimuka - jangka panjang	175.244	183.620
Aset takberwujud	863.813	990.800
Aset hak-guna	5.567.137	5.121.186
Investasi	571.632	494.088
Piutang derivatif - jangka panjang	273.499	157.051
Aset pajak tangguhan, neto	7.216	6.645
Aset imbalan kerja - jangka panjang, neto	74	673
Aset tidak lancar lainnya	1.416.117	1.144.393
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**72.872.540**	**63.992.063**

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
TOTAL ASET	**77.828.380**	**68.418.946**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya		
Pihak ketiga	929.781	1.100.739
Pihak berelasi	78.433	106.204
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	40.137	103.535
Pihak berelasi	71	34.624
Akrual	1.365.395	1.463.019
Utang bagian jangka pendek atas:		
Utang sewa	245.695	265.310
Utang bank		
Pihak ketiga	14.062.762	10.875.657
Pihak berelasi	616.500	196.500
Utang obligasi	274.913	7.252.204
Utang pajak	120.460	193.123
Pendapatan ditangguhkan	2.190.180	2.457.037
Pinjaman pihak berelasi	-	54.500
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	213.453	174.579
Utang derivatif - jangka pendek	-	21.922
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**20.137.780**	**24.298.953**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang sewa	673.078	180.108
Utang bank		
Pihak ketiga	31.054.547	18.455.327
Pihak berelasi	4.210.336	6.370.483
Utang obligasi	1.198.304	1.317.513
Provisi jangka panjang	353.980	314.014
Liabilitas pajak tangguhan, neto	724.311	841.962
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	119.404	76.518
Pendapatan ditangguhkan	33.240	30.372
Utang derivatif - jangka panjang	167.736	22.032
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**38.534.936**	**27.608.329**
TOTAL LIABILITAS	**58.672.716**	**51.907.282**
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal dasar		
Nilai nominal - Rp10 (angka penuh) per saham		
Modal dasar - 200.000.000.000 saham (2023: 100.000.000.000 saham)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 51.014.625.000 saham	510.146	510.146
Tambahan modal disetor	7.836	17.623
Cadangan kompensasi berbasis saham	103.683	92.296
Saham treasuri	(738.670)	(931.339)
Penghasilan komprehensif lain	79.188	78.846
Saldo laba:		
Cadangan umum	1.300	1.200
Belum ditentukan penggunaannya	19.121.594	16.687.620
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	19.085.077	16.456.392
Kepentingan nonpengendali	70.587	55.272

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
TOTAL EKUITAS	**19.155.664**	**16.511.664**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**77.828.380**	**68.418.946**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	12.735.815	11.740.345
Depresiasi dan amortisasi	(3.097.727)	(2.843.268)
Beban pokok pendapatan lainnya	(898.595)	(684.486)
Beban pokok pendapatan	**(3.996.322)**	**(3.527.754)**
Laba bruto	**8.739.493**	**8.212.591**
Beban penjualan dan pemasaran	(312.845)	(238.120)
Beban umum dan administrasi	(824.232)	(838.176)
Beban usaha lainnya, neto	(336.495)	(194.993)
Laba usaha	**7.265.921**	**6.941.302**
Penghasilan keuangan, bruto	84.309	25.649
Pajak final atas penghasilan keuangan	(16.862)	(5.130)
Penghasilan keuangan, neto	67.447	20.519
Biaya keuangan, neto	(3.137.673)	(2.858.027)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**4.195.695**	**4.103.794**
Beban pajak final	(659.012)	(557.918)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	**3.536.683**	**3.545.876**
Beban pajak penghasilan	(172.077)	(242.234)
Laba tahun berjalan	**3.364.606**	**3.303.642**
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Kerugian aktuarial, setelah pajak	4.872	6.347
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Kerugian neto dari lindung nilai arus kas	(4.810)	(31.157)
Bagian saham dari investasi	27	-
Kerugian dari investasi obligasi	-	2.219
Total penghasilan (rugi) komprehensif lain	**89**	**(22.591)**
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**3.364.695**	**3.281.051**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	3.335.437	3.253.097
Kepentingan nonpengendali	29.169	50.545
	3.364.606	**3.303.642**
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	3.335.779	3.231.457
Kepentingan nonpengendali	28.916	49.594
	3.364.695	**3.281.051**
Laba per saham (angka penuh)		
Dasar	67	65
Dilusian	67	65

LAPORAN DATA ARUS KAS

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	15.816.728	12.987.836
Pembayaran kas kepada pemasok	(3.850.788)	(1.594.808)
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.117.748)	(938.838)
Kas yang dihasilkan dari operasi	10.848.192	10.454.190
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(1.719.187)	(1.695.885)
Pengembalian pajak	34.250	131.222
Penghasilan bunga yang diterima	61.096	16.348
Pencairan (penempatan) dari bank yang dibatasi penggunaannya	115.716	(107)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**9.340.067**	**8.905.768**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil pelepasan aset tetap	20.407	18.580
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	5.310	-
Pembayaran untuk pembelian aset tetap dan uang muka untuk pemasok	(4.519.034)	(4.563.727)
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurangi kas dan bank yang diperoleh	(3.457.027)	(42.701)
Penempatan pada investasi ventura bersama	(43.648)	(249.031)
Penempatan pada investasi asosiasi	(9.946)	(194.125)
Pengembalian (penempatan) investasi jangka panjang	(1.586)	493.632
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(8.005.524)**	**(4.537.372)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari utang bank	84.090.394	42.250.068
Pembayaran utang bank	(72.256.028)	(43.649.866)
Pembayaran bunga utang	(2.646.056)	(2.283.563)
Pembayaran biaya pinjaman	(11.598)	(50.816)
Pembayaran dividen		
Pemilik entitas induk	(901.363)	(1.201.303)
Kepentingan nonpengendali	(42.002)	(28.500)
Penerimaan dari penerbitan obligasi	157.010	4.000.000
Pembayaran utang obligasi	(7.271.893)	(1.215.049)
Pembayaran bunga obligasi	(335.498)	(356.860)
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(5.563)	(11.682)
Pembayaran utang sewa	(1.650.645)	(1.674.830)
Pembayaran dari pinjaman pihak berelasi	(56.500)	(9.723)
Penyelesaian transaksi derivatif	151.702	-
Penerimaan dari pinjaman pihak berelasi	2.000	-
Penerimaan dari utang lain-lain	13.545	-
Penerimaan dari kontribusi modal	686	-
Pembayaran premi *call spread*	(114.199)	(14.899)
Penerimaan dari MESOP	92.971	102
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(783.037)**	**(4.246.921)**
Kenaikan neto Kas dan Setara Kas	**551.506**	**121.475**
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(40.000)	(1.434)
Kas dan setara kas awal tahun	428.677	308.636
Kas dan setara kas akhir tahun	**940.183**	**428.677**

RASIO- RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio keuangan *(%)*		
Laba tahun berjalan terhadap total aset *(ROA)*	4,32	4,83
Laba tahun berjalan terhadap total ekuitas *(ROE)*	17,56	20,01
EBITDA[1)] terhadap pendapatan *(EBITDA margin)*	84,02	85,00
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan *(net margin)*	26,42	28,14
Rasio keuangan *(x)*		
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	0,25	0,18
Total liabilitas terhadap total aset	0,75	0,76
Total liabilitas terhadap total ekuitas	3,06	3,14
Total utang bank[2)] terhadap total ekuitas	2,61	2,17
Interest Coverage Ratio[3)] (ICR)	4,06	4,62
Debt Service Coverage Ratio[4)] (DSCR)	2,88	2,84

1) EBITDA dihitung dari laba usaha ditambahkan dengan depresiasi dan amortisasi serta beban usaha lainnya, neto
2) Total utang bank dihitung dari utang bank jangka pendek ditambah dengan utang bank jangka panjang
3) ICR (Interest Coverage Ratio) dihitung dari EBITDA dibagi dengan biaya bunga bank
4) DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dihitung dengan membagi arus kas bebas (arus kas bebas dihitung dari EBITDA ditambah dengan modal kerja dikurang dengan pembayaran pajak) dengan pembayaran utang. Perhitungan ini sesuai dengan formula perhitungan covenant dari perjanjian fasilitas pinjaman dengan bank

Pembatasan Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Rasio Keuangan di perjanjian kredit atau liabilitas lainnya	Pembatasan Rasio	31 Desember	
		2024	2023
Utang bank			
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Max 5,00x	2,88x	2,84x
Net debt to running EBITDA	Min 1,30x	4,59x	4,31x
Obligasi			
Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Protelindo, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Protelindo kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Protelindo	Max 20%	0,00%	0,00%
Total pinjaman bersih dengan *running EBITDA*	Max 5,00x*	4,59x	4,31x
Running EBITDA dengan beban bunga	Min 1,50x	3,25x	3,99x

** kecuali dalam hal tertentu, Protelindo diperbolehkan memiliki rasio pinjaman sampai dengan 7,0x*

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan Keuangan Konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01791/2.1032/AU.1/10/0702-3/1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai: (a) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (b) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi ”hal audit utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* dan akuntansi kombinasi bisnis merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

A. UMUM

Grup adalah pemilik dan operator independen dari infrastuktur telekomunikasi yang mencakup menara telekomunikasi, kabel optik dan VSAT di Indonesia. Pada 31 Desember 2024, Grup memiliki dan mengoperasikan 35.400 Menara Telekomunikasi yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 58.035 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Grup memiliki sekitar 217.507 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi yang terletak di Jawa dan Sumatra, dan 163.347 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di seluruh Indonesia serta jaringan backbone kabel serat optik yang menghubungkan Jawa, Bali, Batam dan Singapura dan juga memiliki lebih dari 16.898 aktivasi connectivity dan juga memiliki 169.242 *fiber to the home* (*home connect).*

Kegiatan usaha utama Grup adalah bergerak dalam bidang penyewaan infrastruktur telekomunikasi. Dalam segmen penyewaan Menara Telekomunikasi, Grup menjalankan kegiatan usahanya Grup menyewakan ruang pada Menara Telekomunikasi milik Grup kepada para operator telekomunikasi berdasarkan kontrak jangka panjang. Ruang yang disewakan ini mencakup ruang vertikal pada menara dimana operator telekomunikasi dapat memasang antena frekuensi radio (*Radio Frequency*) dan antena gelombang pendek (*microwave*), serta menyewa lahan tanah pada setiap lokasi untuk pendirian shelters yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik.

Pada segmen penyewaan jaringan -kabel optik, Grup menyediakan infrastruktur telekomunikasi kabel optik untuk disewa pengguna dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi mereka. Kabel optik yang dimiliki Grup dapat disewakan dalam kontrak *Build to Suit Fiber* (BTS) untuk FTTT (*Fiber to The Tower*), FTTH (*Fiber To The Home*) serta solusi Connectivity yang biasanya dilakukan tanpa BTS untuk klien-klien korporasi, UMKM, data center dan lain lain.

Saat ini, portofolio Menara Telekomunikasi dan kabel optik yang dimiliki Grup merupakan portofolio yang terbesar yang dimiliki oleh penyedia infrastruktur telekomunikasi independen di Indonesia, dengan umur rata-rata sekitar 8,9 tahun dan lebih muda lagi untuk aset kabel optik dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan lokasi yang luas ini memungkinkan Grup untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi. Ditambah lagi kemampuan Grup melalui Entitas Anak untuk menyediakan jaringan kabel serat optik untuk fiberisasi menara, memberi Grup peluang usaha baru dari sumber yang berbeda-beda.

Jumlah portofolio Menara Telekomunikasi dan pelanggan Grup juga memiliki potensi pertumbuhan melalui penambahan kontrak sewa atas menara yang sudah ada (kolokasi) maupun atas menara yang baru. Per 31 Desember 2024, rasio sewa/tenancy ratio Menara Telekomunikasi Grup mencapai 1,64x.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Grup akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Grup:

Faktor permintaan atas infrastruktur telekomunikasi atau ruang pada menara dan harga sewa
Permintaan atas ruang pada menara Grup disebabkan sejumlah faktor termasuk pertumbuhan industri infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, strategi operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan jasa telekomunikasi dan keputusan operator telekomunikasi untuk mengoperasikan menara mereka sendiri atau mengalihdayakan kepada penyedia menara independen lainnya. Sementara itu, pertumbuhan industri infrastruktur telekomunikasi tergantung dari kondisi umum makro ekonomi Indonesia, pola konsumsi serta daya beli masyarakat.

Lebih jauh, pengenalan teknologi telepon genggam yang progresif dan maju seperti 4G dan 5G diperkirakan akan menyebabkan permintaan atas menara-menara baru, karena jarak maksimum transmisi untuk 4G dan 5G cenderung lebih pendek dibandingkan jarak pada teknologi yang ada saat ini, dan karena itu menyebabkan operator telekomunikasi harus memasang peralatan transmisi tambahan untuk mengkompensasi kisaran yang relatif lebih rendah dari 4G dan 5G.

Operator telekomunikasi menggunakan strategi asset-light untuk menanggapi permintaan yang meningkat dengan cara (i) melepas portofolio aset infrastruktur telekomunikasi mereka kepada perusahaan independent, (ii) mengalihdayakan pembangunan aset infrastruktur telekomunikasi kepada perusahaan independen melalui rancangan build-to-suit dan (iii) menyewa ruang atau kapasitas pada aset infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia infrastruktur telekomunikasi independen sebagai pengguna bersama menara *(kolokasi atau infrastructure sharing)*.

Strategi ini memungkinkan operator telekomunikasi untuk menurunkan belanja modal dan memperluas jaringan dan kapasitas jaringan mereka dengan lebih cepat dibandingkan apabila mereka diharuskan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan aset infrastruktur telekomunikasi mereka sendiri. Hal ini juga memungkinkan operator telekomunikasi untuk memonetisasi portofolio aset infrastruktur telekomunikasi mereka terutama pada saat aset infrastruktur telekomunikasi mendekati akhir periode depresiasi. Perubahan dan adopsi teknologi telekomunikasi yang baru juga dapat mempengaruhi permintaan atas ruang atau kapasitaspada aset infrastruktur telekomunikasi karena operator telekomunikasi menggunakan teknologi baru yang mungkin membutuhkan penggunaan ruang atau kapasitas yang lebih intensif pada aset infrastruktur telekomunikasi.

Seiring meningkatnya persaingan di industri telekomunikasi selama beberapa tahun terakhir yang berdampak pada penurunan harga sewa maka manajemen menyiasati penurunan harga dengan syarat penyewaan sewa aset infrastruktur telekomunikasi dalam jumlah tertentu agar tidak berdampak signifikan terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Grup.

Faktor ukuran portofolio Menara Telekomunikasi dan jumlah pengguna bersama menara (kolokasi)
Jumlah Menara Telekomunikasi pada portofolio Perseroan membawa pengaruh signifikan pada pendapatan dan hasil usaha Grup. Untuk mengelola biaya terkait dengan penambahan Menara Telekomunikasi, Grup hanya mengakuisisi atau membangun Menara Telekomunikasi dan/atau infrastruktur pendukungnya sesudah Grup memiliki jaminan sewa jangka panjang dari penyewa utama Menara Telekomunikasi tersebut.

Faktor signifikan lain yang mempengaruhi pendapatan Grup adalah jumlah pengguna bersama (kolokasi). Ukuran dari portofolio Menara Telekomunikasi Grup memberikan kesempatan bagi pelanggan Grup untuk menyewa ruang pada menara Grup dan memenuhi kebutuhan rancangan disain dan perluasan jaringan mereka. Adanya kolokasi memberi keuntungan karena peningkatan belanja modal untuk mengakomodasi penambahan penyewa kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan biaya membangun atau mengakuisisi Menara Telekomunikasi baru.

Grup biasanya membangun Menara Telekomunikasi untuk mengakomodasi beberapa calon penyewa. Karena itu jumlah kolokasi dan kemampuan Grup untuk meningkatkan jumlah kolokasi merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan, laba operasi, marjin keuntungan dan imbal hasil investasi Perseroan. Keberhasilan Grup dalam menarik tambahan kolokasi terefleksikan pada tenancy ratio.

Biaya pemeliharaan Menara Telekomunikasi Grup, yang diperlukan dalam kegiatan usaha relatif rendah dibandingkan pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan ruang pada menara Grup .

Faktor belanja modal dan biaya akuisisi
Belanja modal Menara Telekomunikasi meningkat dalam satu tahun terakhir sebagai hasil dari ekspansi Grup yang secara kontinyu mengembangkan portofolio Menara Telekomunikasi baik melalui akuisisi maupun pembangunan Menara Telekomunikasi.

Meskipun Grup mengasumsikan akan terus menyiapkan belanja modal untuk pembangunan Menara Telekomunikasi baru dan Grup dapat terbebani biaya akuisisi untuk mengembangkan usaha dan jaringan Perseroan, mayoritas belanja modal bersifat fleksibel dan Grup akan meneruskan pada saat perkiraan kriteria imbal hasil Grup terpenuhi, termasuk pada saat mendapatkan penyewa utama.

Faktor fluktuasi nilai tukar mata uang
Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memberi pengaruh pada laba atau rugi bersih Grup karena pinjaman Grup sebagian dalam mata uang asing sementara pencatatan akuntansi dan laporan keuangan dilakukan dan dinyatakan dalam Rupiah. Karena itu, pada setiap akhir periode laporan keuangan, Grup membukukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pengaruh bersih yang direalisasikan dan belum direalisasikan atas depresiasi atau apresiasi Rupiah terhadap mata uang asing selama periode tersebut. Volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya dapat memberi pengaruh signifikan pada laporan keuangan Grup.

Faktor jumlah biaya dan kewajiban
Untuk membiayai ekspansi yang pesat dari jaringan menara Grup, Grup memiliki sejumlah kewajiban yang signifikan. Secara historis, Grup melakukan pinjaman untuk membiayai akuisisi Menara Telekomunikasi dan pengembangan lokasi Menara Telekomunikasi, dan ke depannya akan melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang sama. Biaya bunga terkait pinjaman bervariasi tergantung dari mata uang pinjaman dan suku bunga pasar.

C. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	**12.735.815**	**11.740.345**
Beban pokok pendapatan	(3.996.322)	(3.527.754)
Laba bruto	**8.739.493**	**8.212.591**
Laba usaha	7.265.921	6.941.302
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	4.195.695	4.103.794
Laba tahun berjalan	**3.364.606**	**3.303.642**
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	3.364.695	3.281.051
Laba per saham (angka penuh)	**67**	**65**

Berikut ini adalah rincian pendapatan Grup:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pihak ketiga		
Pendapatan sewa	11.473.707	10.533.037
Jasa dan lainnya	1.119.642	1.042.286

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	12.593.349	**11.575.323**
Pihak berelasi		
Pendapatan sewa	3.148	1.010
Jasa dan lainnya	139.318	164.012
	142.466	**165.022**
Total	**12.735.815**	**11.740.345**

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Rincian jasa dan lainnya:		
Segmen		
Wireline	1.070.536	809.528
VSAT	111.079	109.415
IPLC	47.402	57.207
Managed service	10.618	55.746
Payment gateway	9.926	2.168
FTTH	8.071	172.210
Disbursement	257	24
Lain-lain	1.071	-
Total	**1.258.960**	**1.206.298**

Pendapatan

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.735.815 juta meningkat sebesar Rp995.470 juta atau 8,48% dibandingkan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Jumlah sewa lokasi menara kami meningkat sebesar 3.751 sewa lokasi atau 6,91%, dari 54.284 pada 31 Desember 2023 menjadi 58.035 pada 31 Desember 2024, peningkatan ini utamanya disebabkan oleh akuisisi PT Inti Bangun Sejahtera Tbk pada bulan Juli 2024. Sedangkan peningkatan pendapatan iForte adalah hasil dari adanya peningkatan urbanisasi dan permintaan konsumen layanan data di area dengan tingkat data *trafic* yang tinggi. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah km *generating revenue* dari sewa jaringan kabel optik sebesar 35.251 km atau 19,34% dari km fiber optik sebesar 182.256 km pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi 217.507 km pada tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan dari jasa lainnya turut meningkat sebesar Rp52.662 juta atau 4,37% dari Rp1.206.298 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp1.258.960 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Depresiasi dan amortisasi

Perbandingan depresiasi dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Depresiasi dan amortisasi Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.097.727 juta, meningkat sebesar Rp254.459 juta atau 8,95% dibandingkan depresiasi dan amortisasi pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan depresiasi aset tetap sebesar Rp125.869 juta atau 9,06% dari Rp1.389.517 juta di tahun 2023 menjadi Rp1.515.386 juta di tahun 2024 dan juga kenaikan amortisasi aset hak guna sebesar Rp100.814 juta atau 8,52% dari Rp1.183.535 juta di tahun 2023 menjadi Rp1.284.349 juta di tahun 2024 seiring dengan penambahan aset menara sebesar 4.842 menara (15,85%) dan bertambahnya aset fiber optik sebanyak 20.271 km (20,69%).

Beban pokok pendapatan lainnya

Perbandingan beban pokok pendapatan lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan lainnya Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp898.595 juta meningkat sebesar Rp214.109 juta atau 31,28% dibandingkan Beban pokok pendapatan lainnya pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan biaya perawatan lokasi sebesar Rp179.411 juta atau 39,49%, dari Rp454.310 juta pada tahun 2023 menjadi Rp633.721 juta pada tahun 2024 seiring dengan meningkatnya jumlah lokasi menara dan km fiber optik.

Laba bruto

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bruto Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.739.493 juta meningkat sebesar Rp526.902 juta atau 6,42% dibandingkan laba bruto pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh konsumsi data melalui perangkat nirkabel yang meningkat pada tahun 2023, sehingga pendapatan dari pemakaian data menjadi salah satu sumber pertumbuhan pendapatan tertinggi bagi semua operator. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut, operator harus memperluas jangkauan dan memperbanyak perangkat telekomunikasi dalam jaringan mereka dengan memberi order membangun tower-tower baru atau menyewa tower-tower yang sudah ada.

Laba usaha

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba usaha Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.265.921 juta meningkat sebesar 4,68% atau Rp324.619 juta dibandingkan laba usaha pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang di *offset* dengan beban depresiasi dan amortisasi dan beban pokok pendapatan, sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan

Perbandingan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.195.695 juta, meningkat sebesar Rp91.901 juta atau 2,24% dibandingkan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp324.619 juta, yang di *offset* dengan kenaikan biaya keuangan sebesar Rp279.646 juta.

Laba sebelum beban pajak penghasilan

Perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba sebelum beban pajak penghasilan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.536.683 juta menurun sebesar Rp9.193 juta atau 0,26% dibandingkan laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan sebesar Rp91.901 juta dan kenaikan beban pajak final sebesar Rp101.094 juta.

Laba tahun berjalan

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.364.606 juta, meningkat sebesar Rp60.964 juta atau 1,85% dibandingkan laba tahun berjalan pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp70.157 juta.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Perbandingan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penghasilan komprehensif lain Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp89 juta meningkat dari rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.591 juta yang diakibatkan oleh menurunnya kerugian neto dari lindung nilai arus kas yaitu sebesar Rp26.347 juta dari kerugian sebesar Rp31.157 juta pada tahun 2023 menjadi kerugian sebesar Rp4.810 juta pada tahun 2024 dan di *offset* dengan penurunan keuntungan aktuarial yaitu sebesar Rp1.475 juta serta kenaikan keuntungan bagian saham dari investasi yaitu sebesar Rp27 juta.

D. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total aset lancar	4.955.840	4.426.883
Total aset tidak lancar	72.872.540	63.992.063
Total asset	**77.828.380**	**68.418.946**
Total liabilitas jangka pendek	20.137.780	24.298.953
Total liabilitas jangka Panjang	38.534.936	27.608.329
Total liabilitas	**58.672.716**	**51.907.282**
Total ekuitas	**19.155.664**	**16.511.664**

Aset

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan tanggal 31 Desember 2023

Total aset Grup pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp77.828.380 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp4.955.840 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp72.872.540 juta.

Aset lancar Grup pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp528.957 juta atau 11,95% bila dibandingkan dengan aset lancar Grup pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas dari Rp428.677 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp940.183 juta pada tanggal 31 Desember 2024 serta meningkatnya piutang usaha dari Rp3.086.334 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp3.292.793 juta pada tanggal 31 Desember 2024 yang di *netoff* dengan menurunnya pajak dibayar dimuka jangka pendek dari Rp479.259 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp192.918 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Aset tidak lancar Grup pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.880.477 juta atau 13,88% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dari Rp40.385.074 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp47.477.953 juta pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan aset tetap disebabkan oleh akuisisi entitas anak PT Inti Bangun Sejahtera Tbk pada Juli 2024.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas Grup pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.672.716 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp20.137.780 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp38.534.936 juta.

Liabilitas jangka pendek Grup pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.161.173 juta atau 17,12% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang obligasi dari Rp7.252.204 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp274.913 juta pada tanggal 31 Desember 2024 yang di *netoff* dengan peningkatan utang bank dari Rp11.072.157 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp14.679.262 juta pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan obligasi jangka pendek yang sudah jatuh tempo pada tahun 2024.

Liabilitas jangka panjang Grup pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp10.926.607 juta atau 39,58% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dari Rp24.825.810 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp35.264.883 juta pada pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan utang bank jangka panjang terutama disebabkan untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas operasional dan modal kerja Grup.

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Grup pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.155.664 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.644.000 juta atau 16,01% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp16.511.644 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena laba bersih tahun berjalan yang di *offset* dengan dividen tahun berjalan.

E. ARUS KAS

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disebutkan:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	9.340.067	8.905.768
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(8.005.524)	(4.537.372)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(783.037)	(4.246.921)
Kenaikan neto kas dan setara kas	**551.506**	**121.475**
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(40.000)	(1.434)
Kas dan setara kas awal tahun	**428.677**	**308.636**
Kas dan setara kas akhir tahun	**940.183**	**428.677**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp9.340.067 juta, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp434.299 juta atau 4,88% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp8.905.768 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada kas yang dihasilkan dari operasi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp394.002 juta dikarenakan adanya akuisisi entitas anak yaitu PT Inti Bangun Sejahtera Tbk pada kuarter tiga 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp8.005.524 juta, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp3.468.152 juta atau 76,44% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp4.537.372 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran untuk akuisisi entitas anak pada tahun 2024 yaitu PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Integra Kreasitama Solusindo dan PT Varnion Technology Semesta dengan jumlah sebesar Rp3.457.027 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp783.037 juta, dimana mengalami penurunan sebesar Rp3.463.884 juta atau 81,56% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp4.246.921 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari penerimaan dari utang bank terutama dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang di netoff dengan pembayaran utang bank dan obligasi.

F. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Grup untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar 0,25x, dan 0,18x.

Sumber likuiditas internal Grup berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun utang obligasi.

Berikut adalah sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Grup pada 31 Desember 2024:

No	Nama Bank	Sumber likuiditas	Total fasilitas yang belum dicairkan
1	PT Bank SMBC Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BTPN Tbk)	Fasilitas pinjaman berulang	Rp1.597.700 juta
2	JPMorgan Chase Bank N. A	Fasilitas pinjaman berulang, cerukan	Rp700.000 juta
3	PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas pinjaman pasar uang	Rp883.000 juta
4	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	Fasilitas pinjaman berulang	USD50.000.000
5	PT Bank Permata Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp2.600.000 juta
6	Bank of China (Hong Kong) Limited	Fasilitas pinjaman berulang	USD60.000.000
7	PT Bank UOB Indonesia	Fasilitas bergulir pinjaman modal kerja	Rp460.800 juta
8	PT Maybank Indonesia Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp500.000 juta
9	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp898.600 juta
10	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp894.000 juta
11	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp297 juta
12	Citibank N. A	Fasilitas pinjaman berulang	Rp650.000 juta
13	PT Bank CTBC Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp24.341 juta

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Grup memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Grup untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 3,06x dan 3,14x, sedangkan solvabilitas aset Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,75x dan 0,76x.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Grup untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Grup tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 17,56% dan 20,01%.

Penurunan pada imbal hasil ekuitas pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan oleh kenaikan jumlah ekuitas yang disebabkan meningkatnya saldo laba dari Rp16.688.820 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp19.122.894 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Grup untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Grup tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 4,32% dan 4,83%.

Penurunan pada imbal hasil aset pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan oleh adanya peningkatan aset dari sebelumnya sebesar Rp68.418.946 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp77.828.380 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Profitabilitas

Margin laba (*net margin*) Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 26,42%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 28,14% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penurunan margin laba pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 pada segmen jasa lainnya terutama disebabkan oleh pertumbuhan segmen FTTH dan connectivity, selain itu terdapat juga kenaikan biaya keuangan dari 24,34% dari pendapatan pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi 24,64% dari pendapatan pada tanggal 31 Desember 2024.

G. SEGMEN OPERASI

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Berikut ini adalah informasi mengenai segmen operasi Grup:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Sewa Menara		Jasa Lainnya		Total	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN						
Pendapatan						
Pendapatan sewa	8.512.427	8.346.311	2.964.428	2.187.736	11.476.855	10.534.047

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Sewa Menara		Jasa Lainnya		Total	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Jasa dan lainnya	10.618	55.746	1.248.343	1.150.552	1.258.961	1.206.298
Laba bruto	6.252.328	6.166.804	2.487.165	2.045.787	8.739.493	8.212.591
Beban penjualan dan pemasaran	(174.250)	(93.601)	(138.595)	(144.519)	(312.845)	(238.120)
Beban umum dan administrasi	(486.457)	(558.879)	(337.775)	(279.297)	(824.232)	(838.176)
Beban usaha lainnya, neto	(230.493)	(160.229)	(106.002)	(34.764)	(336.495)	(194.993)
Laba usaha	5.361.128	5.354.095	1.904.793	1.587.207	7.265.921	6.941.302
Penghasilan keuangan, neto	45.467	14.705	21.980	5.814	67.447	20.519
Biaya keuangan	(2.158.518)	(2.329.308)	(979.155)	(528.719)	(3.137.673)	(2.858.027)
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	**3.248.077**	**3.039.492**	**947.618**	**1.064.302**	**4.195.695**	**4.103.794**
Pajak final	(659.012)	(557.918)	-	-	(659.012)	(557.918)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	**2.589.065**	**2.481.574**	**947.618**	**1.064.302**	**3.536.683**	**3.545.876**
Beban pajak penghasilan	85.881	(62.308)	(257.958)	(179.926)	(172.077)	(242.234)
Laba tahun berjalan	**2.674.946**	**2.419.266**	**689.660**	**884.376**	**3.364.606**	**3.303.642**
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN						
Total aset segmen	58.393.603	55.199.706	19.434.777	13.219.240	77.828.380	68.418.946
Total liabilitas segmen	(39.988.147)	(38.559.573)	(18.684.569)	(13.347.709)	(58.672.716)	(51.907.282)
Informasi lainnya						
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	6.763.403	7.050.800	2.576.664	1.854.968	9.340.067	8.905.768
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.698.947)	(1.398.363)	(5.306.577)	(3.139.009)	(8.005.524)	(4.537.372)
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(3.392.084)	(6.435.970)	2.609.047	2.189.049	(783.037)	(4.246.921)

Pada tanggal 31 Desember 2024, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Grup adalah sebesar 66,92% dan 33,08%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Grup adalah sebesar 73,78% dan 26,22%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Grup adalah sebesar 71,57% dan 28,43%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Grup adalah sebesar 77,13% dan 22,87%.

Bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan dari sewa menara Grup mengalami peningkatan sebesar Rp120.988 juta atau 1,44% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah menara.

Bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan dari jasa lainnya Grup mengalami peningkatan sebesar Rp874.483 juta atau 26,20% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya bisnis fiber dan *connectivity*.

H. BELANJA MODAL

Grup melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, menara, gedung, kendaraan bermotor, serta peralatan kantor dan proyek. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Grup. Belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp4.282.530 juta dan Rp4.799.870 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Harga perolehan		
Tanah	4.446	-
Menara	98.355	89.059
Gedung	11.993	3.860
Mesin	2.572	-
Peralatan kantor	8.147	12.843
Kendaraan bermotor	15.665	11.744
Peralatan proyek	707.061	465.145
Perabotan kantor	46	523
Subtotal	848.285	583.174
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih		
Menara	196	-
Gedung	-	-
Peralatan proyek	-	-
Subtotal	196	-
Aset dalam penyelesaian	3.434.049	4.216.696
Total	**4.282.530**	**4.799.870**

Grup memiliki portofolio terbesar diantara penyedia menara independen di Indonesia. Hal ini menempatkan Grup pada posisi untuk memanfaatkan kebutuhan akan menara baru di daerah perkotaan dan pedesaan di seluruh negeri. Melalui anak perusahaannya, iForte, Grup memiliki kemampuan menyediakan microcell sites, tower fiberization dan BTS hotel solution untuk mendukung dari meningkatnya permintaan kapasitas jaringan. Grup telah merampungkan BTS baru dan kolokasi, Wireline dan VSAT, sewa lahan dan aset lainnya selain menara. Sebagian besar proyek didanai oleh arus kas internal Grup. Pembangunan menara dan fiber optik berkisar selama lebih kurang 6 bulan waktu pengerjaan. Grup mengharapkan dengan belanja modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan.

Komitmen investasi barang modal

Pada segmen tower, Grup memiliki komitmen investasi barang modal pada beberapa pihak diantaranya dengan PT Bach Multi Infrastruktur sebesar Rp82.519 juta, PT Duta Hita Jaya sebesar Rp78.207 juta, PT Bach Multi Global sebesar Rp44.506 juta, PT Konstruksi Baja Cikande sebesar Rp54.461 juta dan PT Handal Karya Abadi sebesar Rp28.853 juta terkait dengan pengadaan aset untuk pembangunan menara.

Pada segmen non-tower, Grup memiliki komitmen investasi barang modal pada beberapa pihak diantaranya dengan PT Jejaring Mitra Persada sebesar sebesar Rp120.540 juta, PT Fajar Mitra Krida Abadi sebesar Rp77.012 juta, PT Rizki Prima Sakti sebesar Rp71.967 juta, PT Ekspanindo Prima Multimedia sebesar Rp48.756 juta dan PT Merbau Prima Sakti sebesar Rp36.879 juta terkait dengan pengadaan aset untuk pembangunan jaringan fiber optik.

Komitmen investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung mengembangkan dan pertumbuhan bisnis Perseroan salah satunya melalui penambahan aset dan ekspansi ke daerah-daerah untuk memperluas jangkauan ke seluruh negeri.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan.

I. PEMBATASAN TERHADAP PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pengalihan dana dari entitas anak kepada Perseroan selain pembayaran dividen dari entitas anak.

J. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas.

K. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO

Beban usaha lainya, neto merupakan beban usaha lainnya diluar kegiatan usaha utama Grup dalam kegiatan operasional. Beban usaha lainnya, neto Perseroan adalah sebesar Rp336.495 juta dan Rp194.993 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Rugi pelepasan aset tetap	168.191	164.120
Beban pajak	123.833	11.289
Kerugian selisih kurs, neto	17.317	14.536
Penurunan nilai *goodwill*	-	30.000
Keuntungan nilai wajar dari *structured deposit*	-	(9.760)
Keuntungan dari perubahan estimasi akuntansi - sewa tanah	-	(97.612)
Beban (pembalikan) cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang	(43.315)	43.435
Lain-lain	70.469	38.985
Neto	**336.495**	**194.993**

Kenaikan beban pajak Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp112.544 juta atau 997% dibandingkan beban pajak pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini disebabkan STP telah menerima Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali atas Kurang Bayar PPh Pasal 26 tahun 2015.

Penurunan keuntungan nilai wajar dari *structured deposit* Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.760 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya realisasi keuntungan atas penjualan structure deposit pada tahun 2023.

Penurunan beban cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang, neto Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp86.759 juta atau 200% dibandingkan beban cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang, neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pengkinian metode perhitungan agar lebih *reliable* untuk menggunakan PD *(probability default)* dan LGD *(loss given default)* yang lebih tepat.

Penurunan nilai *goodwill* Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.000 juta disebabkan oleh adanya *goodwill impairment* atas IPI dan VTS.

Keuntungan dari perubahan estimasi akuntansi - sewa tanah Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.612 juta disebabkan oleh Grup mengevaluasi opsi untuk memperpanjang waktu sewa, dan berdasarkan analisis pembaruan sewa tanah di masa lalu, Grup menetapkan bahwa opsi tersebut tidak cukup pasti untuk di eksekusi, perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada menurunnya amortisasi dan beban bunga dan dicatatkan sebagai keuntungan dari perubahan estimasi akuntansi.

L. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH SERTA LABA OPERASI

Dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Grup tidak berdampak signifikan selama dua tahun terakhir karena nilai inflasi masih terkendali.

M. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI

Kebijakan pemerintah dalam menjaga kurs mata uang dan suku berpengaruh pada laba Grup.

Perkembangan **Terkini**

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Grup yang tidak diaudit tanggal 31 Maret 2025 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit"), yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun telah dipublikasikan oleh Perseroan dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari pelaporan berkala Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui sarana menara nusantara tbk 31 march 2025.pdf. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana dalam laporannya tanggal 28 Mei 2025, yang tidak dilampirkan dalam Prospektus ini, namun tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit, yang dapat diakses pada situs Perseroan atau situs Bursa Efek Indonesia. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit atas Laporan Keuanga Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang kegiatan usaha utamanya berfokus pada kepemilikan saham (langsung maupun tidak langsung) di beberapa anak perusahaan utama yang bergerak di bidang penyewaan infrastruktur terlekomunikasi. Dalam Prospektus ini, Perseroan dan anak-anak perusahaan utama selanjutnya disebut "Grup". Dalam melakukan kegiatan usahanya, Grup tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Grup. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Grup yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Grup menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan infrastruktur telekomunikasi.

Grup menghadapi persaingan dari penyedia infrastruktur telekomunikasi lainnya. Mengingat bahwa industri infrastruktur telekomunikasi bersifat padat modal, memerlukan kemampuan operasional yang baik, dan memerlukan hubungan yang kuat dengan para operator telekomunikasi, maka tidak mudah bagi pemain-pemain baru untuk masuk dalam industri ini.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi persaingan adalah menjaga tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, dan konsisten dalam membangun hubungan jangka panjang dengan para operator telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya.

Dengan jumlah portofolio menara Grup sekitar 31.502 menara dengan lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka Grup mendukung para operator telekomunikasi untuk memperluas wilayah cakupan dan kapasitas jaringan mereka secara cepat.

Saat ini kondisi persaingan bisnis Grup dalam penyediaan ruang menara telekomunikasi serta jaringan kabel optik relatif stabil. Hal ini juga didukung oleh posisi Grup dalam industri sebagai salah satu perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen terbesar, neraca keuangan yang relatif kuat serta akses pendanaan yang relatif baik. Selain itu Perseroan memiliki reputasi yang baik dalam menyelesaikan proyek-proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi sesuai dalam jangka waktu dan spesifikasi yang diperlukan oleh para operator telekomunikasi.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari beberapa pelanggan utama yaitu operator telekomunikasi dengan sewa jangka panjang. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3 besar pelanggan utama Perseroan memiliki kontribusi sebanyak 80% dari seluruh pendapatan Perseroan. Apabila pelanggan utama Perseroan tidak dapat atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak mereka dengan Perseroan dan/atau perjanjian mereka dengan pihak ketiga lainnya (termasuk lembaga keuangan), mengalami kesulitan keuangan, Perseroan dapat mengalami piutang usaha yang tidak tertagih atau ditangguhkan. Oleh karena Perseroan menerima sebagian besar pendapatan hanya dari beberapa pelanggan, adanya kejadian yang mempengaruhi kelayakan kredit dan kemampuan dalam pemenuhan kewajiban terhadap Perseroan akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan memiliki pengalaman dalam keterlambatan pembayaran dari beberapa pelanggan.

Selain itu, dalam kegiatan usaha yang wajar, Perseroan terkadang mengalami perselisihan dengan para pelanggan, sebagai contoh kerap terjadi pelanggan Perseroan meminta tambahan dokumen sebagai salah satu syarat penagihan akan tetapi syarat tambahan dokumen tersebut tidak terdapat didalam perjanjian penyewaan. Apabila Perseroan diharuskan untuk memperkarakan perselisihan tersebut, maka hubungan dengan pelanggan dapat terganggu yang pada akhirnya akan mengurangi pertumbuhan pendapatan Perseroan dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Menurunnya permintaan atas infrastruktur telekomunikasi atau menurunnya permintaan atas ruang menara, danjaringan kabel optik dan VSAT dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Strategi usaha dan rencana belanja modal Perseroan didasarkan atas ekspektasi jumlah pengguna infrastruktur telekomunikasi akan meningkat. Apabila industri jasa layanan telekomunikasi di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan atau lebih rendah dari tingkat ekspektasi pertumbuhan, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Faktor – faktor yang menyebabkan penurunan permintaan untuk infrastruktur telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- Menurunnya belanja modal operator telekomunikasi;
- Menurunnya pertumbuhan penggunaan data atau industri telekomunikasi secara umum;
- Perkembangan yang terhambat karena izin pemerintah untuk spektrum dan telekomunikasi dan regulasi lainnya;
- Merger atau konsolidasi diantara operator telekomunikasi;
- Meningkatnya penggunaan network sharing, roaming atau perjanjian penjualan kembali diantara operator telekomunikasi;
- Penundaan atau perubahan dalam penggunaan teknologi telekomunikasi;
- Perubahan strategi operator telekomunikasi yang merugikan terkait kepemilikan atau pembagian ruang menara;
- Perkembangan terkait pembagian zona, lingkungan, kesehatan, dan regulasi pemerintah lainnya yang merugikan;
- Menurunnya permintaan pelanggan jasa telekomunikasi secara umum; dan
- Memburuknya kondisi keuangan secara umum para operator telekomunikasi sebagai hasil menurunnya tarif, konvergensi media dan faktor-faktor lainnya.

Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa industri telekomunikasi secara umum dapat mengalami konsolidasi di masa depan. Konsolidasi para pelanggan yang signifikan pada saat ini maupun di masa yang akan datang, termasuk merger yang baru saja terjadi antara PT XL Axiata, Tbk, PT Smartfren Telecom, Tbk dan PT Smart Telecom ("**Merger XL Smart**"), akan berakibat pada menurunnya belanja modal secara keseluruhan karena adanya tumpang tindih pada rencana jaringan dan ekspansi dari beberapa operator telekomunikasi. Khusus sehubungan dengan Merger XL Smart, Perseroan masih mengkaji dampak final atas keseluruhan merger ini mengingat kesepakatan dengan pihak terkait masih berupa kesepakatan awal dan masih memerlukan komunikasi dan pengaturan lebih lanjut dalam implementasinya, termasuk terkait manajemen operasional dan relokasi kontrak sewa infrastruktur pasca merger. Lebih lanjut, apabila konsolidasi tersebut terjadi, segmen tertentu dari pelanggan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang pada jaringan gabungan hasil konsolidasi akan dianggap berlebihan dan pelanggan tersebut akan mengurangi kelebihan ini. Hasil operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat terkena dampak negatif apabila sebagian besar kontrak sewa saat ini tidak diperpanjang ketika konsolidasi terjadi. Akibat yang serupa dapat terjadi apabila para operator telekomunikasi mulai memberlakukan network sharing, roaming atau perjanjian penjualan kembali di antara mereka dibandingkan menyewa infrastruktur telekomunikasi dari penyedia independen.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa ke depannya (selain Merger XL Smart) para operator telekomunikasi Indonesia tidak akan melakukan konsolidasi, yang akan berdampak pada penurunan pertumbuhan dan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli

Keberhasilan yang telah dicapai Perseroan maupun yang diharapkan akan dicapai Perseroan di kemudian hari, sampai pada tahap tertentu, bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempertahankan manajemen kunci dan tenaga ahli. Menarik dan mempertahankan talenta manajerial berkualitas merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan industri Perseroan pada khususnya akibat adanya perkembangan yang pesat dan masuknya pesaing baru. Kegagalan untuk menarik atau mempertahankan

manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan Usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun perbedaan penafsiran atau implementasi, dan/atau tumpang tindih keberlakuan peraturan perundangan-undangan

Industri penyewaan Menara Telekomunikasi di Indonesia tunduk pada berbagai macam peraturan perundangan. Setiap perubahan atas peraturan perundangan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran atau implementasi, dan/atau tumpang tindih keberlakuan peraturan perundangan-undangan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan maupun prospek usaha Perseroan serta dapat mempengaruhi secara negatif hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Pada tanggal 30 Maret 2009, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan peraturan bersama yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("**Peraturan Bersama**"). Peraturan Bersama dimaksud mengatur juga antara lain mengenai pedoman pembangunan Menara Telekomunikasi dan penggunaan menara bersama untuk dapat diselaraskan di setiap institusi pemerintahan sebagai acuan. Di sisi lain, terdapat interpretasi yang berbeda dari ranah praktik pada tiap pemerintah daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, contohnya mengenai penerapan Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") (sekarang disebut sebagai Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atas Menara Telekomunikasi yang memiliki persyaratan yang berbeda-beda di setiap daerah. Perseroan dapat mengalami kesulitan dan kendala dalam memperoleh atau memperpanjang IMB atau PBG yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran atau implementasi, dan/atau tumpang tindih keberlakuan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dimana Perseroan memiliki Menara Telekomunikasi, termasuk perbedaan persyaratan dan proses untuk mendapatkan IMB atau PBG dari satu daerah dengan daerah lainnya.

Lebih lanjut, perbedaan penafsiran atau implementasi, dan/atau tumpang tindih keberlakuan peraturan perundangan-undangan dengan diterbitkannya peraturan baru yang mengatur hal yang sama di kemudian hari terkait dengan industri penyewaan menara, serta terbatasnya contoh penerapan atau pedoman terkait dengan interpretasi dan implementasi atas peraturan perundangan tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki IMB atau PBG atas sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan. Adapun atas sebagian Menara Telekomunikasi milik Perseroan yang izin-izinnya belum lengkap, saat ini sedang diproses permohonan izin-izinnya pada lembaga terkait yang berwenang.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ("**Peraturan No. 14/2014**"). Peraturan No. 14/2014 tersebut mengatur syarat-syarat untuk mendirikan Menara Telekomunikasi di DKI Jakarta, termasuk persyaratan dan perizinan yang harus penuhi oleh setiap Menara Telekomunikasi baik yang sudah berdiri maupun yang baru akan dibangun. Pembangunan menara baru di daerah DKI Jakarta hanya dapat dilakukan di dalam area Zona Menara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah ("**Zona Menara**"). Sebelum mendirikan Menara Telekomunikasi, diperlukan suatu Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ("**Rekomendasi Zona Menara**"). Setelah mendapatkan Rekomendasi Zona Menara, penyedia Menara Telekomunikasi harus mendapatkan IMB atau PGB, kecuali menara tersebut berada secara tersembunyi dalam bangunan gedung dan tidak memiliki ketinggian lebih dari 6 meter. Pembangunan menara harus dilakukan paling lambat 1 bulan sejak dikeluarkannya IMB atau PBG. IMB atau PBG berlaku tanpa batas waktu jika tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan beban antena terpasang tidak melebihi kemampuan daya dukung beban maksimum Menara Telekomunikasi.

Selain IMB atau PBG, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("**Peraturan No. 16/2021**"), penyedia Menara Telekomunikasi yang beroperasi di seluruh kota/kabupaten di Indonesia harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku pada lokasi

menara tersebut didirikan. Peraturan No. 14/2014 juga mewajibkan penyedia menara untuk mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasionalnya menara.

Tidak ada jaminan bahwa Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan akan sesuai dengan peraturan sebagaimana dimaksud di atas tersebut atau termasuk dalam Zona Menara atau pemerintah yang berwenang tidak akan mengeluarkan peraturan baru yang terkait dengan Zona Menara.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, apabila izin-izin yang diperlukan atas Menara Telekomunikasi milik Perseroan tersebut tidak berhasil didapatkan, seperti contohnya, IMB atau PBG, maka lembaga terkait yang berwenang, dapat memberlakukan bermacam sanksi terhadap Perseroan, seperti teguran, peringatan dan denda, untuk ketidakpatuhan terhadap pemenuhan persyaratan izin dan persetujuan yang relevan dan bahkan untuk menyegel maupun meminta Perseroan untuk merelokasi ataupun membongkar menara-menara Telekomunikasi milik Perseroan tersebut. Kegagalan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan persetujuan dan izin atas Menara Telekomunikasi juga dapat mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban Perseroan berdasarkan beberapa perjanjian sewa dengan pelanggan Perseroan. Demikian halnya dengan kelalaian untuk memenuhi persyaratan dari Peraturan No. 16/2021 dan Peraturan No. 14/2014 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal Perseroan diwajibkan untuk memindahkan ataupun membongkar baik (i) berdasarkan putusan final dan mengikat yang telah ditetapkan pengadilan, 10% atau lebih dari Menara Telekomunikasi Perseroan; ataupun (ii) berdasarkan setiap bentuk perintah atau putusan otoritas yang berwenang, 15% atau lebih dari Menara Telekomunikasi Perseroan; dalam jangka waktu 6 bulan berturut–turut, dapat mengakibatkan wanprestasi atas utang dan dapat menyebabkan percepatan pembayaran utang Perseroan.

Terjadinya salah satu atau lebih dari peristiwa atau hal-hal yang disebutkan di atas, dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selanjutnya, penerapan peraturan di bidang lingkungan hidup terkait dengan kegiatan usaha Perseroan juga dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**Amdal**"), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("**UKL-UPL**") atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**SPPL**") ("**PERMENLHK No. 4/2021**"), kewajiban untuk memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL ditentukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sehubungan dengan dijalankannya usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau kegiatan yang (i) memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, (ii) tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki UKL-UPL, dan (iii) tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib memiliki UKL-UPL diwajibkan untuk memiliki SPPL. Pada tanggal 30 April 2010, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ("**Permendag No. 32/2010**") yang memungkinkan Perseroan untuk mengajukan permintaan untuk IMB atau PBG baru untuk lokasi menara Perseroan yang belum memiliki IMB atau PBG.

Dalam Permendag No. 32/2010, salah satu persyaratan administratif untuk mendapatkan IMB atau PBG adalah dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi yang terkena kewajiban. Secara umum, penyediaan Menara Telekomunikasi yang dijalankan Perseroan dengan menyewakan portofolio Menara Telekomunikasi miliknya termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki SPPL. Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya serta tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi. Namun, dalam prakteknya, untuk memperoleh IMB atau PBG, instansi pemerintah di daerah tertentu mensyaratkan agar pemohon untuk memenuhi persyaratan kewajiban pemantauan lingkungan hidup. Beberapa menara milik Perseroan yang telah memiliki IMB atau PBG mungkin belum dilengkapi dengan dokumen pemantauan lingkungan hidup. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa instansi pemerintah tidak akan mengharuskan Perseroan untuk memiliki UKL-UPL meskipun Perseroan telah memiliki IMB atau PBG sesuai Permendag No. 32/2010. Apabila hal ini diterapkan terhadap Perseroan, Perseroan dapat dikenakan denda atau sanksi akibat tidak dimilikinya dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut atau Perseroan justru akan mengeluarkan biaya tambahan guna mengurus perolehan dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, tidak adanya jaminan bahwa peraturan-peraturan yang baru baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di masa yang akan datang akan dapat mendukung kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa Menara Telekomunikasi, jaringan serat optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang

Pengembangan dan pengoperasian sebagian besar Menara Telekomunikasi, membutuhkan ijin-ijin yang diterbitkan oleh pemerintah, termasuk ijin mendirikan bangunan atau persetujuan pembangunan gedung. Untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan atau persetujuan pembangunan gedung, Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari warga sekitar yang tinggal dalam radius menara. Dalam kondisi tertentu dibutuhkan pula rekomendasi ketinggian menara, persetujuan penempatan antena dan tiang, ijin gangguan, ijin penggunaan fasilitas umum yang relevan dan beberapa ijin atau rekomendasi lainnya. Ijin-ijin tersebut dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang dan Perseroan dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan ijin-ijin tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk mencari lokasi alternatif dan/atau mengeluarkan upaya dan biaya yang besar apabila lokasi alternatif Menara Telekomunikasi yang sesuai tidak tersedia. Lebih lanjut, Perseroan terus memonitor Upaya yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") dalam rangka menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha, baik melalui inovasi dan pembaharuan sistem OSS (seperti integrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang ("**RDTR**") dan fitur kemitraan. Proses inovasi dan pembaharuan sistem OSS tersebut di atas memerlukan, antara lain, langkah-langkah penyesuaian, langkah antisipatif maupun perubahan persyaratan dalam pengajuan izin pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (atau dikenal dengan OSS) yang dapat menimbulkan kendala bagi Perseroan atau keterbatasan sistem pada daerah-daerah tertentu yang belum memiliki Sistem RDTR, dimana hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap proses perolehan atau perpanjangan izin-izin yang dibutuhkan Perseroan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan senantiasa berupaya mentaati semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain dengan memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk melakukan pembangunan menara telekomunikasi. Perseroan menggunakan kontraktor dalam melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi dan kontraktor yang sama yang telah ditunjuk Perseroan tersebut, berkewajiban untuk mengurus terlebih dahulu ijin-ijin yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dilaksanakannya pembangunan Menara Telekomunikasi guna memastikan pembangunan menara telekomunikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelalaian untuk memenuhi perizinan yang disyaratkan dapat mengakibatkan Pihak yang berwenang mengambil tindakan penegakan hukum terhadap penyedia menara dengan memaksa membongkar menara yang belum memiliki ijin. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan tidak akan diharuskan untuk membongkar atau memindahkan Menara Telekomunikasi dan/atau dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi peraturan yang ada. Adanya akibat atau sanksi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan usaha Entitas Anak yang menyelenggarakan jaringan tetap berbasis VSAT dan serat optik, serta jasa penyelenggara akses internet, juga memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. Entitas Anak juga dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan ijin-ijin tertentu sehingga dapat menyebabkan Entitas Anak mengeluarkan upaya dan biaya yang besar.

Ijin-ijin dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa pihak yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang merugikan sehubungan dengan ijin-ijin tersebut atau bahwa ijin-ijin tersebut akan diperpanjang atau diperbaharui pada persyaratan yang wajar secara komersial. Apabila ijin-ijin yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak hilang atau tidak diperbaharui, hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk membangun Menara Telekomunikasi dan mengembangkan jaringan kabel serat optik baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*

Kemampuan Perseroan untuk membangun Menara Telekomunikasi dan mengembangkan jaringan kabel serat optik baru bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk menentukan dan menyewa

atau mengakuisisi lahan yang cocok dengan harga yang wajar secara komersial, ketersediaan modal, perencanaan jaringan konsumen dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh izin-izin yang diperlukan. Identifikasi lokasi untuk mendirikan sebuah Menara Telekomunikasi memerlukan keahlian teknik infrastruktur, manajemen menara dan konsultasi jaringan, demikian juga hal nya untuk pengembangan jaringan kabel serat optik. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh lokasi yang tepat dan dapat membangun atau memperoleh Menara Telekomunikasi baru dengan ketinggian yang diperlukan untuk memenuhi rencana ekspansi pelanggan atau mengembangkan jaringan kabel serat optik sesuai rencana. Faktor– faktor ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa, pembangunan dan akuisisi

Strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha dari Menara Telekomunikasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu meningkatkan jumlah kolokasi, pembangunan menara baru dan akuisisi dari penyedia menara independen atau operator telekomunikasi. Pelaksanaan strategi ini akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator komunikasi, kemampuan untuk membangun Menara Telekomunikasi secara tepat waktu dan hemat biaya, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar serta kemampuan untuk memperoleh pembiayaan untuk melakukan akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pencarian peluang akuisisi dan komunikasi terkait dengan pihak ketiga akan berujung pada akuisisi di masa depan.

Kemampuan Perseroan untuk berkembang melalui akuisisi tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti kesediaan operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia (diantaranya adalah pelanggan utama Perseroan) untuk bekerja sama dengan Perseroan dalam transaksi sale and leaseback untuk portofolio Menara Telekomunikasi miliknya, atau kesediaan pemilik Menara Telekomunikasi independen lain untuk menjual portofolio mereka, dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut harus memenuhi kriteria tingkat imbal hasil investasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan dari berbagai pihak untuk melakukan ekspansi. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat membuat Perseroan rentan terhadap kewajiban atau risiko yang belum diketahui tanpa jaminan yang memadai atau perlindungan hukum lainnya.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada risiko dan ketidakpastian termasuk kemampuan Perseroan untuk:

- Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator telekomunikasi;
- Membangun menara Build-to-Suit dengan tepat waktu dan hemat biaya;
- Mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Pendanaan yang mencukupi untuk melaksanakan akuisisi atau investasi yang lebih besar dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Menghasilkan arus kas yang memadai untuk membayar utang Perseroan dan mengelola serta mendanai belanja modal dan operasional;
- Mempertahankan dan memperoleh pelanggan dan secara akurat menilai dan mengevaluasi kebutuhan mereka dan permintaan pasar;
- Menawarkan produk dan jasa dengan harga yang kompetitif;
- Menanggapi perubahan pada peraturan di industri telekomunikasi dan peraturan terkait lainnya; dan
- Menarik, mempertahankan, dan melatih tenaga kerja ahli.

Keberhasilan strategi pertumbuhan akan bergantung pada beberapa faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil mengatasi risiko dan ketidapastian tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan memperkirakan bahwa pertumbuhan Perseroan akan meningkatkan permintaan terhadap manajemen dan tenaga kerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil atau apabila terdapat kekurangan pada pengendalian internal dan pengawasan pada saat ini dan di masa yang akan datang yang dapat berakibat pada inkonsistensi standar internal pada prosedur operasional, Perseroan tidak dapat memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mempekerjakan dan mempertahankan karyawan baru, membuka kegiatan usaha baru atau mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan secara efektif.

Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja Operasional

Perseroan menyewa sebagian besar bidang tanah dan properti di lokasi menara. Secara umum, jangka waktu perjanjian sewa tersebut berkisar antara 5 hingga 20 tahun dengan opsi perpanjangan dimana Perseroan diberikan hak untuk menggunakan lokasi yang disewa untuk menjalankan kegiatan usaha.

Setiap pengakhiran perjanjian sewa lahan Perseroan atau ketidakmampuan untuk memperbaharui perjanjian sewa lahan dengan ketentuan yang wajar secara komersial dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan pendapatan. Pembongkaran dan pemindahan Menara Telekomunikasi dapat menimbulkan biaya yang besar dan Perseroan tidak dapat membebankan biaya tersebut kepada pelanggan atau mencegah adanya gangguan yang disebabkan oleh pembongkaran dan pemindahan tersebut pada kegiatan operasional Perseroan maupun pelanggan. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan, memperbaharui dan melindungi hak sewa pelanggan atas layanan Perseroan dengan ketentuan yang wajar secara komersial, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Untuk beberapa sebab, seperti ketiadaan atau keterlambatan dalam mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak atas tanah dan hal-hal lainnya sebelum menandatangani perjanjian sewa menara. Apabila terdapat sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hal-hal lainnya, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi Menara Telekomunikasi. Penghentian perjanjian sewa tanah dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Apabila hal tersebut terjadi pada Menara Telekomunikasi dengan nilai yang material, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Apabila kepemilikan atau operasi pada menara telelomunikasi menjadi tidak sah akibat berakhirnya masa sewa tanah atau sebaliknya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah seperti pelanggaran atau penghentian sewa dengan pelanggan berdasarkan perjanjian penyewaan induk. Selanjutnya, kegagalan untuk memperoleh perpanjangan sewa tanah pada Menara Telekomunikasi yang masa sewa lokasinya masih berlaku dapat menimbulkan biaya terkait dengan pemindahan Menara Telekomunikasi ke lokasi alternatif atau mengembalikan porsi yang belum terpakai dari biaya sewa dibayar dimuka. Pelanggan juga secara umum memiliki hak untuk membatalkan penyewaan Menara Telekomunikasi pada keadaan tersebut. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai

Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti badai, banjir, gempa bumi, longsor, sambaran petir dan kejadian-kejadian lainnya. Adanya kerusakan pada Menara Telekomunikasi dan aset lainnya milik Perseroan sebagai akibat dari kejadian-kejadian di atas atau kejadian lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Walaupun Perseroan mengasuransikan Menara Telekomunikasi dan aset lainnya untuk mengurangi potensi dampak dari risiko-risiko tersebut, Perseroan mungkin tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai secara menyeluruh untuk perbaikan, rekonstruksi, dan biaya pertanggungjawaban umum. Ketidakmampuan dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan sebagai akibat dari kerusakan Menara Telekomunikasi dan infrastruktur terkait dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan atau keberadaan Menara Telekomunikasi

Perseroan telah dan mungkin akan terus mengalami penolakan dari masyarakat setempat terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi yang telah ada atau terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi baru karena berbagai alasan termasuk keindahan lingkungan dan dugaan masalah kesehatan. Sebagai akibat dari penolakan

tersebut, Perseroan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang setempat untuk membongkar dan memindahkan Menara Telekomunikasi tertentu. Menara Telekomunikasi Perseroan juga dapat terkena risiko sabotase, perusakan dan pencurian seperti pencurian kabel tembaga. Apabila Perseroan diharuskan untuk memindahkan sejumlah Menara Telekomunikasi yang jumlahnya material dan tidak dapat menentukan lokasi pengganti yang dapat diterima pelanggan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel optik

Entitas Anak mempunyai rencana memperluas pembangunan jaringan kabel optik di tahun-tahun mendatang yang membutuhkan kecukupan dana, perizinan dan pasokan material. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalian pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga mungkin tidak dapat dilaksanakan karena regulasi tertentu dan menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk mengembangkan bisnis Entitas Anak, menarik pelanggan baru ditahun-tahun mendatang, meminimalkan churn rate maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Entitas Anak.

Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan karena sabotase dan bencana alam

Kegiatan usaha Entitas Anak dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, robohnya tiang tumpuan dan bencana alam. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Entitas Anak, meningkatkan churn rate, memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Entitas Anak.

Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan

Perseroan membutuhkan modal dalam jumlah yang besar untuk mengembangkan usaha Perseroan. Jumlah dan waktu kebutuhan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang dapat berbeda dari perkiraan Perseroan sebagai akibat dari beberapa hal antara lain penundaan yang tidak terduga atau pembengkakan biaya, timbulnya biaya yang tidak terduga atau faktor teknis dan perubahan peraturan.

Perseroan berencana untuk memanfaatkan pembiayaan utang yang efektif dan efisien dalam melaksanakan beberapa rencana ekspansinya. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tersebut dengan persyaratan komersial yang wajar bergantung pada beberapa faktor, yaitu kondisi keuangan Perseroan, hasil kegiatan operasional dan arus kas, kondisi pasar secara umum dalam industri penyewaan menara dan ekonomi, politik serta kondisi lainnya di Indonesia.

Beberapa perjanjian pembiayaan Entitas Anak, seperti perjanjian pengakuan utang, dapat memiliki persyaratan tertentu dan pembatasan lainnya yang dapat membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk meminjam dana tambahan, melakukan belanja modal dan investasi, membagikan dividen, melakukan merger atau konsolidasi atau menjaminkan aset yang dimilikinya. Entitas Anak juga memerlukan persetujuan dari beberapa atau seluruh kreditur untuk melaksanakan beberapa atau seluruh transaksi tersebut. Entitas Anak memiliki risiko yang terkait dengan pembiayaan utang, termasuk risiko tidak memadainya arus kas dari kegiatan operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga, risiko valuta asing sehubungan dengan utang berdenominasi mata uang asing, risiko tingkat suku bunga dan risiko ketidakmampuan Entitas Anak untuk melunasi utang dengan persyaratan yang menguntungkan. Perseroan tidak dapat memastikan keberhasilan dalam negosiasi dengan bank untuk melakukan pembiayaan kembali atas utang yang ada atau memperoleh kredit yang cukup, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan likuiditas bagi Perseroan dan membutuhkan alternatif pendanaan yang lain. Ketidakmampuan Entitas Anak untuk mendapatkan pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga

Perseroan memiliki deposito pada beberapa bank domestik dan internasional serta institusi keuangan. Namun, kebijakan lindung nilai mungkin tidak memadai untuk melindungi Perseroan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan dapat berakibat pada tingginya biaya bunga dan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, pengaturan lindung nilai yang dilakukan di masa depan akan rentan terhadap risiko kerugian terkait gagal bayar, termasuk sebagai akibat pihak lainnya gagal memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian terkait.

Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas

Kontraktor-kontraktor Perseroan bergantung pada pembelian komoditas seperti baja untuk membangun Menara Telekomunikasi. Ketidakstabilan harga komoditas lokal atau global khususnya harga baja akan mempersulit Perseroan dan kontraktor dalam memperkirakan biaya untuk membangun Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan rencana ekspansi Perseroan. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan jumlah belanja modal yang dibutuhkan untuk rencana ekspansi tersebut. Adanya kenaikan pada kebutuhan belanja modal dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan

Terdapat spekulasi publik terkait potensi risiko kesehatan pada masyarakat yang berasal dari pengaruh medan elektromagnetik dari menara dan peralatan komunikasi nirkabel. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa studi di masa yang akan datang terkait risiko kesehatan tidak menghubungkan antara medan elektromagnetik dengan masalah kesehatan. Hal ini dapat membawa Perseroan pada tuntutan hukum dari orang perorangan dan mungkin akan menyebabkan Perseroan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat setempat untuk meredakan keluhan mereka serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Persepsi publik yang negatif dapat memperlambat pertumbuhan operator telekomunikasi dan industri penyewaan menara secara umum. Potensi keterkaitan antara emisi radio dan efek negatif terhadap kesehatan telah menjadi studi yang penting di kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa perkara hukum terkait kesehatan telah terjadi di seluruh dunia sehubungan dengan perusahaan dibidang nirkabel dan produsen perangkat nirkabel. Faktor tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan karena dapat berpotensi meningkatkan biaya terkait perkara hukum dan mengurangi laba bersih, atau gangguan pada kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang penting sehubungan dengan risiko ini.

Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan

Pengembangan dan implementasi teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat menurunkan permintaan jaringan nirkabel berbasis menara dan mengurangi permintaan operator telekomunikasi atas ruang pada menara. Beberapa teknologi yaitu *spectrally efficient technologies*, yang dapat meringankan masalah kapasitas jaringan dan mengurangi permintaan atas ruang menara untuk penempatan antena atau VoIP yang dapat berakibat pada menurunnya lalu lintas suara pada jaringan pelanggan dan pemintaan ruang pada menara Perseroan.

Jumlah kewajiban Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan

Per tanggal 31 Desember 2024, total kewajiban Grup adalah sebesar Rp55.385.437 juta. Perjanjian kredit yang ada pada saat ini memperbolehkan Perseroan untuk menerima tambahan utang namun dengan pembatasan tertentu. Ketentuan pendanaan pada saat ini dan masa depan dapat mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dibatasi oleh beberapa pembatasan dan risiko seperti di bawah ini:

- Perseroan diharuskan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari aktivitas operasional untuk pembayaran utang, yang mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;

- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi fleksibilitas dalam perencanaan, respon terhadap perubahan pada kegiatan usaha dan industri penyewaan menara;
- Perseroan mungkin tidak dapat menerima pendanaan untuk akuisisi usaha dan proyek-proyek baru;
- Perseroan berada pada posisi yang lebih dirugikan dibandingkan dengan para kompetitor yang lebih sedikit menggunakan pembiayaan utang;
- Perseroan mungkin dapat memiliki pembatasan dalam hal pembayaran dividen; dan
- Kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan kas yang cukup untuk membayar utang atau kewajiban finansial lainnya yang berakibat pada gagal bayar sesuai dengan perjanjian utang
- Adanya salah satu kejadian di atas dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Mata uang Rupiah secara umum mudah ditukarkan dan dipindahkan (kecuali bank-bank di Indonesia yang tidak dapat memindahkan mata uang Rupiah ke rekening yang dikelola oleh bank di dalam atau luar Indonesia yang dimiliki oleh orang atau badan asing yang bukan ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau investasi). Di sisi lain, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi pada pasar nilai tukar mata uang dengan membeli atau menjual mata uang Rupiah atau menggunakan mata uang asing yang dimilikinya. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa mata uang Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berkelanjutan, tidak ada perubahan pada kebijakan nilai tukar mata uang mengambang dari Bank Indonesia, mata uang Rupiah tidak mengalami depresiasi terhadap mata uang lainnya (termasuk dolar Amerika Serikat), atau Pemerintah tidak akan mengambil langkah untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai dari mata uang Rupiah atau apabila salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan akan berhasil.

Perubahan kebijakan nilai tukar mata uang mengambang akan berakibat pada tingginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas dan pemberlakuan kontrol terhadap arus modal dan nilai tukar atau pemotongan bantuan keuangan oleh debitur multinasional. Hal ini dapat berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi, kegagalan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memenuhi kewajiban utangnya dan resesi ekonomi, gagal bayar pada pinjaman atau menurunnya permintaan pelanggan yang akan berakibat pada kesulitan untuk mendanai belanja modal dan implementasi strategi usaha Perseroan. Adanya salah satu kejadian tersebut di masa yang datang akan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak signifikan terhadap hasil operasional karena utang Perseroan didominasi oleh dolar Amerika Serikat dan penyajian akuntansi dan laporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Apabila mata uang Rupiah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk menyediakan berbagai jasa sehubungan dengan konstruksi, access management, perawatan dan keamanan Menara Telekomunikasi dan infrastruktur lainnya. Perseroan rentan terhadap risiko apabila jasa yang diberikan oleh kontraktorkontraktor pihak ketiga tidak memuaskan dan sesuai dengan harapan pelanggan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan, antara lain, risiko yang signifikan terhadap reputasi Perseroan, menanggung biaya tinggi untuk mengganti kerugian atas kecacatan atau kerusakan, menawarkan diskon yang besar kepada pelanggan Perseroan untuk dapat mempertahankan pelanggan tersebut, dan/atau dapat menyebabkan pelanggan yang tidak puas sehingga dapat mengakhiri atau tidak memperpanjang kontrak mereka dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

Risiko Investasi

Risiko investasi dapat timbul karena adanya fluktuasi tingkat suku bunga, biaya modal dan pembagian dividen terhadap nilai aset dalam portofolio perusahaan yang dimiliki Perseroan. Kegagalan dalam mengantisipasi risiko ini dapat menurunkan harga saham Perseroan.

Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat usaha Perseroan bergerak di bidang yang terpengaruh dengan adanya perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, seperti peraturan baru dalam perpajakan, hukum yang membatasi investasi dan kepemilikan perusahaan pada sektor menara. Selain itu terdapat pula kemungkinan adanya perubahan pada hukum dan peraturan daerah yang mempengaruhi perizinan dan lisensi pada sektor menara. Adanya perubahan dalam peraturan atau kebijakan Pemerintah secara material dan negatif mempengaruhi kinerja usaha dan prospek Perseroan.

Akhir-akhir ini, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang rencana lokasi menara dan pajak/retribusi atas menara. Dengan mengimplementasikan rencana penempatan lokasi menara, Pemerintah dapat merelokasi menara yang ada dan membongkar menara lainnya yang tidak terdapat pada rencana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat menarik pembayaran retribusi sebagai biaya jasa untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan untuk pihak swasta. Pemerintah daerah menghitung besaran pembayaran retribusi untuk PBG berdasarkan peraturan setempat. Rumus untuk menghitung pembayaran retribusi untuk PBG berbeda dari satu pemerintah daerah yang lain.

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama pada nilai tukar Rupiah ke Dolar Amerika Serikat karena Perseroan mempunyai utang dalam mata uang asing, sedangkan sebagian besar pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah.

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan

Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Pelaksanaan HMETD. Hal ini kemungkinan disebabkan antara lain oleh perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain; dan perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri pelayaran pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia.

2. Risiko terkait nilai tukar mata uang asing

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya dapat mempengaruhi jumlah mata uang asing yang diterima oleh investor asing pada saat konversi dividen tunai atau distribusi lain yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan, atau hasil Rupiah dari setiap penjualan saham Perseroan.

3. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga saham di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek juga dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

4. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, belanja modal, serta ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

5. Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

Tanggung jawab Perseroan, pemegang saham mayoritas Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain. Perseroan dan prinsip-prinsip hukum Perseroan, misalnya, legalitas tindakan yang diambil oleh Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham mayoritas, serta hak-hak pemegang saham minoritas diatur oleh hukum perusahaan dan Anggaran Dasar milik Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan yang diaudit KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen. No. 01791/2.1032/AU.1/10/0702-3/1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, berisi paragraf “Hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Riwayat Singkat

PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 11.25.1.64.00369, dengan Agenda Pendaftaran No. 462/BH-11.25/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 257 tanggal 26 Juni 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0170481 tanggal 10 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138815.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Juli 2024 ("**Akta No. 257/2024**") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 22 November 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia No. AHU-0075650.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253375.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024 ("**Akta No. 182/2024**").

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 19A, Kudus, Jawa Tengah dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA, lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

2) Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidangidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas perusahaan holding, dan konstruksi sentral telekomunikasi.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   i. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
      a) Menjalankan usaha konsultasi manajemen lainnya, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

         Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain;

      b) Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding, termasuk: kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan

      c) Menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi, termasuk: kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta

perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.

kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu: menjalankan aktivitas usaha-usaha lainnya, yang berkaitan dan/atau mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.

3) Dokumen Perizinan Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh zin-izin yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") (Perizinan Berusaha Berbasis Resiko) Kode KBLI: 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Klasifikasi Risiko: Rendah)	8120000940866 tanggal 6 September 2018, sebagaimana perubahan ketiga pada ke-1 tanggal 7 April 2022	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("**PKKPR**")	04062210213319034 tanggal 4 Juni 2022	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan akan terus berlaku selama fitur perpanjangan PKKPR belum tersedia
3.	PKKPR	04062210213319035 tanggal 4 Juni 2022	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan akan terus berlaku selama fitur perpanjangan PKKPR belum tersedia

Catatan:

1. Berdasarkan Lampiran NIB tanggal 19 Juni 2025, Perseroan telah memiliki Kantor Cabang Administrasi yang beralamat di Menara BCA Lantai 55 unit 5501, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. MH. Thamrin Nomor 1, RT 01/ RW 05, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Berdasarkan hasil konsultasi Perseroan dengan OSS pada tanggal 19 Mei 2025, bahwa dalam hal masa berlaku PKKPR telah berakhir maka Perseroan diwajibkan untuk menunggu fitur perpanjangan PKKPR dapat diakses. Oleh karena itu, apabila PKKPR yang dimiliki sudah habis masa berlakunya maka PKKPR yang dimiliki tetap dapat digunakan selama fitur perpanjangan PKKPR di OSS belum tersedia.

Seluruh perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan.

4) Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Susunan struktur permodalan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 182/2024. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2025, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sapta Adhikari Investama	26.764.246.165	267.642.461.650	52,46
- PT Dwimuria Investama Andalan	4.247.101.900	42.471.019.000	8,33
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)	19.025.385.281	190.253.852.810	37,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	**50.036.733.346**	**500.367.333.460**	**98,08**

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
- Saham Treasuri	977.891.654	9.778.916.540	1,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Setelah Saham Treasuri	**51.014.625.000**	**510.146.250.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**148.985.375.000**	**1.489.853.750.000**	

Hingga saat ini, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh secara tunai sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 01791/2.1032/AU.1/10/0702-3/1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 dan seluruh penyetoran modal tersebut digunakan untuk kepentingan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUPT, diatur bahwa modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Lebih lanjut, sebagaimana telah juga diatur dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT, yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Atas hal tersebut, maka Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 merupakan bukti penyetoran yang sah, sehingga masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

5) Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 23 April 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0204840 tanggal 24 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0088937.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 April 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	John Aristianto Prasetio
Komisaris	:	Ario Wibisono

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Direktur	:	Anita Anwar
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Indra Gunawan

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Kenny Harjo
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Akuntansi pada tahun 1980 dari University of Southern California di Amerika Serikat. Beliau juga memperoleh izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi pada tahun 1984 dari negara bagian Colorado dan negara bagian Montana di Amerika Serikat.

Riwayat Pendidikan

1980	:	Bachelor of Science dalam bidang Akuntansi, University of Southern California, Amerika Serikat

Riwayat Pekerjaan

2025 – sekarang	:	Perseroan, Komisaris Utama
2014 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Komisaris
2011 – 2025	:	Perseroan, Komisaris
2011 – 2014	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Komisaris Utama
2008 – 2011	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Direktur
2009 – 2021	:	Perseroan, Direktur
2004 – sekarang	:	PT Ecogreen Oleochemicals, Komisaris
2002 – 2004	:	PT Djarum, *Business Development Manager*
1990 – 2001	:	Dharmala Group, Deputi Direktur
1988 – 1989	:	PT Kalimantan Plantation Development, Deputi Kontroler
1985 – 1987	:	PT Marathon Petroleum Indonesia, Akuntan Senior
1981 -1983	:	Pricewaterhouse Coopers Pittsburgh, Amerika Serikat, Auditor



Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Doktor Filsafat (PhD) pada tahun 1998 dari Research School of Physical Science and Engineering, Australian National University, Canberra, Australia dan juga meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1977 dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi anggota Asian Control Professor Association (ACPA), International Federation of Automatic Control (IFAC) dan Institute of Electrical Engineering (IEEE).

Riwayat Pendidikan

1988	:	Doctor of Philosophy, Research School of Physical Sciences and Engineering, Australian National University, Canberra, Australia
1977	:	Sarjana Teknik, Insitut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pekerjaan

2019 – sekarang	:	Perseroan, Komisaris Independen
2021 – sekarang	:	PT Global Digital Niaga Tbk, Komisaris Independen
2021 – sekarang	:	PT Solusi Tunas Pratama Tbk, Komisaris Independen/ Utama
2017 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Komisaris Independen

2011 – sekarang	:	PT BFI Finance Tbk, Komisaris Utama
2010 – sekarang	:	PT Adaro Power, Wakil Komisaris Utama
2019 – 2023	:	Komatsu Ltd, International Advisory Board
2016 – 2024	:	PT Setiabudi Investment Management, Komisaris Utama
2016 – 2017	:	PT Iforte Solusi Infotek, Komisaris
2012 – 2014	:	PT Martina Berto Tbk, Komisaris
2012 – 2024	:	PT Tamaris Hydro Lestari, Komisaris
2004 – 2009	:	Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Menteri
2001 – 2004	:	Institut Teknologi Bandung, Sekretaris Rektor
1996 – 1999	:	Institut Teknologi Bandung, Direktur Pusat Penelitian Teknologi
1992 – 1995	:	PT Alas Buana Raya, Direktur
1977 – 2008	:	Institut Teknologi Bandung, Dosen



John Aristianto Prasetio
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1977 dari Universitas Indonesia dan juga meraih gelar Magister Manajemen di Program for Management Development dari Harvard Business School pada tahun 1988.

Riwayat Pendidikan

1988	:	Magister Manajemen, Program for Management Development, Harvard Business School, Amerika Serikat
1977	:	Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang	:	Perseroan, Komisaris Independen
2024 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Komisaris Independen
2023 – sekarang	:	PT Central Finansial X, Komisaris Utama
2024 – sekarang	:	PT Go To Gojek Tokopedia Tbk, Komisaris Independen
2019 – 2024	:	PT Lippo Karawaci Tbk, Presiden Komisaris
2017 – 2024	:	PT Bursa Efek Indonesia, Presiden Komisaris
2012 – 2017	:	Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Korea Selatan
2011 – sekarang	:	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), Sekretaris dan Anggota, Dewan Penasihat
2010 – sekarang	:	Crowe Indonesia, Senior Advisor
2005 – 2012	:	APEC Business Advisory Council (ABAC), Ketua
2004 – 2010	:	KADIN Indonesia, Anggota Komite Ekonomi Nasional dan Wakil Ketua Umum
2004 – 2005	:	Ernst & Young Asia Pacific, Senior Advisory Partner
2002 – 2004	:	Ernst & Young Indonesia, Chairman
1997 – 2002	:	Asia Pacific Chief Executive Officer/ Area Managing Partner, Andersen Worldwide
1988 – 1997	:	Prasetio Utomo, Executive Chairman



Ario Wibisono
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 1986 dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1985 dari Institut Teknologi Bandung.

Riwayat Pendidikan

1986	:	Magister Manajemen, Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
1985	:	Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung

Riwayat Pekerjaan

2011 – sekarang	:	Perseroan, Komisaris
2014 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Komisaris Utama
2009 – 2014	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Komisaris
2006 – 2007	:	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur Utama
1999 – 2006	:	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur
1996 – 1999	:	Peregrine Sewu Securities, Direktur
1996 – 1999	:	Peregrine Fixed Income Limited, Asisten Direktur

Direksi



Ferdinandus Aming Santoso
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1988 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Riwayat Pendidikan

1988	:	Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanegara

Riwayat Pekerjaan

2015 – sekarang	:	Perseroan, Direktur Utama
2019 – sekarang	:	PT Iforte Solusi Infotek, Direktur Utama
2015 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Direktur Utama
2013 – sekarang	:	PT Grand Indonesia, Komisaris
2012 – sekarang	:	PT Unitras Energy, Direktur
2011 – 2017	:	PT Cipta Karya Bumi Indah, Direktur Utama
2005 – 2018	:	PT BCA Sekuritas (sebelumnya bernama PT Dinamika Usaha Jaya), Komisaris Utama
2004 – 2013	:	PT Grand Indonesia, Direktur
2002 – 2004	:	Ernst & Young, Corporate Finance Division, *Partner*
1987 – 2002	:	Center for Investment & Business Advisory, Arthur Andersen Global Corporate Finance, *Partner*, *Business Advisor*



Anita Anwar
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Bachelor of Science (Honors) di bidang Business Management Marketing pada tahun 2002 dari University of Bradford, Inggris.

Riwayat Pendidikan

2002	:	Bachelor of Science (Honors) di bidang Business Management Marketing, University of Bradford

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	:	Perseroan, Direktur
2021 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Direktur
2012 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, *Chief Property Management*
2009 – 2012	:	PT Nokia Siemens Network Indonesia, *Project Director*
2008 – 2009	:	PT Nokia Siemens Network Indonesia, *Head of Business Operations*
2006 – 2008	:	PT Nokia Siemens Network Indonesia, *Property Manager*
2004 – 2006	:	HSR International Realtors Pte Ltd, Singapura *Property/Listing Manager*
2002 – 2003	:	Wing Tai Holdings Limited Singapore, *Marketing Coordinator*



Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1996.

Riwayat Pendidikan

1996	:	Magister Manajemen, Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta, Indonesia
1994	:	Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta, Indonesia

Riwayat Pekerjaan

2015 – sekarang	:	Perseroan, Direktur
2022 – sekarang	:	PT Solusi Tunas Pratama Tbk, Komisaris
2015 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, *Director and Chief of Enterprise Support Management*
2014 – 2015	:	PT Lippo Karawaci Tbk, Kepala Bagian Pajak
2002 – 2014	:	PT Grand Indonesia, General Manajer Keuangan & Akuntansi
1996 – 2002	:	Pricewaterhouse Coopers Jakarta, *Senior Associate*



Indra Gunawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 1997, Magister Ekonomi pada tahun 2005 dari Universitas Indonesia. Beliau juga memperoleh gelar Doktor di bidang Bisnis dan Manajemen pada tahun 2013 dari Universitas Padjajaran, Bandung. Saat ini beliau juga aktif mengajar sebagai Dosen pada Program Magister Manajemen.

Riwayat Pendidikan

2013	:	Doktor Bisnis dan Manajemen, Universitas Padjajaran, Indonesia
2005	:	Magister Ekonomi, Universitas Indonesia, Indonesia
1997	:	Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia

Riwayat Pekerjaan

2018 – sekarang	:	Perseroan, Direktur
2018 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Direktur
2013 – 2018	:	Perseroan, Direktur Independen
2008 – 2012	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, *Vice President of Inter-Carrier and External Relations*
2003 – 2008	:	Perseroan, *General Manager of Operations*
1997 – 2003	:	Siemens Indonesia, *Engineering Project Controller, Group Leader of Product Management*

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik individu.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

6) Tata Kelola Perusahaan

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi teranggal 4 Agustus 2022, Perusahaan mengangkat Monalisa Irawan untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Berikut ini adalah profil dari Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Monalisa Irawan
Sekretaris Perusahaan

Warga negara indonesia, 41 tahun. Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2004. Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau menjabat sebagai Head of Corporate Legal & Corporate Secretary Division PT Astra Internasional Tbk. Beliau juga menjabat sebagai legal consultant di Hendra Soenardi tahun 2004, dengan jabatan terakhir sebagai partner.

Keterangan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Alamat	:	Menara BCA, lantai 55 Jl. MH Thamrin No.1 – Jakarta 10310
Nomor Telepon	:	(021) 2358 5500
Surat Elektronik	:	corpsec@ptsmn.co.id

Perseroan telah mengangkat Monalisa Irawan sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan POJK No. 35/2014.

KOMITE AUDIT

Per 31 Desember 2024, komposisi Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) di antaranya menjabat sebagai ketua yang merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria keahlian dan independensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Juni 2024, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Kusmayanto Kadiman
Anggota	:	Edy Sugito
Anggota	:	Adi Vithara Purba

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Kusmayanto Kadiman

Profil lengkap beliau telah disajikan pada sub bab 5) Pengurus dan Pengawasan.

Edy Sugito

Warga negara Indonesia, 59 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1991. Saat ini beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Independen pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (2012-sekarang), Komisaris Independen pada PT Wismilak Inti Makmur Tbk (2012-sekarang), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (2013-sekarang), Komisaris Utama/Independen pada PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (2013-sekarang), Komisaris Independen PT Madusari Murni Indah Tbk (2024-sekarang) dan Anggota Komite Audit PT BFI Finance Indonesia Tbk (2016-sekarang). Beliau telah berpengalaman lebih dari 37 tahun di bidang keuangan dan industri pasar modal.

Adi Vithara Purba

Warga negara Indonesia, 44 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 2004, Magister jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur di PT Mulia Investasi. Beliau telah berpengalaman lebih dari 16 tahun melakukan konsultasi di bidang berbagai industri. Beliau adalah anggota dari Global Association of Risk Professional (GARP).

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria keahlian dan independensi yang dipersyaratkan dalam POJK No. 55/2015.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perusahaan telah mengangkat Kepala Unit Audit Internal berlandaskan Surat Pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal Perseroan tanggal 22 Agustus 2017 mengenai pengangkatan Kepala Departmen Audit Internal Perseroan yaitu Haryo Dewanto, yang pengangkatannya telah sesuai POJK No. 56/2015.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Kepala Unit Audit Internal:

Haryo Dewanto

Warga negara Indonesia, 58 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Diponegoro pada tahun 1990. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar di Indonesia yang berpengalaman sebagai Finance Controller di Grup Ascott, yang bergerak di bidang manajemen properti yang berpusat di Singapura dari 1999–2005. Beliau bergabung dengan Perusahaan di 2007 sebagai Corporate Controller dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Kepala Audit Internal. Beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun pada perusahaan multinasional di bagian perencanaan, akuntansi dan pengawasan. Beliau juga merupakan anggota Komite Audit padaPerusahaan Indodana Multi Finance.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen (Ketua), dan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar yang berasal dari luar Perusahaan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan per tanggal 31 Desember 2024:

Ketua	:	Kusmayanto Kadiman
Anggota	:	Ario Wibisono
Anggota	:	Doni Kusuma

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Kusmayanto Kadiman

Profil lengkap beliau telah disajikan pada sub bab 5) Pengurus dan Pengawasan.

Ario Wibisono

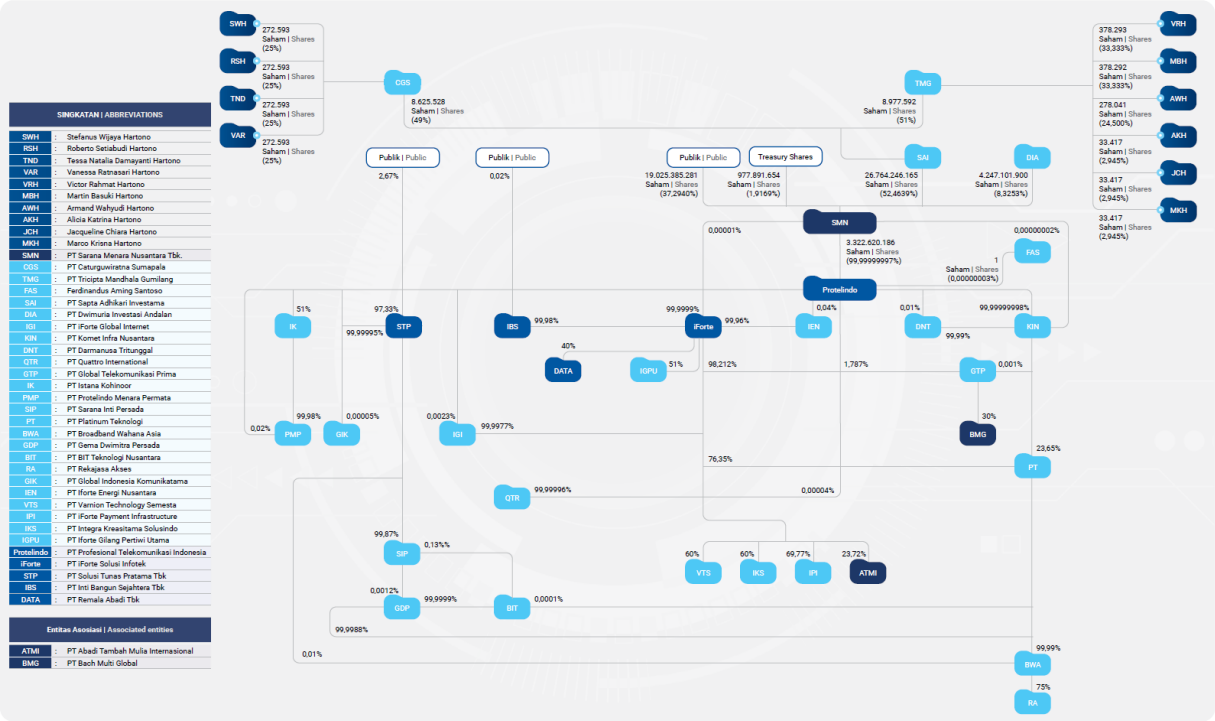
Profil lengkap beliau telah disajikan pada sub bab 5) Pengurus dan Pengawasan.

Doni Kusuma

Warga negara Indonesia, 46 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2008 dari Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS. Beliau memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman dalam kompensasi, remunerasi, manfaat/ tunjangan, dan hubungan industrial. Beliau bergabung dengan Protelindo pada tahun 2008 sebagai Asisten Sumber Daya Manusia (2008–2009). Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs Perusahaan dan Protelindo. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan program kompensasi dan program tunjangan, sistem personalia, Peraturan Perusahaan, komunikasi karyawan, program retensi dan program pengembangan serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum bergabung dengan Protelindo, beliau bekerja dengan General Electric Finance Indonesia selama enam tahun (2000–2006), dan dari tahun 2006 hingga 2008, beliau bekerja pada beberapa perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia.

7) Struktur Hubungan Kepemilikan Saham Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan:



Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Sapta Adhikari Investama ("**SAI**") dengan penerima manfaat langsung (*beneficial owner*) Perseroan yaitu Victor Rachmat Hartono dan Martin Basuki Hartono.

Berikut ini hubungan kepengurusan dan pengawasan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan saham di atas 20%:

No.	Nama	Jabatan	
		Perseroan	SAI
1.	Grace Tin Tin Sennelius	-	Komisaris Utama
2.	Martin Basuki Hartono	-	Komisaris
3.	Agus Santoso Suwanto	-	Direktur
4.	Heru Budijanto Prabowo	-	Direktur Utama
5.	Ario Wibisono	Komisaris	-
6.	Kenny Harjo	Komisaris Utama	-
7.	John Aristianto Prasetio	Komisaris Independen	-
8.	Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen	-
9.	Ferdinandus Aming Santoso	Direktur Utama	-
10.	Anita Anwar	Direktur	-
11.	Eko Santoso Hadiprodjo	Direktur	-
12.	Indra Gunawan	Direktur	-

8) Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

SAI

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 19A, Kudus, Indonesia
No. Telepon : +62 291 431902

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan perubahannya

Berikut ini adalah keterangan singkat tentang pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum:

SAI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kudus, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas no. 3, tanggal 4 Juni 2014, dibuat di hadapan LINDAWATI, S.H., Notaris di Kabupaten Kudus. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11726.40.10.2014 tanggal 5 Juni 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-11726.40.10.2014 Tanggal 5 Juni 2014.

Anggaran Dasar SAI telah mengalami beberapa kali pengubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa no. 312 tanggal 13 Desember 2024 dibuat di hadapan MARIA CITRA TANIA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar; dan Modal Ditempatkan dan Disetor, yang telah disetujui Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-0081515.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Desember 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0272243.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Desember 2024; dan yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0221620 tanggal 13 Desember 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0272243.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Desember 2024 ("**Akta No. 312/2024**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham no. 4 tanggal 18 Maret 2020, dibuat di hadapan DANIEL, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0023888.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Maret 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055097.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Maret 2020 ("**Akta No.4/2020**"), maksud dan tujuan SAI adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
1) Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
    i. Aktivitas perusahaan holding, yang mencakup- kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan;
    ii. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan- dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan,pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

c. Susunan Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham no. 27 tanggal 16 April 2025, dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta Pusat, diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan no. AHU-AH.01.09-0191461 tanggal 16 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0082486.AH.01.11TAHUN 2025 tanggal 16 April 2025, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Grace Tin Tin Sennelius
Komisaris	:	Martin Basuki Hartono

Direksi

Direktur Utama	:	Heru Budijanto Prabowo
Direktur	:	Agus Santoso Suwanto

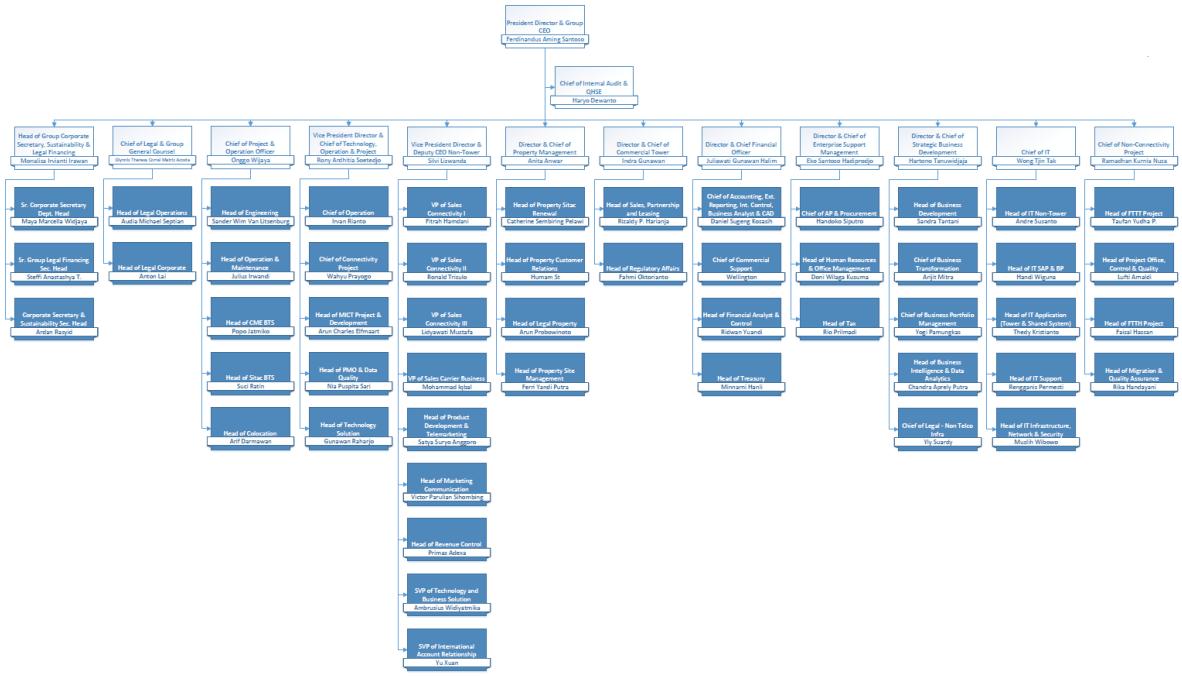
d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini, susunan pemegang saham SAI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 312/2024, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000**	**20.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Tricipta Mandhala Gumilang	9.652.832	9.652.832.000.000	51
- PT Caturguwiratna Sumapala	9.274.288	9.274.288.000.000	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**18.927.120**	**18.927.120.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.072.880**	**1.072.880.000.000**	

9) Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan:



10) Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 2.744 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut pendidikan, usia, jabatan, jenis kelamin, dan status kepegawaian:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
S2	63	38	101	54	32	86
College	1.474	861	2.335	1.353	772	2.125
SLTA Sederajat	267	35	302	247	37	284
SMP Sederajat	6	-	6	5	-	5
Total	**1.810**	**934**	**2.744**	**1.659**	**841**	**2.500**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
<20 tahun	-	-	-	-	-	-
20 - 30 tahun	439	361	800	436	354	790
31 - 40 tahun	725	382	1.107	675	348	1.023
41 - 50 tahun	567	166	733	488	123	611
>50 tahun	79	25	104	60	16	76
Total	**1.810**	**934**	**2.744**	**1.659**	**841**	**2.500**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Keterangan	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Chief & VP	37	13	50	37	15	52
General Manager	67	31	98	56	23	79
Senior Manager & Manager	293	98	391	262	96	358
Non-Manager	1.413	792	2.205	1.304	707	2.011
Total	**1.810**	**934**	**2.744**	**1.659**	**841**	**2.500**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Laki-laki	1.810	1.659
Perempuan	934	841
Total	**2.744**	**2.500**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Permanen	1.234	629	1.863	1.172	575	1.747
Kontrak	576	305	881	487	266	753
Total	**1.810**	**934**	**2.744**	**1.659**	**841**	**2.500**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa tenaga kerja asing. Berikut adalah komposisi tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh Perseroan:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Passport	RPTKA	Masa Berlaku RPTKA	E-ITAS	Masa Berlaku ITAS
1.	Stephen Duffus Weiss*)	*Wakil Direktur Utama*	Amerika Serikat	548510457	RPTKA No. B.3/60712/PK.04.00/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 – PT SARANA MENARA NUSANTARA RPTKA B.3/69497/PK.04.00/XI/2024 tanggal 4 November 2024 – PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	30 November 2025 31 Januari 2026	E232C1200E1240972590	11 November 2025
2.	Gylnnis Theresa Corral Matriz Acosta	*Quality Control Advisor*	Filipina	P1514868B	RPTKA No. B.3/67530/PK.04.00/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023	30 November 2025	2C21JE6352-A	18 Juni 2025
3.	Sander Wim Van Litsenburg	*Research & Development Advisor*	Belanda	NX1CB1588	RPTKA No. B.3/67530/PK.04.00/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023	30 November 2025	2C2IJE3210AA	13 November 2025
4.	Xuan Yu	*Planning Construction Specialist*	Republik Rakyat Cina	E08589755	RPTKA No. B.3/00733/PK.04.00/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 – PT IFORTE SOLUSI INFOTEK	31 Maret 2026	E232C1200JE250794365	09 Februari 2026
5.	Arijit Mitra	*Network Expert Advisor*	India	Z6335780	RPTKA No. B.3/32486/PK.04.00/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024	31 Agustus 2025	2C21JE0147AA	30 Agustus 2025

**) Pada tanggal Prospektus ini, Stephen Duffus Weiss sudah tidak menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 23 April 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Bapak Stephen Duffus Weiss saat ini menjabat sebagai Advisor Perseroan.*

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

11) Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, arbitrase dan perpajakan, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk rencana PMHMETD I Perseroan.

Adapun pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Protelindo sedang menghadapi atau terlibat dalam perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang tidak secara material dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Protelindo dengan perincian sebagai berikut:

- **Gugatan Tata Usaha Negara – Klasifikasi Perizinan – (Register Perkara No. 18/G/2023/PTUN.DPS.)**

  Pada tanggal 29 Agustus 2023, Protelindo mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar kepada Bupati Badung, sehubungan dengan tindakan Pemerintah Kabupaten Badung yang tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung atas izin tower telekomunikasi milik Protelindo pada daerah tersebut.

  Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini pada tahap peninjauan kembali.

  Berdasarkan Pernyataan Protelindo, tidak terdapat potensi kerugian material Protelindo dalam perkara sebagaimana disebutkan diatas, dimana Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2023 yang pada intinya pengajuan permohonan perizinan bangunan gedung yang diajukan oleh Protelindo tidak dapat diproses oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Sehingga, keterlibatan Protelindo dalam perkara tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Protelindo secara negatif material serta tidak akan mempengaruhi rencana PMHEMTD I, termasuk Rencana Penggunaan Dana.

- **Gugatan Tata Usaha Negara – Klasifikasi Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual – (Register Perkara No. 20/G/TF/2023/PTUN.DPS.)**

  Pada tanggal 29 Agustus 2023, Protelindo yang selanjutnya disebut **"Penggugat I**" dan IForte yang selanjutnya disebut "**Penggugat II**" (Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut "**Para Penggugat**"), mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar kepada Bupati Badung selanjutnya disebut "**Tergugat I**" dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut "**Tergugat II**" sehubungan dengan pembongkaran bangunan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Para Penggugat di wilayah Kabupaten Badung yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II.

  Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini pada tahap kasasi.

  Berdasarkan Pernyataan Protelindo, tidak terdapat potensi kerugian Protelindo dalam perkara sebagaimana disebutkan diatas, dimana kapasitasnya sebagai Penggugat yang dirugikan atas bangunan menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Protelindo yang dibongkar seluruhnya oleh Bupati Badung. Sehingga, keterlibatan Protelindo dalam perkara tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Protelindo secara negatif material serta tidak akan mempengaruhi rencana PMHEMTD I, termasuk Rencana Penggunaan Dana.

- **Perkara Perpajakan (Nomor Sengketa Pajak: 007403.15.2022/PP)**
  Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Protelindo terlibat dalam perkara perpajakan sesuai dengan nomor sengketa pajak sebagaimana tertulis di atas, yang mana statusnya adalah sedang dalam proses banding oleh Protelindo berdasarkan Tanda Terima Surat Banding No. T-007403.15.2022/PAN/2022 tanggal 28 Juli 2022.

  Berdasarkan Pernyataan Protelindo, perkara ini masih dalam proses menunggu Putusan Banding dari Pengadilan Pajak.

- **Perkara Perpajakan (Nomor Sengketa Pajak: 002570.15/2022/PP)**
  Protelindo terlibat dalam perkara perpajakan sesuai dengan nomor sengketa pajak sebagaimana tertulis di atas, yang mana statusnya adalah sedang dalam proses banding oleh Protelindo berdasarkan Tanda Terima Surat Banding No. T-002570.15.2022/PAN/2022 tanggal 21 Maret 2022.

  Berdasarkan Pernyataan Protelindo, perkara ini masih dalam proses menunggu Putusan Banding dari Pengadilan Pajak.

Keterlibatan Protelindo dalam perkara-perkara tersebut di atas tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Protelindo secara negatif material serta tidak akan mempengaruhi rencana PMHMETD I Perseroan, termasuk Rencana Penggunaan Dana, hal ini dengan mengingat potensi kerugian Protelindo atas gugatan tersebut di atas adalah kurang dari 1% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak, baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak,baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, perpajakan dan arbitrase, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia,termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk rencana PMHMETD I Perseroan.

12) Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Lain

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain perjanjian PPAS dan PPSS, Perseroan tidak memperoleh dan menandatangani perjanjian utang/fasilitas serta tidak terdapat perjanjian dengan pihak ketiga dan/atau dengan pihak afiliasi yang mengikat Perseroan.

13) Aset yang dimiliki Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki atau menguasai asset tetap ataupun aset bergerak, selain inventaris kantor Perseroan.

14) Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2008 di Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 2 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-37840.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008.

Fokus utama bisnis Perseroan adalah berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengoperasian lokasi-lokasi menara telekomunikasi untuk disewakan kepada perusahaan komunikasi nirkabel.

Investasi utama Perseroan adalah berupa kepemilikan 99,99% saham di PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang dimiliki sejak tahun 2008. Karena kegiatan usaha Perseroan dijalankan sebagian besar oleh Protelindo, penjelasan bisnis Perseroan akan difokuskan pada aset-aset dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Protelindo.

Didirikan pada tahun 2003, Protelindo merupakan pemilik dan operator menara independen terbesar untuk perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2024, secara konsolidasi, Protelindo telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 35.400 lokasi menara telekomunikasi sekitar dari 58.035 penyewa di Indonesia, terutama di area Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Kegiatan usaha utama Protelindo adalah penyewaan ruang untuk lokasi menara yang dapat digunakan bersama kepada seluruh operator nirkabel besar di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara dimana para pelanggan dapat memasang antena frekuensi

radio dan antena microwave, dan juga ruang lahan untuk setiap lokasinya untuk penempatan shelter dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Portofolio menara Protelindo merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia dan terluas secara geografis.

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Pertumbuhan portofolio menara mendorong Perusahaan untuk mencapai tonggak yang signifikan di dalam industri, mengingat Perusahaan telah menjadi perusahaan menara independen pertama di Indonesia yang memiliki dan mengoperasikan portofolio sekitar 35.400 lokasi menara dengan sekitar 58.035 penyewa serta sekitar 217.507 km jaringan fiber optik di seluruh Indonesia yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi, dan 163.347 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di seluruh Indonesia serta jaringan backbone kabel serat optik yang menghubungkan Jawa, Bali, Batam dan Singapura dan juga memiliki lebih dari 16.898 aktivasi connectivity dan juga memiliki 169.242 *fiber to the home* (*home connect).*

Protelindo beroperasi secara independen dari operator komunikasi nirkabel dan memiliki pelanggan yang beragam. Para pelanggan utama Perusahaan mencakup operator telekomunikasi besar di Indonesia, yaitu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Indosat Tbk (Indosat), dan PT Smartfren Telecom, Tbk (Smartfren).

Pada tahun 2015, Perseroan, melalui Protelindo mulai masuk ke dalam bisnis non-tower dengan berinvestasi pada PT Iforte Solusi Infotek yang menyediakan layanan fiber optik yang menghubungkan antar menara telekomunikasi (*fiber-to-the-tower)* dan layanan konektivitas melalui jaringan fiber optik (termasuk *fiber-to-the home*), jaringan nirkabel dan VSAT. Investasi pada bisnis non-tower ini bersinergi dan melengkapi dengan fokus bisnis utama Protelindo dalam penyewaan menara telekomunikasi.

VISI dan MISI Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

Menjadi Penyedia Multi Layanan Telekomunikasi dan Infrastruktur Terkemuka dan Inovatif.

MISI

Berkolaborasi Dengan Pelanggan Perseroan untuk Memberikan Nilai Tambah Layanan yang Unggul.

Kegiatan Usaha

Bidang usaha utama Perseroan sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 158 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas perusahaan holding dan konstruksi sentral telekomunikasi.

Fokus operasi Perseroan saat ini adalah melakukan aktivitas perusahaan *holding* dengan entitas anak utama, yaitu Protelindo, STPdan iForte. Protelindo dan STP bergerak dalam bidang penyewaan menara telekomunikasi sementara iForte bergerak terutama dalam penyediaan layanan fiber optik dan konektivitas. Secara keseluruhan Grup Perseroan menyediakan infrastruktur digital bagi para klien untuk mengoperasikan layanan telekomunikasi, baik melalui menara telekomunikasi, fiber optik (*Fiber to the Tower* atau *FTTT* dan *Fiber to the Home* atau *FTTH*), jaringan nirkabel maupun VSAT. Dalam menyediakan infrastruktur digital tersebut, secara umum Perseroan memiliki ketentuan yang didasarkan pada kontrak sewa jangka panjang yang umumnya berlaku 10 tahun untuk segmen bisnis menara telekomunikasi, dan dapat berlaku lebih panjang untuk segmen bisnis fiber optik.

Saat ini, sumber pendapatan usaha Perseroan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu dari penyewaan menara, berupa kontrak-kontrak build to suit dan kolokasi pada menara yang telah dibangun, penyediaan jaringan fiber optik melalui FTTT dan dari layanan konektivitas melalui jaringan fiber optik (FTTH), nirkabel maupun VSAT untuk klien-klien B2B (*Business to Business*) maupun B2G (*Business to Government*).

Tinjauan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terus meningkat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,95% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ini didorong oleh beberapa sektor utama yaitu: Industri Pengolahan: Sebagai kontributor terbesar, sektor ini tumbuh sebesar 4,5%, didukung oleh peningkatan produksi manufaktur dan ekspor produk olahan; Perdagangan Besar dan Eceran: Mencatat pertumbuhan 4,8%, sektor ini diuntungkan oleh meningkatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat; Informasi dan Komunikasi: Dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 9,3%, sektor ini terus berkembang seiring dengan digitalisasi dan penetrasi internet yang semakin luas; serta Pengeluaran dan Konsumsi.

Sedangkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 2,8%, berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Industri informasi dan komunikasi tetap membukukan pertumbuhan secara konsisten di zona positif. Secara umum pertumbuhan industri informasi dan telekomunikasi selalu mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan permintaan di industri telekomunikasi Indonesia melaju seiring dengan pergeseran budaya komunikasi telepon di Indonesia dalam satu dekade terakhir, yaitu dari penggunaan teknologi telekomunikasi telepon kabel menjadi teknologi komunikasi tanpa kabel.

Sektor informasi dan teknologi yang tumbuh 9.3% selama tahun 2024, melebihi perkiraan pemerintah sebelumnya di 8.0%. Khususnya untuk periode 2024-2029, pemerintah telah menetapkan penguatan transformasi digital sebagai salah satu strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan sektor informasi dan teknologi dapat terus tumbuh untuk tahun-tahun mendatang.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. APJII menyatakan bahwa penetrasi internet diukur berdasarkan persentase penduduk yang menggunakan internet dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Angka ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana teknologi digital telah diadopsi oleh masyarakat. Survei APJII menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat secara konsisten. Pada tahun 2018, tingkat penetrasi internet tercatat sebesar 64,80%. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2019–2020, dengan penetrasi mencapai 73,70%. Angka ini terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 77,01% pada 2021–2022. Tren ini berlanjut dengan peningkatan menjadi 78,19% pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 79,50% pada tahun 2024.

Selain itu, APJII juga menyatakan bahwa peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia terjadi secara konservatif seiring dengan meningkatnya kepemilikan smartphone di kalangan masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kepemilikan telepon selular telah mencapai 354 juta di akhir 2023 dengan kepemilikan smartphone mencapai 209 juta.

Dengan adanya peningkatan penggunaan internet seiring dengan perkembangan digitalisasi yang pesat sejak pandemi, maka keberadaan industri pendukung penyedia infrastruktur telekomunikasi yakni pengelola menara telekomunikasi sangat dibutuhkan. Konsolidasi yang terjadi dalam industri telekomunikasi Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini juga membuat industri telekomunikasi menjadi lebih sehat sehingga dapat mendukung pertumbuhan menara telekomunikasi.

Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu berusaha untuk beroperasi secara efisien, mengelola modal kerja secara hati-hati agar dapat meningkatkan margin profitabilitasnya. Perseroan juga selalu berupaya menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan menjalankan kegiatan operasional yang berkelanjutan.

Strategi Perseroan adalah *Build-Buy-Return*, yaitu mengembangkan bisnis Perseroan melalui pertumbuhan organik dan melalui akuisisi perusahaan/aset lain yang bersinergi dengan Perseroan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal pagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Untuk menjalankan strateginya, Perseroan mentargetkan imbal hasil keuangan yang optimal di atas biaya keuangan. Perseroan memiliki akses pendanaan yang baik didukung oleh kinerja keuangan dan posisi neraca yang sehat sehingga Perseroan dapat memperoleh biaya pendanaan yang bersaing.

Pertumbuhan Organik

Perseroan berusaha memaksimalkan imbal hasil atas portofolio menara telekomunikasi yang telah dimiliki melalui strategi sewa kolokasi, yaitu menyewakan ruang yang tersedia di menara yang ada ke beberapa penyewa sekaligus. Dengan strategi kolokasi, biaya pengoperasian menara sebagian besar tetap, tetapi pendapatan Perseroan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penyewa. Strategi "asset-light" yang diterapkan oleh para operator telekomunikasi mendukung strategi kolokasi ini. Perseroan secara aktif memasarkan kolokasi ke para operator telekomunikasi dan terus mengedukasi pasar mengenai manfaat yang ditawarkan kolokasi kepada para operator telekomunikasi.

Selain melalui kolokasi, Perseroan juga terus menambah jumlah menara telekomunikasi melalui pembangunan menara baru untuk memperluas jaringan portofolionya. Menara-menara telekomunikasi baru yang dibangun oleh Perseroan seluruhnya berdasarkan permintaan dari para operator telekomunikasi sesuai dengan spesifikasi desain yang mereka butuhkan dan pada lokasi yang mereka pilih (atau yang disebut dengan menara Built-To-Suit). Hingga saat ini, Perseroan telah membangun 13.204 menara Built-To-Suit.

Operator telekomunikasi tersebut kemudian akan menjadi *anchor* tenant di menara ini berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Selanjutnya, Perseroan dapat memasarkan menara baru tersebut ke operator lain untuk memperoleh pendapatan kolokasi sehingga dapat meningkatkan utilisasi aset Perseroan.

Di segment non-tower, Perseroan membangun jaringan fiber optik yang menghubungkan menara-menara telekomunikasi. Sama seperti di bisnis penyewaan menara, jaringan fiber optik tersebut juga dapat dipakai lebih dari satu operator telekomunikasi. Selanjutnya jaringan fiber optik yang telah dibangun juga digunakan oleh Perseroan untuk menyediakan layanan konektivitas bagi para pelanggan yang berada di area jaringan fiber optik yang sudah dibangun tersebut sehingga semakin meningkatkan efisisensi penggunaan aset Perseroan.

Pertumbuhan Melalui Akuisisi

Perseroan senantiasa mengeksplorasi akuisisi strategis yang memenuhi kriteria pengembalian optimal dan yang dapat bersinergi dengan bisnis Perseroan sehingga membantu Perseroan berkembang ke area baru dalam layanan yang terkait dengan infrastruktur telekomunikasi.

Perseroan mengevaluasi peluang akuisisi berdasarkan beberapa kriteria, antara lain pengembalian modal yang diinvestasikan, potensi permintaan kolokasi, tingkat tumpang tindih/overlap dengan portofolio yang ada, lokasi, utilisasi kapasitas yang ada, kepadatan penduduk lokal dan potensi pertumbuhan serta hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan terus mencari cara melaksanakan peluang akuisisi dengan opsi yang paling efisien, termasuk mengoptimalkan struktur permodalan.

Fokus Terhadap Kualitas Layanan

Perseroan percaya bahwa kunci keberhasilan strategi Perseroan terletak pada kemampuan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi dan secara konsisten memenuhi kebutuhan mereka. Perseroan selalu berusaha untuk menawarkan komitmen komersial yang masuk akal dan menyediakan layanan yang berkualitas. Perseroan percaya bahwa kemampuannya untuk membantu operator telekomunikasi dengan cepat memasuki wilayah operasional baru dan memperluas jangkauan dan kapasitas jaringan mereka akan membantu meningkatkan *tenancy ratio* pada portofolio menara Perseroan.

Kenali Pelanggan Anda

Perseroan menggunakan teknik penjualan dan pemasaran yang ditargetkan untuk meningkatkan *tenancy ratio* di menaranya, yang sebagian besar dibangun untuk dapat mengakomodasi dua atau lebih penyewa. Oleh karena itu, Perseroan berusaha menargetkan operator telekomunikasi yang berencana untuk memperluas secara geografis atau memperbaiki infrastruktur jaringan mereka.

Perseroan percaya bahwa dengan memperdalam pemahaman atas kebutuhan pelanggan Perseroan (*know your customer*), Perseroan dapat melayani pelanggan dengan lebih baik dan membantu operator telekomunikasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.

Penggabungan pengetahuan pasar dan kemampuan pemasaran Perseroan juga terlihat dari upaya Perseroan menawarkan layanan jaringan fiber optik antara menara telekomunikasi kepada operator telekomunikasi untuk mendukung transmisi yang lebih optimal dalam pengimplementasian 4G-LTE. Implementasi strategis disertai jangkauan layanan Perseroan yang luas memungkinkan Perseroan untuk memperdalam pemahaman atas kebutuhan pelanggan Perseroan dan memenuhi kebutuhan bisnis mereka yang dinamis.

Kebijakan Keuangan dengan Fokus Pada Sustainability

Perseroan menerapkan kebijakan keuangan yang berhati-hati dan senantiasa memperhatikan aspek keberlanjutan jangka menengah dan jangka panjang, antara lain melalui pengelolaan utang pada tingkat yang wajar dan menerapkan investasi modal yang disiplin. Perseroan berusaha untuk selalu beroperasi dengan efisien, mengelola modal kerjanya secara optimal dan meningkatkan margin dan profitabilitasnya. Selain itu Perseroan juga akan menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan menjalankan kegiatan operasional yang berkelanjutan.

Pemasaran

Setiap operator telekomunikasi memiliki strategi pemasaran yang spesifik. Perseroan senantiasa berusaha memperoleh data terkini mengenai jaringan operator telekomunikasi dan rencana perluasan bisnis mereka melalui pertemuan secara teratur dengan tim desain jaringan dari masing-masing operator telekomunikasi untuk memahami kebutuhan mereka. Selanjutnya, dengan menggunakan program tertentu, Perseroan melakukan analisa untuk dapat melihat menara telekomunikasi yang berada di area yang sesuai dengan jaringan rencana perluasan operator telekomunikasi sehingga Perseroan dapat memberikan informasi yang relevan kepada operator tersebut.

Prospek Usaha

Grup adalah pemilik dan operator independen dari infrastruktur telekomunikasi yang mencakup menara telekomunikasi, kabel optik dan VSAT di Indonesia. Pada 31 Desember 2024, Grup memiliki dan mengoperasikan 35.400 Menara Telekomunikasi yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 58.035 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Grup memiliki sekitar 217.507 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi yang terletak di Jawa dan Sumatra, dan 118.265 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya serta jaringan backbone kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali dan juga memiliki lebih dari 16.898 aktivasi connectivity.

Kegiatan usaha utama Grup adalah bergerak dalam bidang penyewaan infrastruktur telekomunikasi. Dalam segmen penyewaan Menara Telekomunikasi, Grup menjalankan kegiatan usahanya Grup menyewakan ruang pada Menara Telekomunikasi milik Grup kepada para operator telekomunikasi berdasarkan kontrak jangka panjang. Ruang yang disewakan ini mencakup ruang vertikal pada menara dimana operator telekomunikasi dapat memasang antena frekuensi radio (*Radio Frequency*) dan antena gelombang pendek (*microwave*), serta menyewa lahan tanah pada setiap lokasi untuk pendirian shelters yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik.

Pada segmen penyewaan jaringan -kabel optik, Grup menyediakan infrastruktur telekomunikasi kabel optik untuk disewa pengguna dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi mereka. Kabel optik yang dimiliki Grup dapat disewakan dalam kontrak *Build to Suit Fiber* (BTS) untuk FTTT (*Fiber to The Tower*), FTTH (*Fiber To The Home*) serta solusi Connectivity yang biasanya dilakukan tanpa BTS untuk klien-klien korporasi, UMKM, data center dan lain lain.

Saat ini, portofolio Menara Telekomunikasi dan kabel optik yang dimiliki Grup merupakan portofolio yang terbesar yang dimiliki oleh penyedia infrastruktur telekomunikasi independen di Indonesia, dengan umur rata-rata sekitar 6,5 tahun dan lebih muda lagi untuk aset kabel optik dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan lokasi yang luas ini memungkinkan Grup untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi. Ditambah lagi

kemampuan Grup melalui Entitas Anak untuk menyediakan jaringan kabel serat optik untuk fiberisasi menara, memberi Grup peluang usaha baru dari sumber yang berbeda-beda.

Jumlah portofolio Menara Telekomunikasi dan pelanggan Grup juga memiliki potensi pertumbuhan melalui penambahan kontrak sewa atas menara yang sudah ada (kolokasi) maupun atas menara yang baru. Per 31 Desember 2024, rasio sewa/tenancy ratio Menara Telekomunikasi Grup mencapai 1,64x.

Grup Perseroan tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel manapun. Posisi Grup Perseroan sebagai pemilik dan operator Menara Telekomunikasi yang independen merupakan keuntungan yang signifikan, karena pelanggan Grup Perseroan mungkin merasa enggan untuk menyewa menara dari kompetitornya dan karenanya lebih memilih untuk menyewa menara atau infrastruktur dari penyedia independen. Selain itu, Grup Perseroan yakin dapat memberikan layanan yang lebih terarah dan jasa dengan spesialisasi tanpa memihak terhadap operator telekomunikasi tertentu. Lebih lanjut, model bisnis Grup Perseroan yang antara lain bertumbuh baik secara organik ataupun anorganik melalui akuisisi baik aset maupun perusahaan, memungkinkan Grup Perseroan tidak hanya memperbesar portofolio Menara Telekomunikasi Grup Perseroan namun juga dapat mediversifikasi layanan atau jasa lainnya yang telah terbukti menunjang atau berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan Grup Perseroan.

Grup Perseroan juga berkomitmen untuk berinvestasi mengembangkan jaringan kabel serat optik yang semakin dibutuhkan untuk koneksi yang cepat seiring dengan peningkatan permintaan atas layanan data internet dan diperkirakan akan terus bertumbuh seiring dengan kebutuhan untuk jangkauan jaringan 4G-LTE yang lebih luas.

Bisnis model Grup Perseroan, baik untuk Menara Telekomunikasi maupun jaringan kabel optik untuk fiberisasi menara bersifat jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan. Selain itu, kemungkinan kolokasi dengan biaya yang relatif rendah memberi potensi peningkatan pendapatan dan pengembalian atas hasil investasi Grup Perseroan. Dengan jumlah portofolio yang besar, Grup Perseroan juga menikmati skala ekonomi terkait dengan kegiatan operasinya, seperti pengadaan aset dan layanan, pemeliharaan dan beban operasional lainnya.

Saat ini, sebagian besar menara Grup Perseroan berlokasi di empat wilayah berpenduduk terpadat di Indonesia, yaitu di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sekitar 54% menara telekomunikasi milik Grup Perseroan wberada di Jawa yang mana hal ini sangat strategis, karena Grup Perseroan dapat memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi yang harus menambah kapasitas jaringan untuk mendukung besarnya permintaan konsumen melalui penambahan peralatan atau kolokasi. Akan tetapi, pertumbuhan di luar Jawa juga menjadi semakin penting, karena para operator telekomunikasi juga melebarkan jaringannya kesana.

Grup Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam industri dan diuntungkan karena besarnya hambatan bagi pemain baru untuk masuk ke dalam industri menara telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

- skala ekonomi sehubungan dengan operasi Grup Perseroan, seperti pengadaan untuk aset dan layanan, pemeliharaan dan biaya operasi lainnya;
- pembatasan peraturan, dan yang rumitnya proses mendapatkan izin dan lisensi;
- jumlah modal awal yang besar untuk membangun atau mengakuisisi menara;
- beban keuangan yang tinggi dan risiko operasional dan gangguan yang mungkin dihadapi para operator telekomunikasi dalam memindahkan peralatan ke lokasi menara yang berbeda;
- kebutuhan untuk membangun portofolio menara dengan skala besar dan keragaman geografis untuk menarik operator telekomunikasi; dan
- lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun hubungan bisnis dan kepercayaan, dan negosiasi kontrak sewa dengan operator-operator telekomunikasi dan klien lainnya.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Sebagai bentuk nyata komitmen Perseroan atas pemerataan dan peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat sekitar serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan, Perseroan senantiasa mengimplementasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan/CSR yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu:

1) Pendidikan
2) Konservasi Alam
3) Kesehatan
4) Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Donasi

Keempat pilar kegiatan CSR di atas diutamakan untuk disalurkan pada daerah dan masyarakat di sekitar lokasi wilayah operasional Perseroan, sehingga Perseroan berharap agar masyarakat sekitar dapat secara langsung merasakan dampak positif dari keberadaan Perseroan.

Pendidikan

Perseroan percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam mempersiapkan generasi unggul yang akan memegang peranan penting dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya memanfaatkan keunggulan bonus demografis yang dimiliki Indonesia ke depannya. Melalui pilar pendidikan, Perseroan berupaya untuk mendukung peningkatan kualitas sistem pendidikan dan infrastruktur serta pengembangan inovasi yang diperlukan.

Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan 2 (dua) program utama di bidang pendidikan, meliputi *Vocational High School Improvement Programs* dan pembangunan GOR Universitas Diponegoro.

Melalui program *Vocational High School Improvement Programs*, Perseroan berhasil memberikan kontribusi kepada sekitar 7.000 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, siswi, serta guru SMK di Kudus dan Jawa Tengah. Program ini berupaya untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri dengan pendapatan minimal dua kali rata-rata pendapatan daerah. Pada tahun 2024, kontribusi yang diberikan Perseroan untuk inisiatif ini adalah sebesar Rp14,56 miliar.

Perseroan juga mendukung pengembangan Pendidikan dan fasilitas olahraga untuk generasi muda melalui untuk kontribusi pada partisipasi pembangunan GOR Universitas Diponegoro, Semarang. Inisiatif ini bertujuan unutk menciptakan sarana yang mendukung aktivitas akdaemik dan non-akademik mahasiswa. Pada tahun 2024, Perseroan berkontribusi pada inisiatif inidengan nilai sekitar Rp9,7 miliar.

Konvervasi Alam

Dengan kesadaran mendalam akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan terjaganya fungsi ekosistem tersebut bagi kelangsungan hidup manusia serta guna melindungi kekayaan sumber daya bumi, Perseroan berkomitmen untuk memainkan peran aktif dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang vital bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Komitmen tersebut Perseroan lakukan melalui berbagai upaya-upaya berkelanjutan untuk menjaga harmoni antara perkembangan bisnis dan kelestarian lingkungan.

Di tahun 2024, 2 (dua) program inisiatif utama yang dijalankan Perseroan yaitu konservasi Penanaman Bibit Pohon Mangrove dan Dukungan terhadap Konservasi Macan Tutul Jawa dengan rincian sebagai berikut:

1) Perseroan bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam penanaman bibit pohon mangrove. Penanaman bibit ini telah dilakukan di beberapa wilayah strategis di Indonesia, yaitu: (i) Taman Nasional Komodo, NTT; (ii) Kulon Progo, Yogyakarta; dan (iii) Lantebung, Makassar.
2) Dalam dukungan terhadap konservasi macan tutul jawa, Perseroan meyakini bahwa macan tutul jawa memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan alam untuk mendukung regenerasi hutan alami. Pada tahun 2024 tim dari Yayasan SINTAS Indonesia dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur memasang 80 kamera pengintai di 40 stasiun di Bentang Alam RaungIjen, Jawa Timur. Upaya ini, yang merupakan bagian dari Java-wide Leopard Survey (JWLS), mencatat 126 aktivitas satwa liar, termasuk lima sampel feses yang diduga berasal dari macan tutul Jawa. Sampel-sampel tersebut saat ini sedang dianalisis secara genetik di Laboratorium Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, memberikan wawasan berharga tentang dinamika populasi dan keragaman genetik spesies yang sulit dijumpai ini.

Kesehatan

Di tengah tantangan penyediaan akses dan sarana kesehatan yang terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk mengambil peran dalam mewujudkan pemerataan kualitas kesehatan dan akses atas fasilitas kesehatan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Melalui pilar kesehatan, Perseroan berdedikasi untuk tidak hanya berkontribusi pada kemajuan ekonomi, melainkan juga dalam memastikan bahwa kemajuan tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sepanjang tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif di bidang kesehatan melalui Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA).

Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Donasi

Di tengah ketidakpastian dan tantangan yang ditimbulkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari, Perseroan berkomitmen untuk menanggapi secara proaktif dan berkelanjutan atas situasi darurat bencana dan pemulihan pasca bencana melalui program CSR pilar bantuan penanggulangan bencana alam dan donasi.

Melalui berbagai bentuk program, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam meringankan permasalahan masyarakat, membangun kembali sarana dan prasarana serta kehidupan komunitas yang terdampak. Sejak tahun 2022 berbagai upaya telah dilakukan Perseroan untuk memberikan bantuan penanggulangan bencana alam dan donasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Bantuan Yang Diberikan	Tahun
Bantuan Penanggulangan Bencana Alam		
1	Banjir di Pekalongan	2022
2	Bencana Alam Cianjur	2023
Donasi		
3	Donasi KitaBisa.com	2022
4	Donasi Sembako Pemkab Garut	2023

Kecenderungan Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Kegiatan Usaha Dan Prospek Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki atau kecenderungan yang dapat mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha dan prospek usaha.

Ketergantungan terhadap pemasok dan pelanggan tertentu

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok dan pelanggan tertentu.

Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sifat musiman dari kegiatan usaha.

Persaingan

Perseroan bersaing dengan penyedia menara telekomunikasi independen lainnya di Indonesia dan juga operator telekomunikasi dan anak perusahaannya yang memiliki dan mengoperasikan menara telekomunikasinya sendiri. Persaingan dalam industri menara telekomunikasi terutama ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan menara, baik menara baru atau melalui sistem kolokasi yang dapat memenuhi kebutuhan kapasitas, cakupan jaringan dari operator telekomunikasi.

Perseroan percaya bahwa dengan kemampuan pemasaran dan operasional dalam menyediakan layanan penyediaan menara dan didukung dengan kemampuan finansial Perseroan yang sehat, Perseroan akan mampu bersaing dalam industri. Perseroan juga melengkapi produk yang dapat ditawarkan kepada operator telekomunikasi melalui penyediaan jaringan fiber optik, penyediaan jasa *managed service* dan memberikan jasa pengelolaan energi listrik untuk perangkat operator yang dipasang di menara milik Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Grup Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01791/2.1032/AU.1/10/0702-3/1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai: (a) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (b) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* dan akuntansi kombinasi bisnis merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal dasar		
Nilai nominal - Rp10 (angka penuh) per saham		
Modal dasar - 200.000.000.000 saham (2023: 100.000.000.000 saham)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 51.014.625.000 saham	510.146	510.146
Tambahan modal disetor	7.836	17.623
Cadangan kompensasi berbasis saham	103.683	92.296
Saham treasuri	(738.670)	(931.339)
Penghasilan komprehensif lain	79.188	78.846
Saldo laba:		
Cadangan umum	1.300	1.200
Belum ditentukan penggunaannya	19.121.594	16.687.620
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	19.085.077	16.456.392
Kepentingan nonpengendali	70.587	55.272
TOTAL EKUITAS	**19.155.664**	**16.511.664**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I sebesar 8.083.478.731 (delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Baru atau sekitar 13,91% (tiga belas koma sembilan satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh (tidak termasuk saham treasuri) setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham. Setiap pemegang 619 (enam ratus sembilan belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah).

Tabel berikut ini menggambarkan proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) per saham.

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Sebelum PMHMETD I	Pelaksanaan HMETD	Setelah PMHMETD I
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal dasar			
Nilai nominal - Rp10 (angka penuh) per saham			
Modal dasar - 200.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 51.014.625.000 saham	510.146	80.835	590.981
Tambahan modal disetor	7.836	5.411.763	5.419.599
Beban Emisi PMHMETD I	-	4.167	4.167
Cadangan kompensasi berbasis saham	103.683	-	103.683
Saham treasuri	(738.670)	-	(738.670)
Penghasilan komprehensif lain	79.188	-	79.188
Saldo laba:			
Cadangan umum	1.300	-	1.300
Belum ditentukan penggunaannya	19.121.594	-	19.121.594
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	19.085.077	5.496.765	24.581.842
Kepentingan nonpengendali	70.587	-	70.587
TOTAL EKUITAS	**19.155.664**	**5.496.765**	**24.652.429**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 29 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Perseroan berupaya untuk melaksanakan pembagian dividen setiap tahunnya. Pembagian dividen merupakan salah satu upaya Perseroan untuk memenuhi hak dan kepentingan para pemegang saham. Akan tetapi, pengambilan keputusan terkait dividen disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan untuk memastikan kecukupan modal dalam kegiatan usaha. Pembagian dan besaran dividen yang diberikan kepada para pemegang saham diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris untuk interim dividen.

Perseroan hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen secara tunai, jika ada, dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, maka kebijakan pembagian dividen yang diterapkan Perseroan disesuaikan dengan kemampuan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2020 sampai dengan 2024, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun Fiskal	Jumlah laba (juta Rp)	% dividen dari laba bersih	Nilai dividen (juta Rp)	Dividen per saham (Rp)	Dasar Pembagian	Tanggal Pembayaran Dividen
2024	3.364.606	23,8%	800.000	15,9	Keputusan RUPST tanggal 23 April 2025	22 Januari 2025 dan 21 Mei 2025
2023	3.303.642	36,3%	1.200.000	24,1	Keputusan RUPST tanggal 26 Juni 2024	22 Desember 2023 dan 26 Juli 2024
2022	3.496.535	34,3%	1.200.000	24,1	Keputusan RUPST tanggal 5 Mei 2023	16 Desember 2022 dan 31 Mei 2023
2021	3.447.875	34,8%	1.200.000	24,1	Keputusan RUPST tanggal 27 Mei 2022	17 Desember 2021 dan 30 Juni 2022
2020	2.853.617	49,1%	1.400.000	28,1	Keputusan RUPST tanggal 31 Mei 2021	17 Desember 2020 dan Juni 2021

Perseroan tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 ("**PMK-81/2024**") berlaku efektif 1 Januari 2025 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

a) Wajib Pajak Orang Pribadi: dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan jenis investasi tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan (sehingga tidak dikenakan pajak). Tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, PPN Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan"; dan

b) Wajib Pajak Badan: bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak sepanjang dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan pembagian dividen sejenis.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu pada tanggal 20 Desember 2022. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a UU Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Indonesia, dengan

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. menggunakan Form DGT;
   b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
   c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
   d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
   e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
   f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
   g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
   a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
   b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila Wajib Pajak pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bea Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan transaksi surat berharga Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang yang dilakukan di pasar perdana berupa konfirmasi penjatahan efek dengan nilainya lebih dari Rp5.000.000 dan/atau transaksi surat berharga Indonesia yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi nilai transaksi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000, yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

PT Dwimuria Investama Andalan **(”DIA”)**

Keterangan Singkat

PT Dwimuria Investama Andalan (“**DIA**”) adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kudus, dan didirikan dengan nama PT Dwimuria Investama Andalan, sesuai dengan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 3 Oktober 2016 dibuat di hadapan LINDAWATI S.H., Notaris di Kabupaten Kudus. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043844.AH.01.01.TAHUN 2016, tanggal 4 Oktober 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116319.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 4 Oktober 2016.

Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan DIA, adalah sebagai berikut:

a) Maksud dan Tujuan DIA ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding.
b) Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, DIA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut, kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan peunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta No. 4 tanggal 26 Maret 2025 dibuat di hadapan GRENDI JAYA DARMAWAN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0171161 tanggal 26 Maret 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0073430.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 26 Maret 2025, susunan pengurus DIA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Honky Harjo
Direktur	:	Agus Santoso Suwanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Heru Budijanto Prabowo
Komisaris	:	Imron Hendrata

Struktur Permodalan

Pada saat prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan DIA adalah berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2017, dibuat di hadapan LINDAWATI, S.H., Notaris di Kabupaten Kudus yang telah disetujui Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0008628.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 13 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048605.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 13 April 2017; dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126952 tanggal 13 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048605.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 13 April 2017 ("**Akta No. 5/2017**").

Sesuai dengan Akta No. 5/2017, susunan pemegang saham DIA adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**210.619.700**	**210.619.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Robert Budi Hartono	107.416.047	107.416.047.000.000	51%
- Bambang Hartono	103.203.653	103.203.653.000.000	49%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**210.619.700**	**210.619.700.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Pemilik manfaat DIA yaitu Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono memiliki hubungan keluarga dengan pemilik manfaat Perseroan, yaitu Martin Basuki Hartono dan Victor Rahmat Hartono.

Keterangan Mengenai Pembelian Sisa Saham

Berdasarkan PPSS, kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil sisa saham yang tidak diambil bagian dalam HMETD setelah dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan tambahan yang dipesan oleh pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, sebanyak-banyaknya 7.397.355.646 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam) saham.

Uraian Tentang Persetujuan Untuk Membeli Sisa Saham

DIA tidak memerlukan persetujuan untuk melakukan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga.

Sumber Dana Yang Digunakan Untuk Pembelian Sisa Saham

Sumber dana yang digunakan oleh DIA sebagai Pembeli Siaga adalah dari kas internal.

Uraian Tentang Persyaratan Penting dari PPSS

Berdasarkan PPSS:

a. Pembeli Siaga dengan tunduk pada diperolehnya pernyataan pendaftaran menjadi efektif, menjamin dengan kesanggupan penuh dan bersedia untuk membeli sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan dan mempunyai kecukupan dana untuk membeli sisa Saham Baru.
b. Kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli sisa Saham Baru akan bergantung pada pemenuhan atas syarat-syarat pendahuluan sebagai berikut:
    i. pernyataan pendaftaran menjadi efektif; dan
    ii. Perseroan telah menerima pembayaran seluruh harga sisa Saham Baru sesuai dengan harga pelaksanaan.

Setiap sengketam perbedaan atau pertentangan dalam bentuk apapun juga yang timbul sehubungan dengan PPSS maupun pelaksanaan PPSS baik mengenai cidera janji, perbuatan melawan hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan PPSS yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender akan diajukan dan diselesaikan melalui arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaan Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum **Makes & Partners Law Firm**
Menara Batavia, 7th Floor
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Tel. (021) 574 7181
Faks. (021) 574 7180

Nama Partner	:	Iwan Setiawan, S.H.
Nomor dan tanggal STTD	:	STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 5 Mei 2023
Pedoman Kerja	:	Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal**")
Surat Penunjukan	:	130/CS-KH/SMN/X/24, tanggal 24 Oktober 2024

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Akuntan Publik **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja**
Indonesia Stock Exchange Building, Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 5289 5000
Faks. (021) 5289 4100

Nama Rekan	:	Widya Arijanti
Nomor STTD	:	STTD.AP-119/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP.0702
Surat Penunjukan	:	128/CS-KAP/SMN/X/24, tanggal 24 Oktober 2024

Tugas Pokok: Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit.

Notaris **Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn**
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 3
Jakarta 11140
Tel. (021) 634 5668
Faks. (021) 634 5666

Nomor STTD	:	STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Pedoman Kerja	:	- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	131/CS-NOTARIS/SMN/X/24, tanggal 24 Oktober 2024

Tugas Pokok: Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD I kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka PMHMETD I, antara lain membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD ini, kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka PMHMETD.

BAE **PT Raya Saham Registra**
Gedung Plaza Sentral, lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Tel. (021) 2525666
Faks. (021) 2525028

Nomor Izin Usaha	:	KEP-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991
Keanggotaan Asosiasi	:	Peraturan Pasar Modal
Nomor Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)
Surat Penunjukan	:	129/CS-BAE/SMN/X/24, tanggal 24 Oktober 2024

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab BAE dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, permohonan pemesanan saham tambahan dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PMHMETD I ini, menyatakan dengan tegas tidak ter-Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1) Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 619 (enam ratus sembilan belas) Saham Lama, mendapatkan 100 (seratus) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Juli 2025.

2) Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Juli 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di kantor BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 11 Juli 2025 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Tel. (021) 252 5666
Faks. (021) 252 5028
Email: hmetd.towr@registra.co.id

3) Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga 18 Juli 2025.

a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
   (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

   Satu Hari Bursa berikutnya, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

   Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
   (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
   (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
   (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
   (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
      - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
      - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
      - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp50.000,- per SBHMETD dengan PPN 11%.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga 18 Juli 2025 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4) Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 18 Juli 2025.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
f. Dikenakan biaya konversi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
d. Dikenakan biaya konversi.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2025 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5) Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Juli 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
2) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
3) Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No.14/2019.

6) Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Sarana Menara Nusantara Tbk
Bank: PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: KCK Menara BCA
No. Rekening: 2050004735
Atas Nama: PT Sarana Menara Nusantara Tbk

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 22 Juli 2025.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

Adapun periode akan diterimanya bukti tanda terima pemesanan pembelian saham yaitu pada tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2025.

8) Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham yaitu pada tanggal 23 Juli 2025.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:
1) Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9) Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2025 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 25 Juli 2025 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun dari nilai dana yang wajib dikembalikan, yang diperhitungkan setelah tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan pemesan tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

10) Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 16 Juli 2025 hingga tanggal 22 Juli 2025, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;

- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11) Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sarana Menara Nusantara Tbk No. 142 tanggal 25 April 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**PPSS**"), DIA sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru sebagaimana diatur di dalam PPSS.

12) Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 14 Juli 2025 hingga 18 Juli 2025 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan jumlah maksimum sebesar 13,91% (tiga belas koma sembilan satu persen).

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Juli 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 11 Juli 2025 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Tel. (021) 252 5666
Faks. (021) 252 5028
Email: hmetd.towr@registra.co.id

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Juli 2025 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.